

**IMPLIKASI PROGRAM *RESETTLEMENT* PT. BERAU COAL  
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIO KULTURAL  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAYAK PUNAN BASAP  
DI WILAYAH KILOMETER 02 LATI  
KECAMATAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANJAR WAHYU NING TYAS**

**115110801111019**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya :  
Nama : Anjar Wahyu Ning Tyas  
NIM : 115110801111019  
Program Studi : S1 Antropologi  
menyatakan bahwa:

1. skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan

Malang, Januari 2016

Anjar Wahyu Ning Tyas  
NIM. 115110801111019

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama **Anjar Wahyu Ning Tyas** telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 15 Januari 2016

Pembimbing  
(Dhanny S Sutopo, M.Si)  
NIP. 20090673 0915 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama **Anjar Wahyu Ning Tyas** telah disetujui oleh Dewan Penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Manggala Ismanto, M.A., Ketua Dewan Penguji  
NIK.1880520 201504 1 003

Dhanny S. Sutopo M.Si., Anggota Dewan Penguji  
NIK. 20090673 0915 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Antropologi

Menyetujui,  
Pembantu Dekan 1

Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19670803 2001121 1 001

Syaiful Muttaqin, M.A  
NIP. 19751101 200312 1 001

## KATA PENGANTAR

Hatur Syukur dan segala Puji kepada Allah SWT, Sang Maha Besar, dengan segala Rahmat dan Perlindungan-Nya saya berhasil melewati salah satu ujian mengais ilmu, dan melewati tantangan hidup di tanah perantauan. Alhamdulillah karya sederhana ini dapat terselesaikan, semoga pembaca dapat menuai manfaat dari setiap kalimatnya.

Keberhasilan ini berkat Allah dan dukungan penuh orang-orang terkasih di hidup saya. *Mimindi*-ku Bunda Sri Sasiani, Pak *Mun* Katimun Asis Soewito, pasangan favoritku sepanjang masa. Kalian segalanya, terimakasih untuk semuanya, Cinta kalian tiada duanya. Terimakasih juga untuk pasangan *Yun keke* Ayu Wanti Wanti dan Mas *Kol Kol* Nurkholis, mbak dan mas-ku yang aku tahu juga berdoa dalam diam untuk kesuksesanku. Trio *mucil*; Tuthoss, Si *pong pong* Achnaf, dan *Popow* doa tulusmu menantikan aku pulang, adalah salah satu motivasi terindah dalam menempuh pendidikan ini. Kemudian teruntuk *Kai'* dan Mbah tersayang, terima kasih untuk doa-doa dan kunjungannya yang menguatkan hati. Kalian inspirasi sejatiku. Semua dukungan keluarga besar melalui kalimat-kalimat sederhana; *kapan kamu lulus Yas,*? terimakasih untuk motivasi yang terselubung dalam kalimat itu. Teruntuk suamiku Muhammad Sukriyadi terima kasih untuk cinta, doa dan dukungannya dalam studiku ini.

Terimakasih untuk pembimbing saya yang dengan sabar mengampu saya dalam penyusunan karya ini, bapak Dhanny Septimawan Sutopo. Serta ucapan tulus dan terdalam rasa terima kasih saya untuk peran dan dukungan dosen-dosen Antropologi selama saya menempuh studi di Antropologi Brawijaya; Pak Hippolitus K Kuewel, Pak Hatib Abdul Kadir, Pak Iwan Nurhadi, Pak Ary Budhianto, Bu Siti Zurinani, Bu Edlin Dahniar Al Fath, Bu Myrtati Dyah Artaria, Mas Roikan, Mas Sipin, Mas Irsyad, Mas Manggala dan Mas Adji.

Tentu saja, teman-teman teristimewa di; Malang Raya, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya, Antropologi, yang berkat perhatian dan

dukungannya, membuat saya merasa tegar selama berada di Malang. Teman-teman tercinta seperjuangan Antropologi 2011 kalian istimewa dihati saya. Terimakasih untuk, kebaikan hati, kebersamaan dan loyalitasnya selama ini. Terkhusus untuk Widya, Tom, *Sesepuh Cahyo*, gadis-gadis *The Zainaf*, Seperjuangan *anak-anak Papa Dhanny*; Mbek-Putri-Cacin-Vita-Ilmi-Om Deki, si *Rempong Dila*, *ngapak Liza*, Rindi *endel*, Elsa *Paboya*, Kos Randimisme, Kosan Watugong 17B Bu Sikam Jaya, kalian teman-teman terdalam dilubuk hati saya, terimakasih atas kebaikan hati kalian hingga akhir.

Terimakasih juga untuk semua bantuan keluarga besar PT. Berau Coal dan Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal dalam proses penyusunan karya ini, serta Warga Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan Basap Kilometer 2 Lati yang banyak memberi saya ilmu tentang kekuatan dan kesederhanaan menjalani hidup. Serta pihak-pihak lain yang menjadi informan kemudian kawan di sepanjang perjalanan ini, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kemurahan hatinya untuk membantu saya. Semoga ikatan ini bertahan sampai akhir hayat. Untuk semua pihak yang namanya tak tertulis disini, kalian telah tercatat dengan baik dalam kenangan hidup saya di Malang.

Karya ini tidak luput dari kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan penyusun yang disengaja maupun tidak. Semoga karya ini membawa manfaat bagi semua orang yang berkontribusi didalamnya, bagi pembaca, terutama diri saya pribadi selaku penyusun agar senantiasa diberi kegigihan hati dan jiwa untuk senantiasa tak henti-henti mengais ilmu sampai akhir hayat. Salam.

Malang, Januari 2016  
Penyusun,

Anjar Wahyu Ning Tyas

## ABSTRAK

Tyas, W N Anjar. 2016. **Implikasi Program *Resettlement* PT. Berau Coal Terhadap Kehidupan Sosio Kultural Warga Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan Bassap Kilometer 02 Lati Kecamatan Gunung Tabur Provinsi Kalimantan Timur.** Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.  
Pembimbing: Dhanny S Sutopo

Kata Kunci: Program *Resettlement*, *Displacement*, Pemiskinan, Masyarakat Lingkar Tambang, Dayak Punan Basap

Keberadaan salah satu *area eksplorasi* perusahaan tambang Batu Bara PT. Berau Coal di wilayah Lati, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ini memaksa warga Dayak Punan Basap yang lebih dahulu menghuni kawasan tersebut harus menyingkir dan dipindah ke lokasi baru. Menggunakan pendekatan Cernea (2000) untuk mencermati proses pemiskinan yang terjadi pada wilayah *Resettlement* akibat proses *displacement* (pemindahan) baik terjadi secara paksa atau tidak. Proses pemiskinan ini dapat dilihat dari terjadinya kehilangan lahan (*landlessness*), kehilangan pekerjaan (*joblessness*), kehilangan tempat tinggal (*homelessness*), marjinalisasi (*Marginalization*), meningkatnya morbiditas dan kematian (*Increased Morbidity and Mortality*), ketahanan pangan (*Food Insecurity*), kehilangan Akses atas kepemilikan (*Loss of access to common property*) serta aspek disartikulasi sosial (*Social Disarticulation*). Menggunakan metode Studi Kasus dan analisa Deret waktu, diketahui bahwa program pemindahan ini berlangsung dalam 2 (dua) fase peralihan, yang pertama yakni relokasi yang dilakukan ke Kilometer 10 Lati. Relokasi ini bersifat sementara karena wilayah tinggal orang Dayak Punan Basap masih merupakan areal konsesi PT. Berau Coal yang menjadi target eksplorasi selanjutnya. Akhirnya melalui campur tangan pemerintah dan *stakeholder* terkait, warga Dayak Punan Basap kembali dimukimkan ke Kilometer 02 Lati. Pemindahan kali ini diharapkan agar warga Dayak Punan Basap tidak lagi hidup nomadik dan mampu sejahtera secara mandiri. Namun penelitian ini menemukan bahwa penghidupan warga Dayak Punan Basap mengalami pemiskinan semenjak dipindahkan ke area baru. Kesulitan beradaptasi ini dikarenakan lingkungan baru jauh berbeda dengan habitat asli mereka; daerah pinggiran sungai. Sehingga keadaan ini justru mendorong tingkat kecenderungan bergantung pada perusahaan semakin tinggi. Selain itu kehidupan warga pun teridentifikasi mengalami marjinalisasi di tanah adat mereka sendiri, akibat himpitan geografis maupun himpitan psikologis.

## ABSTRACT

Tyas, W N Anjar. 2016. **The Implication of PT. Berau Coal Company Resettlement Program for Social Culturer's Life of Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan Basap at Kilometer 02 Lati, Gunung Tabur District, Berau Regency, East Kalimantan Province.** Anthropology, Faculty of Cultural Studies, Brawijaya University.  
Supervisor: Dhanny S Sutopo

*Keywords: Resettlement, Displacement, Impoverishment, Communities Around the mine, Dayak Punan Basap*

The existence one of the exploration area coal mining PT. Berau Coal company in the region of Lati, Gunung Tabur, Berau Regency, East Kalimantan Province. That is forcing the residents Dayak Punan Basaps which earlier inhabited the region, they to get away and moved to a new location. Adopt from Cernea (2000) examine the process of impoverishment that occurred in the Resettlement area in consequence of displacement processes happened by both forced or not. This impoverishment may occur in case the settlers has landlessness, joblessness, settlers that homelessnes, marginalization occured, Increased Morbidity and Mortality, Food Insecurity, Loss of access to common property, and come Social disarticulation. Using a single case study method and time sequence analysis, it is known that these displacements program lasted in two (2) transition phase, the first is relocation to Kilometer 10 Lati. This relocation is temporary because of the area habitat of the Dayak Punan Basap's is claimed by area of PT. Berau Coal where targetted to be the next exploration mining. Eventually with in intervention of the government and the related stakeholders, Dayaks Punan Basap resettled again to Kilometer 02 Lati area. The last displacements is expected Dayak Punan Basaps in order not to live in the nomadically and be able to become independent in economic. However, this study found that the Dayak Punan Basaps livelihoods to experience of impoverishment ever since relocated to a new areas. This adaptability is difficult because the new area much different from their native habitats; riverside area. So these circumstances encourages a tendency dependent on the company increasing. Moreover life of the settlers also identified to experience marginalized at their own traditional lands, in consequence of geographical and psychological crush.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Kajian Pustaka .....	11
1.5 Landasan Teoritis dan Konseptual.....	19
1.5.1 Landasan Teoritis .....	19
1.5.2 Landasan Konseptual.....	25
1.6 Metode Penelitian .....	26
1.6.1 Lokasi Penelitian .....	26
1.6.2 Jenis Penelitian .....	27
1.6.3 Pemilihan Informan .....	31
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
1.6.5 Validasi Data .....	37
1.6.6 Analisis Data.....	38

### **BAB II**

<b>LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
2.1 Selayang Pandang Kabupaten Berau .....	43
2.2 Sambakungan.....	47

2.3.2 Sejarah terbentuknya Kampung Sambakungan.....	47
2.3.2 Monografi Kampung Sambakungan.....	49
2.3 Kilometer 02 Lati.....	55
2.3.1 Lokasi <i>Resettlement</i> .....	55
2.3.2 Warga Pemukiman <i>Resettlement</i> .....	57
2.3.3 Adat dan Kebiasaan Orang Dayak Punan Bassap Kilometer 02 Lati....	62

### **BAB III**

#### **IMBAS KEBIJAKAN EKSPLORASI BAGI KOMUNITAS ADAT**

<b>TERPENCIL DAYAK PUNAN BASAP.....</b>	<b>68</b>
3.1 Batubara: Kebijakan Eksplorasi dan Konsekuensinya .....	68
3.1.1 Tambang Batubara : Strategi Etika Sosial Budaya.....	68
3.1.2 Dibalik Lati Mine Operation (LMO).....	72
3.2 Program <i>Resettlement</i> .....	78
3.2.1 Pemukiman Warga Dayak Punan Basap Kilometer 02 Lati.....	78
3.2.2 Bantuan Pilar-pilar Kehidupan .....	91

### **BAB IV**

#### **PENGHIDUPAN WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAYAK**

<b>PUNAN BASAP TERANCAM .....</b>	<b>96</b>
4.1 Analisis Teoritis : Pemindahan yang Memiskinkan .....	96
4.2 Analisa Temuan: Bukti-bukti Pemiskinan.....	100
4.2.1 Lahan dan Tempat Tinggal Orang Dayak Punan Basap.....	100
4.2.2 Hubungan yang Memarjinalisasi dan Kehidupan yang Terhimpit .....	105
4.2.3 Struktur Sosial yang Tercerai-Berai .....	118

### **BAB V**

#### **HARAPAN DI MASA DEPAN .....**

5.1 Kesimpulan .....	128
5.2 Saran .....	131

#### **DAFTAR PUSTAKA.....**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 1.2 Matriks Alur Logika Penelitian.....	42
Tabel 3.3 Jumlah Perizinan serta Luasan wilayah Peratmbangan di Berau.....	69
Tabel 4.4 Matriks Alur Resiko Pemiskinan warga Km 02 Lati.....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Berau dalam skala 1:300.000 .....	44
Gambar 2.2 Kampung Sambakungan .....	47
Gambar 2.3 Peta Situasi letak Kampung Sambakungan dan KAT KM 02 Lati ....	50
Gambar 2.4 Jalan Raya yang Menghubungkan Kampung Sambakungan dengan Kampung-Kampung Lainnya, termasuk ke Pusat Kota Kabupaten.....	53
Gambar 2.5 Pemukiman <i>Resettlement</i> Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan di Kilometer 02 Lati .....	55
Gambar 2.6 Kondisi jalan masuk ke Pemukiman <i>Resettlement</i> KM 02 Lati, dan jalan arah ke wilayah KM 10 bekas daerah relokasi sebelumnya.....	57
Gambar 2.7 Orang Dayak Gaai, dan salah satu orang Dayak Punan Basap di KAT KM 02 Lati.....	58
Gambar 2.8 Dua orang warga Dayak Punan Basap KM 02 Lati selepas pulang dari perburuan .....	62
Gambar 2.9 Pemberkatan Nikah pada Perayaan Natal tahun 2013 oleh Pendeta.	66
Gambar 3.1 Kondisi pemukiman relokasi KM 10 Lati yang telah di tinggalkan ..	79
Gambar 3.2 Ketua RT VI Kampung Sambakungan alias Ketua RT warga KAT Km 02 Lati .....	81
Gambar 3.3 Seorang warga dengan Tas anyaman hasil buatanya sendiri .....	82
Gambar 3.4 Gereja sekaligus menjadi Balai Pertemuan warga KAT KM 02 Lati	83
Gambar 3.5 Model Rumah Warga dan sarana penerangan listrik PLN.....	84
Gambar 3.6 kondisi WC yang berada dalam rumah dan dapur salah satu warga.	85
Gambar 3.7 Proses pemberian jatah air oleh <i>vendor</i> perusahaan.....	85
Gambar 3.8 Salah satu Toko Kelontong milik warga .....	86
Gambar 3.9 Salah satu contoh hewan hasil Buruan, Burung Rangkok atau biasa dikenal sebagai Burung Enggang bagi masyarakat Kalimantan.....	87
Gambar 3.10 Batang-batang <i>turus</i> warga yang belum terjual.....	88
Gambar 3.11 Kolam Ikan yang tidak dikelola warga .....	90
Gambar 3.12 Anak-anak Asrama KAT.....	92

Gambar 3.14 Pengobatan Gratis oleh petugas medis Kecamatan Gunung Tabur dan Puskesmas Kampung Sambakungan .....	93
Gambar 3.15 Pemeriksaan salah seorang warga KAT Km 02 Lati .....	94
Gambar 4.1 Pondok bekas hunian Warga KAT Dayak Punan Basap sebelum di relokasi ke Kilometer 10 .....	101
Gambar 4.2 Peribadatan Minggu di salah satu rumah warga Kilometer 10 ....	107
Gambar 4.3 Lahan garapan warga KAT ketika masih bermukim di Kilometer 10, dan lahan kosong terbengkalai di sebelah rumah warga KAT di Kilometer 02 ..	109
Gambar 4.4 Menjual minuman Es di depan rumah.....	112
Gambar 4.5 Keadaan Sekitar rumah .....	124

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Warga Dayak Punan Basap Kilometer 02.....	137
Lampiran 2 Daftar Pemilik dan Kondisi Bangunan Resetlement .....	142
Lampiran 3 Kalender Aktivitas Warga KAT Km 02 Lati Tahun 2014 .....	143
Lampiran 4 Data Pribadi .....	144
Lampiran 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	147
Lampiran 6 Surat Perpanjangan Skripsi.....	149
Lampiran 7 Berita Acara Seminar Hasil .....	150
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	151
Lampiran 9 Pedoman Wawancara .....	152
Lampiran 10 Bukti Ujian Skripsi .....	154

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang amat kaya dan khas, dan telah menjadi bagian penting pada sebagian besar pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menyimpan kekeayaan alam yang melimpah. Seperti halnya di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, yang telah juga memberikan banyak kontribusi pembangunan Nasional. Kekayaan Sumber Daya Alam melimpahnya berupa hasil tambang mineral dan batubara, hasil hutan seperti kayu, rotan maupun hasil non-kayu lainnya.

Pada tahun 1987, wilayah ini telah menghasilkan 21% pendapatan ekspor Indonesia, yang berasal dari cadangan sumberdaya alam seperti hutan, minyak gas, batu bara, dan mineral-mineral yang lain (MacKinnon *et al.*;1996 dalam Nining Liswanti,dkk;2004). Sementara itu berdasarkan catatan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur pada tahun 1998 memperkirakan potensi sumberdaya alam yang ada mencakup sektor kehutanan dengan luas 21,1 juta hektar dan sektor pertmbangan serta minyak bumi dan gas dalam skala besar.

Pada dasarnya kegiatan pertambangan di Indonesia melibatkan empat kepentingan yang berbeda, yaitu masyarakat yang tinggal di tempat kegiatan pertambangan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengusaha

pertambangan. Dalam kenyataan sehari-hari seringkali terjadi konflik kepentingan di antara keempatnya. Dari pemberitaan media massa dapat dirasakan bahwa konflik itu semakin sering terjadi dan meliputi wilayah pertambangan yang kian meluas.

Inti persoalannya biasanya adalah ada pihak yang merasa dirugikan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini pun terjadi di Kalimantan Timur pada masa itu, sejak masa orde baru lengser daerah yang menduduki peringkat ke-6 dalam kontribusi terbesar dalam pembangunan Nasional ini pun tidak luput dari keadaan kemiskinan yang melanda masyarakatnya. Ada sekitar  $\pm 700$  ribu jiwa atau 31,6% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur. Kondisi ini pun diperparah dengan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Di Indonesia praktek pertambangan telah jelas diatur dan mendapat izin penuh yang tertuang dalam perundangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan pada UU No.11/1967 tentang pokok pertambangan. UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Undang-Undang ini mampu membawa pengaruh pesat atas masuknya berbagai perusahaan multinasional. Namun disisi lain, banyak kontradiksi atas UU Pertambangan ini yang dianggap menyingkirkan banyak kepentingan dan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat (yang bermukim di area konsesi) karena pergeseran tempat tinggal dan terjadi berbagai macam transformasi kebudayaan dalam pola hidup mereka.

Dampak pada lingkungan perekonomian daerah, efek industri pertambangan non-migas akan sangat terasa. Kedatangan dan masuknya industri pertambangan disuatu daerah, menjadikan daerah tersebut mengalami peningkatan dalam aktivitas perekonomian. Seperti pada contoh kasus kehadiran PT. KPC (Kaltim Prima Coal) pada awal tahun 1980-an di wilayah kecamatan Sangatta, banyak penduduk lokal yang terserap sebagai tenaga kerja kontraktor oleh perusahaan tersebut. Mereka umumnya bekerja dibidang pembangunan sarana dan prasarana perusahaan, perumahan atau jalan sebagai buruh, Namun setelah PT. KPC beroperasi mereka banyak beralih profesi sebagai operator dan kontraktor-kontraktor. Kemudian pun efek positif atas keberadaan PT. KPC ini pada sektor pertanian yang ikut diperhatikan kesejahteraannya. Diantaranya adalah terjadi kemajuan pada sistem ladang berpindah yang dipraktekkan oleh masyarakat bermata pencharian peladang dengan bergeser ke sistem pertanian menetap. Ini merupakan salah satu contoh bentuk program pembinaan masyarakat yang bertujuan membentuk kemandirian dan tanggung jawab ekonomi masyarakat sekitar tambang<sup>1</sup>.

Seperti halnya PT Berau Coal yang merupakan perusahaan salah satu tambang batubara yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, PT Berau Coal adalah produsen batubara terbesar ke-5 di Indonesia yang telah meraih berbagai penghargaan bidang sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup dari Pemerintah Indonesia. Sejarah PT Berau Coal tidak bisa dipisahkan

---

<sup>1</sup>Lihat Surjadi, Haryono, Bayhaqi. (1999). "Ekonomi Politik Tambang: Sebuah Takaran Untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara. Sandra Kartika & Candra Gautama

dari Berau, kabupaten seluas 34,127 kilometer persegi di Kalimantan Timur. Berau Coal menjadi salah satu elemen pendukung proses pembangunan di kabupaten yang berpenduduk sekitar 179.444 jiwa penduduk itu. PT Berau Coal memulai usaha penambangan pada 26 April 1983, setelah memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Saat ini, luas area konsesi PT.Berau Coal mencapai 118,400 hektar, dan berlokasi sekitar 300 kilometer ke utara dari ibukota provinsi Samarinda. Saat ini, Berau Coal yang memiliki memiliki 3 area penambangan yaitu di Lati, Binungan, dan Samarata<sup>2</sup>.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah menurunkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. UU tentang kewajiban pengadaan sistem CSR<sup>3</sup> pada perusahaan tambang. PT Berau Coal pun berkomitmen terhadap pengembangan potensi sumber daya masyarakat di sekitar wilayah operasi penambangannya. Semua ini dijalankan sesuai visi pemberdayaan masyarakat Berau Coal yaitu menjadikan komunitas sekitar tambang berdaya, sejahtera dan mandiri. Juga searah dengan misi perusahaan yaitu mendorong perubahan kualitas hidup umat manusia berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal. Pelaksanaan Community Deveplopment PT Berau Coal

---

<sup>2</sup>Data *Laporan Berkelanjutan 2011-2012 PT Berau Coal* “Berbagi Harapan dan Masa Depan” Terbitan Tahun 2012

<sup>3</sup>Singkatan dari istilah “*Coorporate Social Responsibility*”

dilaksanakan berdasarkan empat pilar yaitu: (1) Pendidikan dan Pengetahuan, (2) Kesehatan dan Nutrisi, (3) Lingkungan dan Budaya, dan (4) Pengembangan Ekonomi. Program ini merupakan salah satu komitmen Perusahaan yang telah dijalankan dengan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yakni program *Resettlement* yang diterapkan pada Komunitas Adat Terpencil suku Dayak Punan Basap. Pembangunan pemukiman dilakukan di kawasan Lati Kilometer 02, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

Wilayah tersebut merupakan kawasan lingkaran tambang PT. Berau Coal area konsesi tambang Lati. Upaya awal pemindahan tempat dilakukan dengan pertama-tama memindahkan warga KAT Dayak Punan Basap dari daerah pinggiran sungai Lati ke wilayah KM 10 Lati, kemudian dibangun pemukiman dengan hunian permanen beserta fasilitas untuk hidup di KM 02 Lati, kelurahan Sambakungan. Diterapkan juga program berkelanjutan terkait dengan upaya membantu adaptasi warga lokal dengan lingkungan baru. Program bersifat *community empowerment* menjadi dasar dari program-program pilar CSR di wilayah tersebut. Pemahaman sosial budaya masyarakat sangat penting dalam hal ini untuk mencapai keberhasilan target dari jenis program pembinaan yang bersifat *sustainable plan* tersebut.

Saat ini segala bentuk program pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang di PT. Berau Coal dijalankan secara maksimal oleh Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal yang berfungsi secara penuh mengatur dan mengawasi

program CSR bagi masyarakat binaan di lingkaran tambang bersama stakeholder terkait. Pemukiman *Resettlement* di KM 02 Lati ini telah secara resmi mendapat dukungan penuh dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono pada Peresmian sekaligus pembukaan pemukiman KAT KM 02 Lati pada 25 Januari 2013. PT Berau Coal akan melaksanakan program pengembangan ekonomi berkelanjutan selama 2-3 tahun untuk para warga KM 02 Lati, (sumber: kemenkopmk.go.id/25 Januari 2013)

Komitmen CSR yang dilakukan PT. Berau Coal ini merupakan salah satu contoh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membangun kehidupan masyarakat daerah pedalaman, khususnya terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan hidup warga KAT. Dalam kajian ini istilah komunitas adat terpencil digunakan berdasarkan perpanjangan dari istilah yang disebutkan oleh Departemen Sosial mengenai “masyarakat terasing”. Menurut Keppres No. 111/1999 dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002, komunitas adat terpencil adalah “kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpecah serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.”

Warga KM 02 Lati ini dapat digolongkan dalam Masyarakat terasing yang menetap sementara, yang artinya penduduk telah menetap untuk suatu masa tertentu, kondisi kehidupan dan mata pencaharian masih sederhana, dan sudah sering berkomunikasi dengan dunia luar (Tsing, 1998: 222). Menurut Tsing (1998) program pemerintah mengidentifikasi masalah mendasar “Masyarakat

Terasing” sebagai perpindahan, dimana kategori “masyarakat terasing” dibangun atas dasar stereotip “mobilitas terlarang”. Dalam konteks warga KM 02 Lati, keberadaan mereka dianggap mengganggu dan ‘tidak aman’ dalam area pertambangan, isamping dapat terkena imbas dan dampak langsung limbah tambang, sekaligus membatasi gerak mereka (nomaden).

Berbagai kasus diwilayah pertambangan seringkali melibatkan masyarakat lingkar tambang sebagai subjek yang terarah akibat dampak yang muncul atas keberadaan perusahaan tambang di lingkungan masyarakat. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan khususnya, seperti di Kalimantan Selatan, muncul Kongres Masyarakat Dayak Meratus yang berlangsung pada tanggal 21-26 Juni 2003 dengan tujuan menolak penambangan di Hutan Lindung Pegunungan Meratus (HLPM) yang rencananya akan dilakukan oleh PT Meratus Sumber Mas.

Adapula kasus lain yang terkait dengan sengketa lahan yang terjadi antara Kelompok Tani Bersatu yang merasa lahan kepemilikannya terganggu akibat adanya monopoli investasi di PT. Kaltim Prima Coal ke PT Bumi Resources Tbk. Adapula kasus pergolakan yang terjadi akibat upaya pengusiran terhadap sedikitnya 3.782 warga yang bermukim diwilayah konsesi milik PT. Kitadin-Banpu (perusahaan tambang asal Thailand di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur). Kasus semacam ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan masyarakat lokal dengan perusahaan tambang. Konflik dan

tegangan sosial terjadi sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap wilayah tempat tinggal mereka yang menjadi lahan produktif tambang<sup>4</sup>.

Kasus pergeseran lahan, kerusakan lingkungan atau munculnya berbagai ketimpangan dan cacat sosial baru pada sistem perekonomian masyarakat setempat akibat aktivitas pertambangan merupakan isu-isu utama yang sering mencuat akibat gerakan perlawanan masyarakat dan aliansi pembela kepentingan rakyat terhadap Negara dan perusahaan tambang. Dalam kasus penerapan program CSR aspek Community Development, muncul klaim bahwa Program *Resettlement* warga KAT Dayak Punan Basap di KM 02 Lati berproses dengan sangat memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan warga Dayak Punan. Mungkin memang tidak ada sengketa besar-besaran yang melibatkan warga KAT atas tanah adat mereka dengan pihak perusahaan, tidak pula melakukan resistensi secara mencolok atas pembatasan daerah tinggal mereka. atau gerakan perlawanan dalam skala besar yang melibatkan ikatan masyarakat adat atau LSM terkait.

Perhatian peneliti terarah pada kasus *Resettlement* yang terjadi dan melibatkan unsur-unsur transformasi kehidupan sosial-ekonomi dan budaya secara signifikan. Terkait dengan program Pemberdayaan masyarakat di warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati, pengukuran dan perhatian terarah pada hitungan kuantitas keberhasilan program dalam jangka tertentu. Namun seringkali mengabaikan kebutuhan dasar sosial warga KAT Dayak Punan itu

---

<sup>4</sup>Lihat *Tambang & Penghancuran Lingkungan (Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia Tahun 2003-2004)*, Terbitan JATAM tahun 2006

dalam konteks kehilangan identitas tunggal sebagai masyarakat asli. Memakai istilah Micheal Cernea<sup>5</sup> dalam penjelasannya mengenai proses ‘memiskinkan’ dan ‘memaksakan’ pemindahan serta peralihan kehidupan masyarakat atau komunitas tertentu ke wilayah baru, justru seringkali melupakan kebutuhan fundamentalis seperti kehilangan tempat tinggal (home) yang digantikan dengan ‘rumah’ (house) baru. Konsep-konsep sederhana ini ternyata memiliki artian berbeda dimata msyarakat, yang bagi pemerintah atau pihak korporasi merupakan hal sederhana yang sering terabaikan karena dianggap akan terpenuhi dengan wujud bangunan dan bantuan material baru. Sehingga, upaya pemberian bantuan dalam jangka panjang dalam rangka membantu adaptasi warga lokal di wiliayah tinggal yang baru di prediksicukup efektif untuk menciptakan “*land*” (lahan) baru dan identitas baru yang seiring dengan pembangunan modern.

Demikian yang ingin peneliti cermati dalam kehidupan warga KAT KM 02 Lati yang telah menerima program *Resettlement* oleh pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang dan terkhusus bantuan pengembangan ekonomi jangka panjang oleh PT. Berau Coal. Keadaan tersebut peneliti amati sebagai langkah Pemerintah dalam mewujudkan proses marjinalisasi masyarakat dengan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bersifat sentralistis. Konsep marjinalitas ini meruncing pada dualisme kepemimpinan atas penguasa tunggal, dimana

---

<sup>5</sup>Cernea, Michael M. (2000). *Impoverishment Risks, Risk Management, and Reconstruction: A Model of Population Displacement and Resettlement*. USA: George Washington University

segala praktek kekuasaan akan bermuara pada pemerintah di atasnya. Oleh karena itu, warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati dapat dikatakan sebagai kelompok marginal yang tinggal dan hidup dibawah bayang-bayang kepentingan elit ekonomi. Untuk memahami dan membantu upaya pemulihan pasca-*Resettlement* dan guna membantu berjalannya Program Pengembangan Ekonomi secara maksimal, maka peneliti berusaha mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang terjadi di wilayah relokasi baru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terkait dengan program CSR (Coorporate Social Responsibility) yang diterapkan oleh PT. Berau Coal untuk peningkatan kesejahteraan warga lokal di sekitar area lingkaran tambang, mendorong terjadinya berbagai macam dinamika pada kehidupan sosial-budaya, seperti yang terjadi pada KAT Dayak Punan di kawasan Resttlemnt Lati Km 02 Lati. Terjadi transformasi kebudayaan yang menggiring kehidupan warga Dayak Punan menyesuaikan tingkat pola hidup modern yang terarah. Oleh karena itu timbul pertanyaan bagaimana Implikasi dari Program *Resettlement* yang dilakukan oleh PT. Berau Coal di wilayah KM 02 Lati pada kehidupan sosial budaya warga Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan?

## **1.3 Tujuan**

Menjelaskan secara menyeluruh dinamika yang terjadi pada kehidupan warga KAT Dayak Punan di kawasan *Resettlement* KM 02 Lati sejak menerima program *Resettlement* dari PT. Berau Coal dengan pelaksana Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal. Penemuan ini didalami dengan

menganalisa aspek sosial dan budaya yang berkenaan dengan indikator-indikator perubahan berdasarkan Model IRR sesudah masuknya program , transformasi unsur-unsur budaya, peran dan resistensi warga Dayak Punan tersebut pada program CSR.

#### **1.4 Kajian Pustaka**

Kajian terkait dengan *Resettlement* yang menjadi bahan acuan kedua adalah hasil penelitian dari Welyne Jeffrey Jehom berjudul “*Development and displacement: Kenyah-Badeng in Bakun Resettlement Malaysia*” pada tahun 2008. Penelitian ini berfokus pada pemindahan komunitas terpencil secara tidak sukarela di wilayah Sg. Asap karena ada klaim proyek pembangunan bendungan Bakun Hidro-elektrik Proyek (BHP). Komunitas terpencil tersebut dengan terpaksa pindah ke pemukiman baru karena Pemerintah setempat menyatakan alih fungsi lahan tersebut untuk pemanfaatan bendungan. Relokasi yang terjadi tahun 1998 ini memindahkan 15 keluarga ke lokasi baru di kawasan *Resettlement* BHP atau yang biasa dikenal dengan kawasan Sungai Asap. Penelitian Jehom ini berfokus pada usaha resistensi yang dilakukan oleh para pemukim baru di lokasi tempat tinggal yang baru dengan segala resiko sosial yang dihadapi. Dimana lebih detail mengungkapkan tentang strategi dan pola bertahan hidup komunitas tersebut dalam membangun kehidupan berkelanjutan dengan mengandalkan kekuatan tokoh adat setempat.

Perbedaan utama pada fokus penelitian peneliti terletak pada batasan permasalahan yang diteliti, penelitian peneliti kali ini akan berfokus pada

permasalahan yang telah dibatasi hanya pada analisa terhadap implikasi akibat kebijakan *Resettlement* terhadap kehidupan Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan di KM 02 Lati, serta mengidentifikasi secara menyeluruh berbagai resiko akibat pemindahan dengan menggunakan analisa M.Cernea atas 8 resiko kehilangan akses pribadi yang mungkin dihadapi atau sudah terjadi. Serta apa saja gejala yang terjadi terkait dengan hasil pemindahan tersebut.

Sedangkan dalam kasus penelitian Jehom yang juga menggunakan pendekatan IRR Model oleh Cernea, ia mencermati bagaimana pola bertahan dan upaya pembangunan oleh para warga Komunitas Sg.Asap. Secara lebih khususnya, dalam penelitian ini ia mengidentifikasi adaptasi perubahan relasi berbagai kekuatan termasuk didalamnya kekuatan lokal dalam pengembangan aspek sosial ekonomi dengan memanfaatkan keberadaan Perusahaan Sawit yang juga beroperasi diwilayah tersebut. Sehingga konflik atas penolakan karena upaya pemindahan mampu teredam, tapi justru yang muncul adalah klaim 'kampung' (village) atas Sg.Asap saat warga merasa telah mampu membangun desanya.

Referensi lain terkait *Resettlement* yang menjadi kajian dari penelitian peneliti adalah hasil Disertasi tahun 2013 oleh Pham Van Dung (The University of Waikato, Laos) berjudul "*Resettlement And Conflict Resolution: A Case Study Of H'mong And Khmu Ethnic Groups In D Ensavang And Phonsavat Villages, Luang Prabang District, Luang P Rabang Province, Laos PDR*". Hasil disertasi ini bercerita mengenai konflik yang terjadi akibat upaya

relokasi oleh pemerintah untuk mengatur perluasan dan mengakomodir penyebaran perkembangan ekonomi dan pembangunan di Laos dengan merata. Pemerintah setempat bertujuan memperkenalkan kemajuan industrialisasi ke seluruh wilayah Laos termasuk ke berbagai macam masyarakat etnis minoritas di daerah pegunungan hingga dataran rendah dengan mengoptimalkan orientasi terhadap pengembangan ekonomi pasar. Namun, akibat dari kebijakan pemerintah ini masyarakat sering berkonflik atas persepsi dan pengaturan kepemilikan tanah, terjadi tumpang tindih lahan dan beragam klaim bermunculan atas kepemilikan hutan antar berbagai komunitas yang dimukimkan kembali, warga desa yang telah lama bermukim, dan pemerintah.

Penelitian Van Nhung berkontribusi terhadap wacana tersebut dan berupaya menggambarkan akar dari penyebab konflik secara lebih terstruktur. Melakukan Studi kasus yang berfokus pada dua desa, yakni desa Densavang dan Phonsavat di distrik Luang Prabang, Provinsi Luang, Laos. Inilah letak pembeda pada fokus penelitian peneliti yang tidak terorientasi atas penyebab lahirnya konflik atau mencari langkah dialektis sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa atas lahan dan konflik kepentingan karena kebijakan *Resettlement*. Namun, penemuan adanya potensi konflik di lapangan nanti akan menjadi bahan pendukung yang penting untuk menerangkan skala kemajuan indikator program *Resettlement* KM 02 Lati dalam upaya pembangunan kemandirian ekonomi berkelanjutan. Sehingga potensi resiko yang dimaksudkan oleh Cernea sebagai potensi kemiskinan dan kemunduran

ekonomi mampu terelakan. Sedangkan penelitian Van Dhung menunjukkan adanya konflik berkepanjangan yang terabaikan akibat dari penekanan zona ekonomi dengan jalan penggabungan desa-desa kecil ke desa yang lebih maju, membatasi praktek ladang, meningkatkan fungsi pasar, dan membuka secara lebar beragam model industri termasuk didalamnya peningkatan pembangunan asset Negara.

Rujukan terakhir merupakan sebuah jurnal dari *Urban and Regional Analysis Journal* Vol. IV 1, 2012, Pg.63-75. Tulisan “*Development-Induced Displacement In Romania: The Case Of Roşia Montană Mining Project*” oleh Lucian Vesalon dan Remus Creţan ini merupakan tanggapan kritis atas keadaan populasi hasil pemindahan secara paksa karena proyek pengadaan tambang emas di Rosia Montana, Rumania. Penelitian dengan menggunakan kerangka teoritis Development-Induced Displacement (DID) ini mengidentifikasi keadaan pasca relokasi terhadap Populasi yang bermukim disekitar area konsesi tambang yang telah mengalami penggusuran dengan penggantian kompensasi yang dijanjikan untuk membantu kelanjutan kehidupan baru para pemukim tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ditemukan beberapa masalah dalam mekanisme pemberian bantuan kompensasi oleh perusahaan tambang itu. Penelitian ini bertujuan menemukan inti dari segala kompleksitas resiko tersebut, atas pengembangan akses ekonomi yang terjadi karena adanya relokasi secara sepihak. Serta memperjelas batas-batas dari kebijakan relokasi dan *Resettlement* di area itu.

Hasil Penelitian dalam jurnal tersebut memiliki beberapa aspek kesamaan objek penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni terletak pada kasus *Resettlement* di area pertambangan. Namun, perbedaan terletak pada fokus masalah penelitian, karena penelitian ini akan mengarah pada penentuan dan identifikasi potensi resiko yang terjadi dalam rencana program pemberdayaan KAT KM 02 Lati secara jangka panjang, menemukan berbagai resiko yang mungkin mampu menghambat jalannya program ekonomi mandiri yang digerakan oleh Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal sebagai pelaksana program *CSR Community Development*. Di lain pihak penelitian peneliti dapat pula mendukung dan membantu Program Pengembangan ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat Dayak Punan KM 02 Lati untuk meningkatkan kemandirian dan adaptasi warga KAT pada proyek besar pembangunan struktur ekonomi-sosial dan politik di pemukiman itu. Melakukan tindakan implementatif dengan mencermati faktor, unsur dan potensi dari hambatan kemandirian warga KAT yang tidak mampu menyesuaikan proyek kemandirian ekonomi karena masih belum secara konsisten bertransformasi dari pola hidup lama ke arah kemandirian dan modernitas sosial-ekonomi. Sehingga diharapkan mampu mendukung dan memberikan deskripsi kepada YDBBC dalam merumuskan formula dan indikator keberhasilan yang ideal dalam ukuran kemajuan program secara spesifik dan sejalan dengan pola kehidupan sosial-budaya warga KAT KM 02 Lati.

Ketiga referensi tersebut di rasa mampu menjadi bahan kajian dan pembanding yang tepat untuk menjelaskan arah dan maksud penelitian yang

akan peneliti lakukan di pemukiman warga KAT KM 02 Lati, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bahan rujukan yang peneliti pakai ini memiliki kesamaan pokok sesuai bahasan dari objek penelitian, yaitu berkenaan dengan ulasan mengenai (1) Program *Resettlement* baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak korporasi; (2) program atau kebijakan *Resettlement* ini terjadi di wilayah industri yang berada di area pedalaman (perusahaan tambang, pembangunan asset sekitar sungai, dan sebagainya) bukan pemindahan atau penggusuran yang terjadi diperkotaan karena kebijakan tata kota; (3) berkaitan dengan masyarakat marjinal dan minoritas seperti komunitas terpencil atau dalam istilah yang peneliti pakai adalah Komunitas Adat Terpencil; dan (4) analisa terhadap keadaan pasca relokasi atau pemindah



NAMA	Anjar Wahyu Ning Tyas	Lucian Vesalon & Remus Crețan	Pham Van Dung	Welyne Jeffrey Jehom
JUDUL PENELITIAN	Implikasi Program <i>Resettlement</i> PT. Berau Coal terhadap Kehidupan Sosio Kultural Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan di Wilayah KM 02 Lati, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	“ <i>Development-Induced Displacement In Romania: The Case Of Roșia Montană Mining Project</i> ” (2012)	“ <i>Resettlement And Conflict Resolution: A Case Study Of H’mong And Khmu Ethnic Groups In D Ensavang And Phonsavat Villages, Luang Prabang District, Luang P Rabang Province, Laos PDR.</i> ”(2013)	“ <i>Development and displacement: Kenyah-Badeng in Bakun Resettlement Malaysia</i> ” (2008)
FOKUS PENELITIAN	(1)Mengidentifikasi potensi resiko yang terjadi dalam rencana program pemberdayaan KAT KM 02 Lati secara jangka panjang (2) implikasi akibat kebijakan <i>Resettlement</i> terhadap kemandirian ekonomi dan daya hidup mandiri dalam aspek sosial budaya (3) Transformasi paksa akibat kehilangan akses pribadi dan kemunduran kesejahteraan	(1)Mengidentifikasi Permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pemberian bantuan kompensasi oleh perusahaan tambang emas (2) mengurai permasalahan dengan cara mencari & memperjelas batas-batas dari kebijakan relokasi dan <i>Resettlement</i> pada kawasan populasi disekitar tambang	(1) konflik yang terjadi akibat upaya relokasi oleh pemerintah (2)Iplikasi yang terjadi akibat industrialisasi di Laos dengan orientasi terhadap pengembangan ekonomi pasar (3) Studi bertujuan sebagai langkah dialektis sebagai solusi sengketa atas lahan konflik kepetingan karena kebijakan <i>Resettlement</i>	(1) Strategi Pola Bertahan Hidup komunitas yang bermukim; (2) Upaya resistensi dengan mengandalkan kekuatan tokoh adat klaim ‘kampung’ (village) atas pemukiman Sg.Asap; dan (3) identifikasi atas adaptasi perubahan relasi kekuasaan pada Akses kekuatan lokal dalam memanfaatkan keberadaan Perusahaan Sawit

METODE PENELITIAN	<p>Metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus tunggal Eksplanatoris. Menggunakan pendekatan Teori IRR (<i>Impoverishment Risks and Reconstruction – IRR Model</i> (Model Resiko Memiskinkan dan Merekonstruksi) oleh Michael Cernea</p>	<p>Metode Kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kerangka teoritis Development-Induced Displacement (DID)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode penelitian Studi Kasus Komparatif (multikasus; 2 Desa)</p>	<p>Menggabungkan metode Kualitatif dan Kuantitatif dengan pendekatan Studi ‘extended case method’ yang dikembangkan Burawoy (1991). Menggunakan pula Teori IRR dari Michael Cernea</p>
LOKASI PENELITIAN	<p>Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan di Wilayah KM 02 Lati, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur</p>	<p>Populasi yang bermukim disekitar Pertambangan Emas, di Montana, Rumania</p>	<p>Desa Densavang dan Desa Phonsavat di distrik Luang Prabang, Provinsi Luang, Laos.</p>	<p>Malaysia, Serawak, Kampung Sg. Asap (pinggiran sungai Asap) daerah sekitar bendungan Bakun Hidro-elektrik Proyek (BHP).</p>

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

## 1.5 Landasan Teoritis dan Konseptual

### 1.5.1 Landasan Teoritis

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko serta sekaligus menjadi jawaban untuk mengurangi resiko akibat proses relokasi yang terjadi. Penelitian ini akan menganut model teoritis yang diperkenalkan oleh Micheal Cernea dalam mengurai berbagai resiko yang mungkin terjadi akibat relokasi dan menjelaskan sebab-sebab yang mendorong upaya pergerakan yang bisa dilakukan masyarakat yang merasa termarginalkan oleh penguasa elit ekonomi diwilayah mereka. Cernea menunjukkan ada 8 faktor penting yang harus dicermati dalam memahami keadaan sosio-kultural dan kebutuha ekonomi-politik warga masyarakat yang mengalami proses relokasi (dalam konteks penelitian ini adalah warga KAT Dayak Punan BasapKM 02 Lati).

Model yang Cernea ajukan sebagai salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kebijakan *Resettlement* adalah *Impoverishment Risks and Reconstruction – IRR Model* (Model Resiko Memiskinkan dan Merekonstruksi). Selanjutnya dalam bahasan ini akan disebut dengan IRR. Cernea mengungkapkan bahwa ada kebutuhan dan kepentingan dasar terkait dengan model pengembangan dalam proses pemindahan (*displacement*) dan proses penempatan ulang (*Resettlement*) pada suatu masyarakat. Ini akan membantu mendiagnosa berbagai macam proyek-proyek relokasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal.

Adapun fungsi yang diharapkan dapat membantu arah kemajuan pengembangan kehidupan masyarakat yang terelokasi yakni:

- (a) Sebagai fungsi prediktif, untuk mengantisipasi terjadinya pemiskinan dalam proyek pemindahan secara paksa dan proyek entaan ulang
- (b) Sebagai fungsi diagnosa terhadap keadaan daerah baru secara lebih intensif
- (c) Sebagai perencanaan dan fungsi resolusi masalah, memandu pengukuran perhitungan atas resiko yang mungkin terjadi, mencegah resiko mitigasi
- (d) Sebagai fungsi penelitian, dapat menjadi langkah metodologis dalam menganalisis implikasi dari program-program *Resettlement* dan menjadi panduan dalam memonitoring bahan studi evualuatif terhadap proses *Resettlement*

Sebagai model teoritis, IRR juga dapat menghubungkan anatar perbedaan konseptual dalam proses analisis pemindahan dengan teori kemiskinan, pencegahan pemiskinan, dan mengurangi kemiskinan. Dalam pemindahan secara paksa yang menjadi perhatian dominan terletak pada terjadinya secara terus-menerus proses pemiskinan secara tidak disadari oleh kebanyakan mayarakat yang mengalami pemindahan maupun pihak korporasi atau pemerintah yang melakukan kebijakan tersebut. Sehingga model IRR ini akan mengulas beberapa indikator utama yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan suatu Program *Resettlement*.

Sejak tahun 1990-an, Model IRR sudah banyak menjadi bahan diskusi dan acuan dalam bidang masalah relokasi, *Resettlement* dan program-program sejenisnya. Berikut ini merupakan pokok utama cakupan landasan dalam model IRR :

- a. Konsep dasar : Resiko, Pemiskinan dan rekonstruksi. Ketiga hal ini berhubungan dengan aspek resiko yang terjadi dalam program pengembangan dan relasi resiko terkait perilaku yang mungkin muncul, seperti; Pencegahan Resiko, Pembongkaran Resiko, Pengambilan Resiko, Pengurangan Resiko, Pengaturan Resiko, dan lain sebagainya
- b. Tren dan kebutuhan *Resettlement*, termasuk didalamnya menyinggung mengenai kebutuhan atas pembangunan industri modern dan peningkatan transportasi, infrastruktur, kemajuan teknologi terbaru, pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, akan selalu ada efek yang ditimbulkan dari enggusuran dan pemindahan masyarakat atau komunitas disuatu wilayah guna berdirinya pembangunan yang lebih baik. Seperti resiko menyempitnya lahan tinggal, peningkatan kepadatan populasi secara mendadak disuatu area karena menerima populasi baru yang dipindahkan, serta adanya kebutuhan tumbuh kembang sosial ekonomi yang terjadi semakin kompleks.
- c. Dikapitalisasi para pemukim, terjadinya proses kapitalisme secara acak yang menuntut para pemukim baru untuk beradaptasi dengan cepat

dilingkungan baru, namun justru tidak disadari mereka semakin miskin karena tekanan kapitalis yang lebih dominan yang sebelumnya tidak terlalu besar di daerah tinggal mereka yang lama.

- d. Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, jika secara objektif landasan program-program pengembangan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu meningkatkan pertumbuhan demografis, lebih baik jika mengusahakan minimalisir terjadinya *Resettlement* dan apabila masih saja tidak terhindarkan, maka membantu upaya pembebasan kemiskinan akibat relokasi secara total

Ada indikator dan resiko utama yang terjadi dalam pemiskinan akibat relokasi, dimana diantaranya dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam suatu program *Resettlement*, yaitu :

(1) *Landlessness* (Kehilangan Tanah)

Kehilangan tanah dalam artian bahwa para pemukim terpaksa meninggalkan tanah (daerah) yang telah menghidupi mereka secara natural. Terlebih lagi jika hal demikian terjadi pada masyarakat terasing (adat) yang hidup jauh dari perkotaan. Kebiasaan hidup dan tata cara hidup dalam lingkungan asli akan lebih adaptif ketimbang lingkungan baru yang dibangun dan dibentuk dalam waktu singkat.

(2) *Joblessness* (Kehilangan Pekerjaan)

Kehilangan Pekerjaan ini termasuk didalamnya kehilangan mata pencaharian turun temurun, kebiasaan dan cara bertahan hidup.

(3) *Homelessness* (Kehilangan Tempat Tinggal)

Kehilangan tempat tinggal tidak hanya termasuk didalamnya kehilangan rumah (bangunan) namun juga kehilangan daerah hidup, dalam konteks pola dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.

(4) *Marginalization* (Marjinalisasi)

Marjinalisasi terjadi dengan cara menyingkirkan mereka dari keadaan dan kenyataan hidup mereka secara paksa dan singkat, memaksa mereka untuk menerima cara dan pola hidup baru dengan mengganti kebutuhan dan pola hidup mereka secara paksa. Meskipun ada dalih pembenaran dengan membantu adaptasi dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan, namun pengambilan lahan adalah salah satu pendorong besar kegagalan proses pengembangan ekonomi mandiri. Tanpa menggantikannya dengan keadaan yang mirip dan serupa.

(5) *Increased Morbidity and Mortality* (Meningkatnya Morbiditas dan Kematian)

Meningkatnya angka kematian dan penyakit di lokasi baru, dapat disebabkan oleh trauma pasca-relokasi dan pemindahan secara mendadak atau paksa. Dapat pula disebabkan menurunnya daya adaptif biologis tubuh terhadap lingkungan baru, karena perubahan

iklim dan cuaca, berubahnya pasokan makanan dan stress berkepanjangan.

(6) *Food Insecurity* (Ketahanan Pangan)

Kehilangan suplai makanan pokok, karena perpindahan lahan baru dapat mendorong peningkatan kekurangan pangan dalam jangka waktu panjang. Sebagai akibat proses adaptasi yang lambat karena harus kembali mengolah lahan, atau menemukan mode mata pencaharian baru.

(7) *Loss of access to common property and Social Services* (Kehilangan Akses Kepemilikan dan Menurunnya Kemampuan Kerja)

Kehilangan akses dan hak atas kepemilikan tanah lagi karena telah terjadi alih fungsi lahan biasanya terjadi pada kaum petani dan peladang. Atau bahkan juga dapat terjadi pada para nelayan dan penangkap ikan, karena sungai telah tercemari limbah. Kehilangan akses dan hak ini akan menurunkan kemampuan kerja bagi para masyarakat yang tidak berbekal kemampuan baru, memulai segalanya dari awal untuk meningkatkan *skill* dalam mendapat pekerjaan yang sesuai dengan model hidup modern. Akibatnya, banyak diantara para pemukim cenderung menjadi pekerja kasar dan buruh.

(8) *Social disarticulation* (Disartikulasi Sosial)

Terjadinya ketimpangan atas akibat penyesuaian yang mendadak, pola bertahan hidup yang berubah. Semakin banyaknya tekanan dari wilayah industry dan pihak-pihak kapitalis. Dapat mendorong

terjadinya pergerakan sosial (resistensi) dan ketimpangan sosial. Ada perubahan nilai-nilai yang dianut, perubahan pola dan sistem perilaku dari yang sebelumnya.

Delapan indikator gejala pemiskinan yang diajukan Cernea tersebut akan menjadi landasan peneliti untuk mengidentifikasi bermacam variabel penelitian terkait dengan implikasi dari Program *Resettlement* di Berau Coal di wilayah KM 02 Lati, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Uraian ini akan dijelaskan dengan menggunakan langkah analisis studi kasus dari Robert K. Yin dengan mengambil cara analisis Pembuatan Eksplanasi (narasi penelitian) dan analisa menggunakan teknik data kronologis.

## **1.5.2 Landasan Konseptual**

### *1.5.2.1 Resettlement*

*Resettlement* dapat diartikan sebagai suatu proses perpindahan secara fisik yang dilakukan secara sengaja (unsur dipaksakan) dan termasuk didalamnya terjadi perubahan keseimbangan sosial ekonomi didalam rumah tangga baik sebaik unit terkecil maupun unit makro didalam komunitas.

### *1.5.2.2 Sosio Kultural Masyarakat*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosio Kultural berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Maksudnya ialah terkait dengan aspek kehidupan sosial dan budaya.

### 1.5.2.3 Komunitas Adat Terpencil

Istilah Komunitas Adat Terpencil digunakan berdasarkan perpanjangan dari istilah yang disebutkan oleh Departemen Sosial mengenai “masyarakat terasing”. Menurut Keppres No. 111/1999 dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002, komunitas adat terpencil adalah “kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.”

### 1.5.2.4 Dayak Punan Basap Berau

Dayak punan adalah salah satu suku dayak yang tinggal di daerah Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan dan lebih banyak lagi di hutan-hutan Kalimantan Timur dan di Kalteng. Masyarakat suku dayak mempunyai ketrampilan yang sangat hebat di bidang berburu dan meramu, termasuk meramu obat-obatan dari bahan tradisional. Kearifan lokal suku dayak punan masih sangat kuat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak di Provinsi Kalimantan Timur, lebih khususya di Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur, KM 02 Lati. Pada kawasan *Resettlement* warga KAT Dayak Punan di area konsesi pertambangan batu bara milik PT. Berau Coal.

Lokasi penelitian ini dipilih karena didasari atas beberapa pertimbangan bahwa pertama yakni meningkatnya tren penerapan Program CSR dari perusahaan terkait pemberdayaan dan pengembangan program ekonomi berkelanjutan secara khusus diarahkan pada Komunitas Adat Terpencil yang secara total melakukan perbaikan standar hidup masyarakat marjinal, hal inilah yang tengah diupayakan secara berkepanjangan oleh PT.Berau Coal sebagai satu-satunya Perusahaan Tambang Batu bara yang memiliki kontribusi besar pada Kabupaten Berau. Kedua, kajian mengenai Komunitas Adat Terpencil yang secara detail membahas mengenai dinamika sosio kultural yang dipengaruhi dengan program relokasi sangat minim ditemukan, khususnya yang mengambil objek penelitian pada suku Dayak Punan di Kalimantan Timur. Pertimbangan terakhir adalah sedikitnya populasi suku Dayak Punan yang masih diakui sebagai penduduk lokal keturunan Dayak Punan di Kalimantan Timur, sehingga penelitian ini bertujuan juga untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk melestarikan kebudayaan lokal sebagai warisan budaya Indonesia.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian CSR (Case Study Research) yang berfokus pada tipe penelitian *single case study* (studi kasus tunggal). Menurut Yin (2014) penelitian Studi Kasus adalah suatu metode penelitian yang secara strategis cocok untuk menjawab

permasalahan *how* atau *why*, memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini). Penelitian Studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan Studi Kasus Eksplanatoris yang menitikberatkan pada pengajuan teori-teori atau penjelasan-penjelasan yang memungkinkan dapat diterapkan pada situasi-situasi tertentu dalam fokus permasalahan yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini adalah pengajuan penggunaan model IRR dari M.Cernea untuk membantu mengidentifikasi potensi atas resiko yang terjadi akibat adanya Program *Resettlement*, yang juga diusung untuk membuktikan terjadinya ketimpangan dalam pola dan struktur kehidupan sosial-ekonomi warga KAT KM 02 Lati di wilayah yang baru. Desain model yang diajukan Cernea untuk menjelaskan berbagai indikator keberhasilan suatu Program relokasi atau pemindahan coba diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan implikasi Program *Resettlement* tersebut. Inilah yang

Dalam Penelitian tentang Studi Kasus tidak terlepas dari 3 kondisi yaitu: (a) tipe pertanyaan penelitian yang di ajukan, (b) luas kontrol yang dimiliki oleh peneliti atas fenomena yang diteliti, dan (c) adanya fokus yang jelas atas peristiwa yang sedang terjadi (kontemporer) sebagai

kebalikan dari keadaan historis. Berhubungan dengan pertanyaan penelitian “bagaimana” atau “kenapa”, studi kasus eksplanatoris merupakan desain studi yang tepat untuk membantu peneliti menjabarkan analisa secara lebih konkret dan aplikatif. Karena Studi Kasus Eksplanatoris lebih mengarah ke penggunaan strategi-strategi studi kasus historis dan praktek penelitian dilapangan.

Sebagaimana pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan sebagai rumusan masalah *bagaimana Implikasi dari Program Resettlement yang dilakukan oleh PT. Berau Coal di wilayah KM 02 Lati pada kehidupan sosial-budaya warga KAT Dayak Punan?*, jawaban dari pertanyaan yang ingin dicapai ini membutuhkan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu (analisis deret waktu). Melalui penjelasan yang saling terkait antara studi kasus (observasi partisipasi) dengan analisis historis. Karena tipe pertanyaan “bagaimana” atau “kenapa” memerlukan jawaban yang sifatnya klarifikasi, dan bukan survey atau uji coba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara jelas menetapkan studi kasus sebagai strategi penelitian yang tepat untuk membantu langkah metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana ungkap Yin (2014:18) bahwa Studi Kasus adalah suatu inkuiri empiris yang:

- Menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana:
- Batas-batas antara fenomena dalam konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana:
- Multisumber bukti dimanfaatkan.

Dalam studi kasus bersifat eksplanatoris ada cara pokok yang disebut “penjodohan pola” yang dideskripsikan oleh Donald Campbell (1975), yakni mengaitkan beberapa informasi kasus yang sama dengan beberapa proposisi teoritis. Namun, peneliti lebih memilih menggunakan metode Pembuatan Eksplanasi sebagai teknik analisa data, karena hasil penelitian studi kasus ini dijelaskan secara deskriptif namun terarah sesuai indikator lintasan kronologi waktu. Sebagaimana dalam suatu artikel yang berhubungan dengan satu tipe pola-yaitu pola deret waktu (Campbell dalam Yin,1969).Pola deret waktu disini adalah menganalisa runtutan kasus dari masa sebelumnya saat ini dan kemungkinan yang dapat terjadi. Seperti yang peneliti lakukan dalam penelitian ini untuk mencermati kasus keadaan warga KAT di (lokasi sebelumnya) *Resettlement* di KM 10 Lati sebelum di pindah ke KM 02 Lati. Sehingga dapat ditemukan pola yang serupa untuk kemudian saling dihubungkan berdasarkan unit analisis yang ingin peneliti jabarkan.

### 1.6.3 Pemilihan Informan

Guna memudahkan perumusan dan analisa masalah penelitian, maka klasifikasi dan penentuan informan yang tepat untuk menjawab rumusan permasalahan perlu ditentukan berdasarkan peran dan relevansi subjek (informan) dengan topik penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana penggunaan teknik *purposive sampling* ini dimaksudkan dengan cara pemilihan informan dengan memilih informan sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri spesifik yang dikehendaki oleh peneliti. Sampling yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain Untuk melindungi privasi Informan, dalam Bab-bab selanjutnya nama informan di samarkan (The Belmont Report Volume II). Adapun kriteria informan yang dijadikan sumber data adalah :

- (1) Berusia antara 20-75 Tahun, serta dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani
- (2) Subjek-subjek dari PT.Berau Coal dan Yayasan Dharma Bhakti yang memiliki terkait dalam proses pembentukan dan penerapan program *Resettlement* PT. Berau Coal, baik terikat secara historis maupun formatif
- (3) Warga KAT KM 02 Lati yang sudah lama bermukim dan digolongkan sebagai warga lokal sejak relokasi pertama dari KM

10 yang menjadi subjek utama dalam penerima program *Resettlement* tersebut

- (4) Pemerintah dan stakeholder yang memiliki kepentingan dan kuasa dalam membantu pembangunan pemukiman dan keberlangsungan hidup warga KAT KM 02 Lati baik secara langsung maupun tidak
- (5) Pemuka agama baik yang beragama samawi dan lainnya,

Oleh karena itu, Berikut ini merupakan beberapa subjek di lokasi penelitian yang dipilih sebagai informan yang dianggap mampu memenuhi kriteria peneliti:

1. Warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati
2. Kepala Divisi CSR PT Berau Coal
3. Pelaksana Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal (sebagai Pelaksana program CSR PT Berau Coal), meliputi:
  - Kepala Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal
  - Community Development Officer (Penanggung jawab Program 4 Pilar), terkhusus yang mengawasi program pilar Komunitas Adat Terpencil dan *Resettlement* KM 02 Lati
  - Penanggung jawab lapangan di *Resettlement* KM 02 Lati (Pendamping Wilayah)
4. Pemerintah Daerah & Stakeholder Terkait

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif ini tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi berupa informasi-informasi yang jelas dan nyata yang mendukung penelitian ini. Informasi-informasi tersebut di dapat dari informan-informan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria. Penelitian ini melandasakan akan realitas atau gejala sosial yang ada, dan dalam penelitian ini realitas atau gejala sosial yang di teliti. Realitas atau gejala tersebut dijelaskan dan dipahami dengan penekanan para proses dan jalannya peristiwa, bahwa peristiwa dijelaskan atau diperkuat dengan peristiwa lainnya.

Penelitian kualitatif ini bersifat induksi, dimana penelitian ini membangun atau menghasilkan teori dari bawah. Artinya, peneliti mengumpulkan data atau informasi, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas realitas atau gejala yang dikaji. Selanjutnya pola hasil temuan tadi diuji dengan teori-teori yang diambil dari literatur yang berbasis topik dan sifat penelitian yang sama. Dalam menggunakan metode studi kasus yang dikembangkan oleh Robert K. Yin, penelitian ini mendasarkan teknik pengumpulan data dengan prinsip yang pertama yaitu menggunakan multisumber bukti secara terisolasi (mendalam), kemudian menciptakan data dasar studi kasus berupa catatan atau laporan penelitian, dan yang terakhir adalah memelihara rangkaian bukti, istilah data yang biasa disebut dalam jbaran metode studi

kasus Yin. Prinsip yang terakhir ini dimaksudkan untuk memungkinkan pengamatan dalam lingkup yang lebih luas—pembaca studi kasus misalnya—mengikuti asal muasal bukti sejak dari pernyataan awal penelitian hingga konklusi akhir studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2014:129).

Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini meliputi (a) data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam kegiatan penelitian atau objek yang diamati untuk dianalisis lebih lanjut. Data tersebut adalah data mengenai keadaan wilayah penelitian dan temuan utama hasil penelitian; (b) Data Sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang diperoleh dari sumber lain yang selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam laporan, data tersebut adalah data dari literatur yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Oleh karena itu penelitian studi kasus ini menggunakan enam cara pembuktian untuk hasil temuan lapangan yakni :

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara yang bersifat *open-end* yakni peneliti dapat bertanya kepada informan tentang fakta-fakta suatu peristiwa, selain itu dalam tipe wawancara seperti ini peneliti memberi keleluasaan kepada informan untuk memberikan opini tentang peristiwa tersebut. Wawancara secara terbuka ini dilakukan guna memperoleh informasi mendalam

yang terkait dengan permasalahan penelitian tanpa membatasi jawaban dan pendapat informan dengan model pertanyaan tertutup (Pedoman Wawancara terlampir). Jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah data primer, karena sifat datanya yang diperoleh secara langsung sebagai akuisis orisinal untuk menjawab proposisi awal penelitian.

Wawancara dan diskusi dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik komunikasi wawancara *indepth interview* (wawancara mendalam) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian; Kebijakan *Resettlement* PT. Berau Coal, subjek penerima kebijakan tersebut, stakeholder dan Lembaga terkait dengan pembangunan sosial warga KAT KM 02 Lati serta pandangan Pemerintah Daerah terkait, untuk menunjang perolehan data dan informasi di lapangan.

b. Observasi Langsung dan Partisipan

Peneliti tinggal selama 30 hari dan melakukan kunjungan rutin ke KM 02 Lati. Kunjungan lainnya juga dilakukan di lokasi yang terkait dengan objek penelitian, seperti area perusahaan. Observasi Langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan menggambarkan kondisi lingkungan sekitar KM 02 Lati dan juga tempat tinggal informan. Dalam hal ini mengobservasi lingkungan tinggal dan wilayah program *Resettlement* KM 02

Lati dan wilayah sebelumnya yang menjadi area tinggal warga KAT Dayak Punan BasapKM 02 Lati. Sedangkan untuk Observasi Partisipan menekankan peran serta peneliti sebagai subjek yang tidak hanya menjadi pengamat pasif, melainkan juga berperan dalam peristiwa dan keseharian warga masyarakat KAT KM 02 Lati.

c. Perangkat Fisik

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau perangkat yang erat hubungannya dengan perusahaan dan kegiatan perusahaan. Alat dan perangkat instrumen yang ditemukan di lapangan yang dapat dijadikan bukti dalam mendesain laporan Studi Kasus.

d. Dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian Studi Kasus adalah dokumen terkait dengan topik atau permasalahan penelitian, berupa kajian literatur yang dapat membantu menerangkan variabel-variabel yang didapat selama wawancara dengan informan sehingga dapat menjadi bukti yang mendukung dan menguatkan topik penelitian. Seperti surat, memorandum, artikel, skripsi, buku, jurnal, hasil pertemuan, berita meliputi surat kabar cetak maupun elektronik, dan segala literatur yang berasal dari model

penelitian yang memiliki konteks permasalahan yang serupa atau terkait.

e. Rekaman Arsip

Rekaman-rekaman arsip meliputi sumber informasi lain yang didapat sebagai rekaman pribadi peneliti selama berlangsungnya proses penelitian, berupa rekaman dokumen keorganisasian, dokumen lain yang relevan (peta, buku harian, buku laporan, transkrip wawancara, foto kegiatan dan lain sebagainya).

### 1.6.5 Validasi Data

Menurut Neuman (2000, dikutip dari Herdiansyah 2012, hal.190) dalam bukunya mendefinisikan validitas, “*validity means truthful. It refers to the bridge between a construct and the data.*” Validitas diartikan juga sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang diperoleh dapat mewakili dimensi ukuran yang diaksudkan. Dalam penelitian kualitatif cara mengukur validitas data tidaklah sama dengan menggunakan metode ukuran kuantitatif atau penerapan reliabilitas dengan demikian untuk encapai ukuran dalam penelitian ini dengan cara mendasarkan ukuran dari subjektifitas logika peneliti terhadap sifat dan perilaku informan.

Demi memantapkan validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk melakukan uji keabsahan data. Sebagaimana menurut Bachrie (2010) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data lain. Dalam metode ini peneliti memilih penggunaan triangulasi sumber data, yang berarti membandingkan, mencetak ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan informasi yang diperoleh secara pribadi. Sehingga proses triangulasi data ini termasuk dalam proses *cross check* data.

#### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data dominan dalam studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap analisa domain yang meliputi:

- Pengumpulan bukti (data) dari beragam sumber
- Pengujian data; termasuk didalamnya pencocokan dengan proposisi awal sebelum penelitian. Hipotesa atau proposisi awal penelitian ini adalah *Adanya transformasi kehidupan sosial Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan KM 02 Lati ke arah pemiskinan akibat program Resettlement oleh PT. Berau Coal yang memberikan pengaruh terhadap pola hidup mereka. Program ini yang sengaja dimaksudkan untuk upaya pembangunan dan relokasi warga ke ruang hidupan kondisi demografis yang lebih modern.*

- Pengkategorian dan pengelompokan data sesuai dengan jenis data. Pembagian perolehan data dibagi menjadi kategori usia; tua, muda dengan rentang usia antara 20-75 tahun. Serta kategori jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.
- Pentabulasian atau pengkombinasian kembali data-data untuk menunjuk pada proposisi atau teori awal saat penelitian. Tahap ini juga memungkinkan terbukanya kemungkinan penggunaan data kuantitatif yang diperoleh sebagai data penguat dalam variabel penelitian. Sedangkan pada tahap ini kategori tabulasi data dibagi atas dasar status sosial, ekonomi, pendidikan, atau segala aspek yang terkait dengan sosio kultural.
- Pemberian interpretasi dan penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap verifikasi data, diantaranya termasuk analisa data dengan landasan teoris yang dipakai.

#### 1.6.6.1 Pembuatan Eksplanasi

Menjelaskan suatu fenomena berarti menetapkan serangkaian keterkaitan timbal-balik mengenai fenomena tersebut. Kaitan timbal-balik ini sama dengan variabel-variabel independen dalam penggunaan eksplanasi tandingan yang telah dijelaskan sebelumnya (Yin, 2014: 147). Pembuatan bentuk eksplanasi ini diterapkan dalam bentuk narasi. Deskripsi meluas dan menyeluruh mengenai gambaran studi kasus yang dihadapi dalam penelitian

namun tetap mampu mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoritis. Pembuatan narasi eksplanatoris memperhatikan langkah berulang berikut ini:

- Membuat suatu pernyataan teoritis awal atau proposisi awal mengenai gejala sosial yang ditangkap dalam isu dan topik penelitian. Proposisi awal penelitian ini.
- Membandingkan temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan atau proposisi awal tersebut
- Jika telah dilakukan perbandingan dan penjabaran pola, maka langkah selanjutnya adalah memperbaiki pernyataan atau proposisi
- Membandingkan rincian-rincian kasus lainnya dalam rangka perbaikan tersebut
- Memperbaiki lagi pernyataan atau temuan kedua setelah membandingkan dengan kasus lain (perbandingan dapat diperoleh melalui kajian literatur)
- Membandingkan perbaikan tersebut dengan fakta-fakta dari kasus-kasus lainnya, demikian dilakukan berulang hingga kebutuhan terpenuhi

#### 1.6.6.2 Analisa Deret Waktu

Analisis data selanjutnya menggunakan metode analisis deret waktu, dimana peneliti mengedepankan teknik analisis deret waktu kronologis. Langkah analisis ini dilakukan dengan melakukan desain waktu dengan menyetengahkannya pada fokus

kasus penelitian yang diajukan sebelumnya, sehingga peneliti memungkinkan dapat melacak lebih dari waktu satu peristiwa

Analisa ini dilakukan tanpa mengabaikan pembentangan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai urutan pokok dari hubungan kausal sebab dan akibat dengan mengutamakan dasar kronologi, seperti beberapa peristiwa hanya bisa mengikuti peristiwa lain setelah ada lintasan waktu yang diprediksi. Analisis deret waktu kronologis ini dirasa tepat untuk mengurai variabel penelitian dalam peristiwa aktual yang memiliki urutan terprediksi. Adapun data kronologis temuan penelitian, yakni:

**Tahun 1995** : PT. Berau Coal dinyatakan telah mendapat Kuasa Pertambangan Eksploitasi di kawasan Lati seluas 7 ribuan hektar dengan masa berlaku 30 tahun

**Tahun 2000**: CSR PT. Berau Coal dijalankan melalui Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal (YDBBC) mulai melaksanakan program *Community Development*

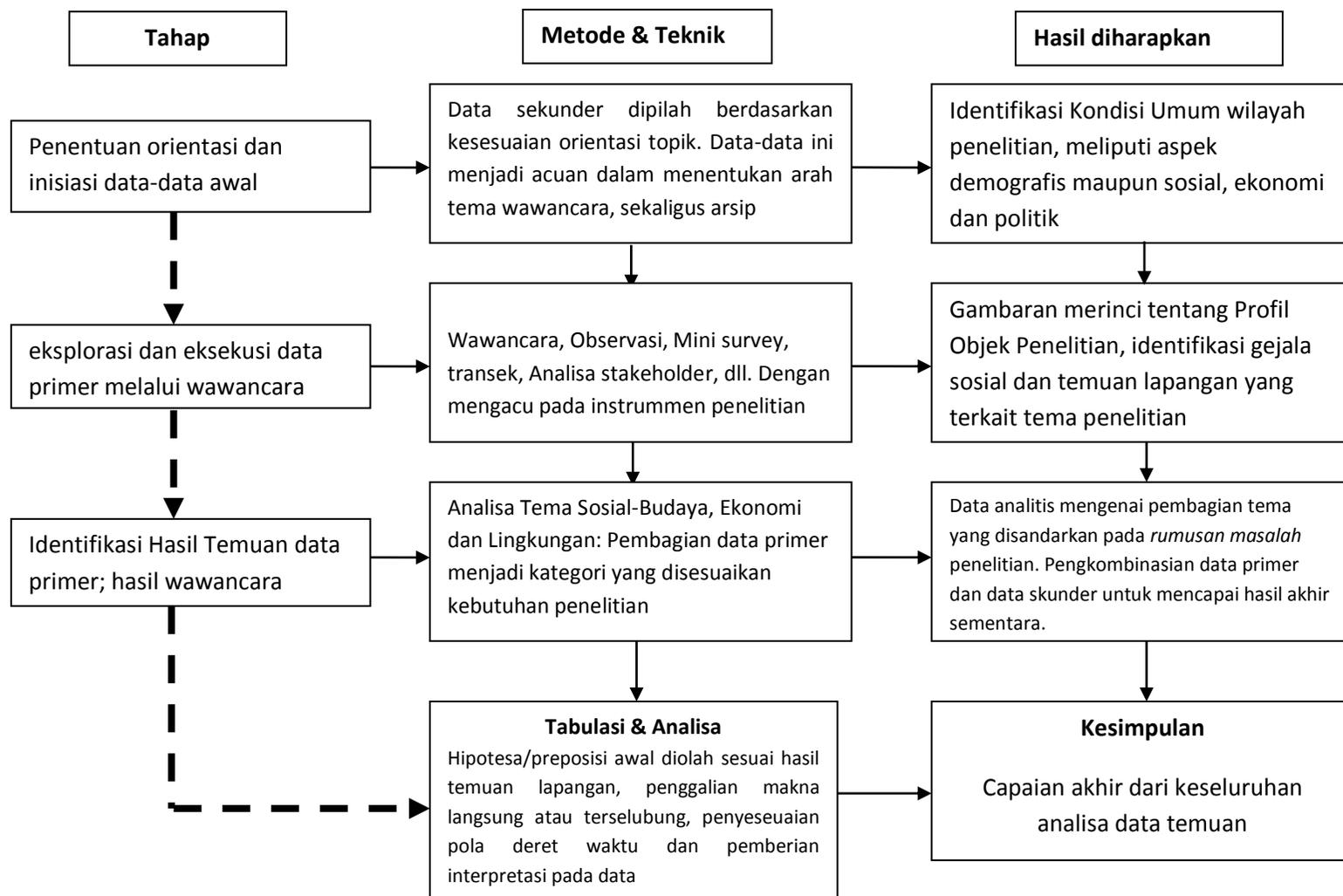
**Tahun 2001**: Relokasi Warga KAT ke Kilometer 10 Lati

**Tahun 2012** : Proses *Resettlement* ke Kilometer 02 Lati

**Tahun 2013** : Diresmikan sebagai pemukiman tetap bagi Warga KAT Dayak Punan Basap

**Tahun 2014-Sekarang** : Warga KAT Dayak Punan Basap masih bermukim

Tabel 1.2 Matriks Alur Logika Penelitian (sumber: olah data peneliti)



## **BAB II**

### **LOKASI PENELITIAN**

Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu lokasi di Indonesia dengan banyak ditemukannya praktek pertambangan mineral dan migas sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian yang tepat untuk menyingkap kisah relokasi yang sering dialami oleh sebagian besar suku asli di beberapa wilayah akibat munculnya industri pertambangan. Kabupaten Berau adalah lokasi yang ditetapkan menjadi representasi topik penelitian dimana perusahaan tambang batu bara PT. Berau Coal berada. Memusatkan perhatian pada objek penelitian di kawasan pemukiman yang menjadi implementasi Program *Resettlement* yang di kembangkan oleh PT. Berau Coal dan beberapa pihak terkait termasuk pemerintah daerah yaitu; areal Kilometer 02 Lati yang dihuni oleh warga Dayak Punan Basap sejak tahun 2012.

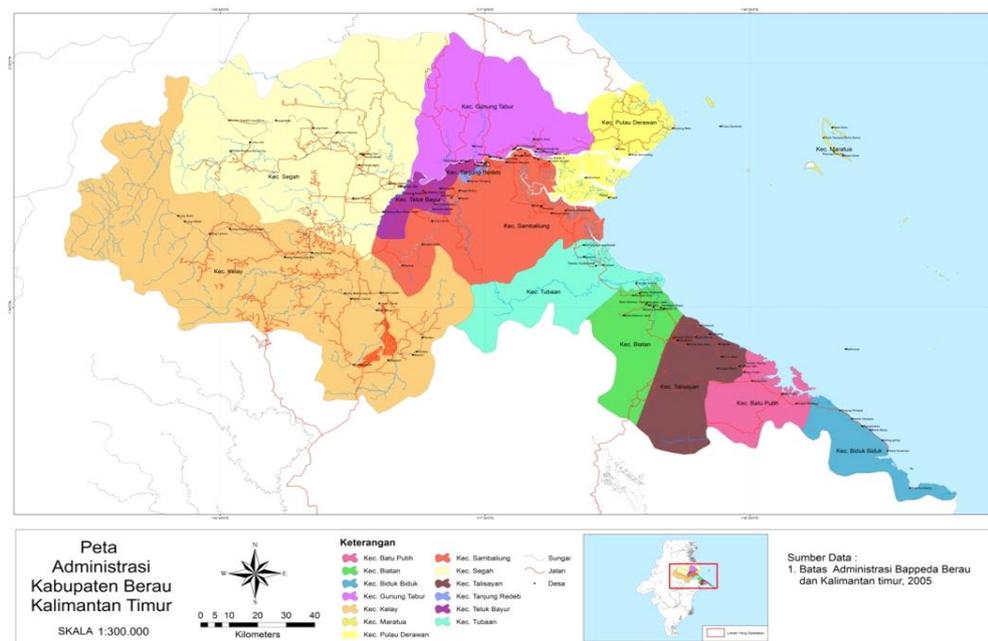
#### **2.1 Selayang Pandang Kabupaten Berau**

Kabupaten Berau terbentuk pada sekitar abad 14 Masehi dengan cikal bakal Kerajaan Berau<sup>6</sup> dalam kepemimpinan Raja pertama Baddit Dipattung bergelar Aji Raden Surya Natakesuma. Selanjutnya muncul Kabupaten Dati II Berau seiring dengan terbitnya peraturan UU Nomor 27 Tahun 195 dengan ibukota Tanjung Redeb dan Bupati Pertama Sultan Aji

---

<sup>6</sup>Data dari *Lanug Pahatan* (Profil Kabupaten Berau tahun 2014), Sumber: Data Protokol Kabupaten Berau, Bagian Pelayanan dan Bina Media

Raden Muhammad Ayu (1960-1964) Pada peinggalan sejarah Berau memiliki dua kerajaan yang menjadi bukti sejarah keberadaan Suku asli, Suku Berau. Kesultanan Gunung tabur adalah kerajaan hasil dari pecahan Kesultanan Berau, dimana Berau dipecah menjadi Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur pada tahun 1810. Sehingga Peringatan hari jadi Berau di akui pada 15 Setember 1810.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Berau dalam skala 1:300.000 (sumber Bappeda Berau dan Kalimantan Timur 2005)

Secara geografis, Kabupaten Berau berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan di sebelah utara, Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, Kabupaten kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat dan selat Makassar di sebelah Timur. Daratan Kabupaten Berau terdiri dari gugusan bukit yang sebagian besar tidak berpenghuni, sehingga Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya

alam, seperti batubara dan kayu. Daerah ini juga mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan menjadi sarana angkutan air utama di bidang perindustrian di samping angkutan darat.

Luas Kabupaten Berau adalah 34.127,17 km<sup>2</sup> terletak antara 116° Bujur Timur sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Berau merupakan kabupaten terluas kelima setelah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administratif Kabupaten Berau dibagi menjadi 13 (tiga belas) kecamatan dan 110 Kampung/kelurahan. Ibu kota Kabupaten terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Berau beriklim tropis dan melalui dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data statistik tahun 2013, suhu di Berau berkisar antara 20,8 °C pada bulan Juni sampai 35,6 °C pada bulan September (Sumber: Berau Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Berau)

Data statistik tahun 2013 menunjukkan penduduk Kabupaten Berau sebagian besar (84,65 persen) beragama Islam, 9,57 persen Kristen Protestan, 5,36 persen Kristen Katolik, 0,32 persen Budha, 0,09 persen Hindu, 0,003 persen Konghuchu, serta 0,002 persen lainnya. Mayoritas penduduk Berau adalah pendatang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Keberagaman Suku di Berau sangat nampak terlihat di pasar-pasar lokal, orang-orang dari suku Jawa, Bugis, Makassar, Melayu, Banjar,

Madura, Bali dan sebagainya berbaur dalam kerukunan. Konflik etnis dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di Sampit Kalimantan Barat tidak pernah terjadi. Masyarakat asli Berau, yakni Suku Berau dan orang Dayak, hidup berdampingan sejak lama.

Kecamatan yang memiliki daerah luas panen dan produksi padi (sawah dan ladang) terbesar adalah Kecamatan Gunung Tabur. Luas panen padi di kecamatan ini mencapai 4.862 ha. Kampung Sambakungan termasuk salah satu wilayah produksi perkebunan yang menyumbang komoditi Merica (lada). Jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Berau antara lain: coklat, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit, nilam, pala, dan kemiri.

Jumlah hutan Hutan Produksi di Kabupaten Berau sebanyak 17 perusahaan dengan luas 974.056 ha konsesi hutan, sementara Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 2013 tercatat 268.815 ha dikelola oleh 5 perusahaan. Perkembangan produksi batu bara sejak tahun 2008 terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2013 produksi batubara telah mencapai 31.312.962,57 ton, atau meningkat 14,91 persen dibanding tahun 2012. Produksi PT. Berau Coal merupakan yang terbesar berdasarkan data Dinas Pertambangan Kabupaten Berau tahun 2013 yakni 23,000,000 ton.

## 2.2 Sambakungan

### 2.3.2 Sejarah terbentuknya Kampung Sambakungan

Menurut informasi dari beberapa tokoh masyarakat setempat awal mula dinamakan Sambakungan karena keberadaan (tanaman) Rumpun Bakung yang berabanyak terdapat di ujung Kampung Sambakungan.. Rumpun bakung tersebut sangat berbahaya, karena apabila terkena kulit maka akan mengakibatkan gatal-gatal. Dalam bahasa barrau (Berau) kata “Samba“ mempunyai arti gatal, sehingga oleh para pendahulu kampung menggabungkan antara kata “samba dan “ bakung “ ditambah dengan akhiran “an” tersebut menjadi “ Sambakungan “ . Maka dinamakanlah tempat pemukimannya sebagai Kampung Sambakungan. Sampai Sekarang tanaman Rumpun Bakung masih terdapat diujung kampung dan telah menjadi lokasi tempat pekuburan Muslim.



Gambar 2.2 Kampung Sambakungan (sumber: Dokumentasii Pribadi)

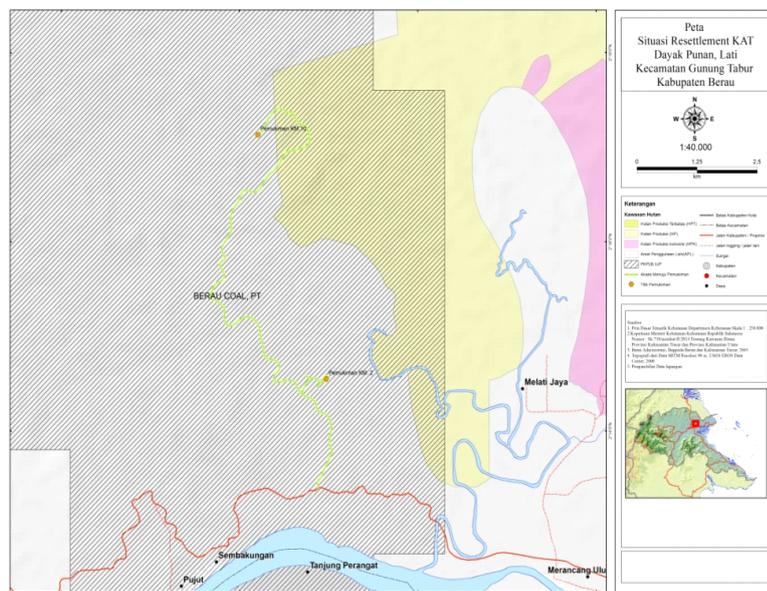
Kampung Sambakungan mulai ramai dimukimi pada tahun 1949 oleh sebuah keluarga pindahan dari Kampung Tanjung Perangat dan Kampung Sukan yang berawal dengan membuka lahan untuk pertanian. Awalnya Kampung Sambakungan telah lama tidak berpenghuni lagi. Setelah beberapa lama kemudian, dilanjutkan oleh pindahan Kepala Kampung Sungai Sata ke Sambakungan yang lama kelamaan disusul oleh penduduk Sungai Sata keseluruhan ke Kampung Sambakungan. Selain itu konon kata Pada masa itu ada isu Penculikan orang dari atas helikopter dengan menggunakan jaring hal tersebut pula yang mengakibatkan semua keluarga yang bermukim di Sungai Sata pindah secara keseluruhan ke Kampung Sambakungan. Lama kelamaan setelah warga bertambah maka pada masa itu dibentuklah pemerintahan Kampung Sambakungan dengan melaksanakan pemilihan kepala Kampung Pertama kali, pada masa itu Bapak Adjie Anum terpilih sebagai kepala kampung Sambakungan yang pertama yang menjabat dari tahun 1945 s/d 1955.

Setelah pergantian pemimpin beberapa kali, kemudian pada tahun 2007 diadakan kembali pemilihan kepala Kampung Sambakungan pada saat itu terpilih Bapak Suriansyah, S.H. sebagai Kepala Kampung Sambakungan yang baru hingga saat ini beliau masih dalam masa aktif jabatannya. Seiring dengan berjalannya waktu saat Kampung Sambakungan telah semakin ramai di datangi oleh penduduk pindahan dari Kampung lainnya yang datang untuk mencari pekerjaan. Akibat

berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang beroperasi sebagai sub kontraktor dari PT. Berau Coal yang merupakan induk perusahaan Tambang Batu Bara yang terbesar dan terlama beroperasi di Berau.

### **2.3.2 Monografi Kampung Sambakungan**

Kampung Sambakungan masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Gunung Tabur. Kecamatan dengan luas 1.987,49 Km<sup>2</sup> ini merupakan salah satu kecamatan yang dilalui sungai terbesar yakni Sungai Lati yang terbentang sejauh 43Km. Sekitar pinggir sungai inilah area yang sering didiami orang-orang Dayak yang hidup nomaden. Batas administratif Kecamatan Gunung Tabur sebelah utara adalah Kabupaten Bulungan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Sambaliung. Sebelah Barat dengan Kecamatan Segah dan pada sisi Timur berbatasan dengan Pulau Derawan. Mayoritas penduduk Gunung Tabur berjumlah 3.940 Jiwa yang terdiri dari 14 RT. Saat ini bapak Nazaruddin, SE adalah camat yang tegah menjabat sejak Periode 2013-sekarang. Mayoritas warganya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta mengingat area Kecamatan ini dihuni oleh sebagian besar wilayah konsesi tambang.



Gambar 2.3 Peta Situasi letak Kampung Sambakungan dan KAT KM 02 Lati (sumber: data telah di olah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, 2015)

Kampung Sambakungan memiliki 6 Rukun Tetangga ( RT ) Yakni RT I, RT II, RT III, RT IV, RT V, RT VI dengan batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Selatan : Kampung Tanjung Perangat
- Sebelah Barat : Kampung Samburakat
- Sebelah Timur : Kelurahan Merancang Ulu

Daerah administratif RT VI yang kemudian lebih dikenal sebagai KM 02 Lati terletak sekitar 10 Kilometer dari pusat Kampung Sambakungan.

Pusat Pemerintahan Kampung Sambakungan terletak 30,0 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunung Tabur, dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Berau 40,0 Km. Waktu tempuh ke ibukota kecamatan adalah 1 jam dan waktu tempuh ke fasilitas terdekat

(ekonomi, kesehatan, pemerintahan ) adalah 15 menit. Untuk masuk ke Kampung Sambakungan dapat melalui 2 jalur yaitu jalur sungai dan jalur darat. Dimana jalur transportasi keduanya sangat bagus untuk di lalui kendaraan. Kampung Sambakungan ini di aliri oleh 1 sungai, yaitu Sungai Lati. Jembatan yang ada di Kampung Sambakungan ada 1, dengan kondisi jembatan tersebut terbuat dari beton.

Dari hasil pendataan penduduk Kampung Sambakungan tahun 2010, Total keseluruhan penduduk jiwa dengan jumlah laki-laki 875 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 537 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 472 kepala keluarga. Sebagian besar warga yang terdapat di Kampung Sambakungan merupakan suku Berau dan sebagian kecil warga merupakan suku pendatang. Mayoritas Penduduknya beragama Islam. Dari total 1412 Jiwa warga Kampung Sambakungan, warga Komunitas Adat Terpencil Kilometr 2 Lati tercatat sebanyak 87 orang sebagai RT VI.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kampung Sambakungan sangat beragam. Mayoritas besar penduduknya merupakan lulusan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan total 277 Jiwa. Sementara masih ada 71 Jiwa yang tercatat sebagai penduduk buta huruf dari total keseluruhan warga KAT Dayak Punan Basap.

Mata Pencaharian warga masyarakat Sambakungan saat ini di dominasi dalam pekerjaan di sektor pertambangan yakni sebagai karyawan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kampung

Sambakungan. Sehingga Sektor Pertanian yang dahulunya merupakan sumber mata pencaharian utama tidak dilakukan lagi, pertanian dan perkebunan menjadi pekerjaan sekunder bagi masyarakat.

Umumnya penduduk Kampung Sambakungan secara umum bekerja sebagai petani, pekerja swasta/buruh, pegawai negeri sipil, wiraswasta/pedagang, karyawan, Nelayan, peternak, montir, POLRI, pertukangan dan lain-lain. Tercatat sebanyak 872 jiwa yang masih tergolong aktif dalam mata pencaharian. Kebanyakan diantaranya warga Sambakungan bekerja sebagai karyawan swasta di Perusahaan-perusahaan sekitar atau yang berada di Kampung Sambakungan, seperti PT. Berau Coal. Beberapa warga Kilometer 02 Lati Saat ini mulai bekerja dalam sektor buruh tani, mengingat ada sekitar 12 Hektar lahan perkebunan Merica yang aktif ditanami oleh warga Sambakungan lain. Meraka biasanya hanya menjadi buruh tani dalam panen Merica, seperti yang diungkapkan Bu SD " *kalau musim panen Sahang (Merica) saya bantu orang Sambakungan di atas (area Kilometer 3 dan seterusnya sampai Kilometer 8). Itu aja pemasukan kami buat makan..*"

Penduduk Kampung Sambakungan memiliki beraneka ragam suku, karena Kampung ini merupakan Kampung Penduduk Tetap. Tetapi Sebagian Besar masyarakat ada juga yang berpenduduk pendatang. Mmayoritas merupakan penduduk asli Berau sebanyak 856 Jiwa.

Penduduk Kampung Sambakungan secara umum dapat dikatakan sebagian besar penganut agama Islam berdasarkan 1290 jiwa yang

tercatat dalam data statistik Kampung Sambakungan, namun demikian jumlah terbesar jkedua yakni pemeluk Agama Kristenn sbanyak 122 Jiwa. Seluruh warga KM 02 Lati merupakan penganut Kristen, hanya ada empat Keluarga yang menganut agama Islam. Identitas keagamaan Islam ini didapat melalui ikatan perkawinan "*saya islam karena suami Islam, suami orang bugis*" ungkap SY.



Gambar 2.4 Jalan Raya yang Menghubungkan Kampung Sambakungan dengan Kampung-Kampung Lainnya, termasuk ke Pusat Kota Kabupaten (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Telah tersedia jalan Aspal yang menghubungkan kampung satu dengan kampung yang lainnya sekaligus serta menghubungkan Kampung Sambakungan dengan kecamatan dan kabupaten. Selain itu juga terdapat jembatan-jembatan yang berjumlah 2 buah. Ada dua (2) jenis transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat dan transportasi sungai/laut. Untuk sarana transportasi darat masyarakat menggunakan sepeda motor, mobil.

Kampung Sambakungan memiliki sarana 1 unit kantor kampung atau Kepala Desa, 1 unit balai desa untuk pertemuan dengan warga dan

aparat kampung, 1 unit Posyandu, 1 unit TK, 1 unit SDN, 1 unit Puskesmas Pembantu, 1 unit Puskesmas dan 1 unit Koperasi. Selain itu juga terdapat fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan perkantoran yaitu, mesin ketik 1 buah, 3 komputer buah, 9 meja kerja buah, 30 kursi kerja buah, 1 almari arsip buah, almari data 3 buah. Satu unit Masjid sebagai sarana peribadahan orang islam. Sedangkan sarana kesehatan berupa 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit posyandu, 1 polindes, 1 orang mantri dan 1 orang bidan.

Untuk keperluan sehari-harinya seperti MCK (Mandi, cuci, kakus) penduduk Kampung Sambakungan menggunakan air WTP sebagai air bersih. Namun sarana ini belum terlalu maksimal karena belum ada mesin pendorong sehingga sebagian masyarakat belum mendapatkan air tersebut karena hanya menggunakan sistem gravitasi dimana pusat WTP berada di dataran yang lebih tinggi.

Sarana penerangan di kampung berasal dari listrik PLN. Semua masyarakat menggunakan jasa PLN, hal ini dikarenakan mesin PLN sudah memenuhi kapasitas yang ada di Kabupaten Berau. Oleh karena itu masyarakat memakai sarana penerangan dari PLN dan terkadang jika lampu PLN padam warga masyarakat menggunakan jenset, lilin dan lampu minyak. Sedangkan penerangan lampu jalanan masih kurang sekali. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang masuk wilayah Lati juga beroperasi penuh memberikan bantuan tenaga Listrik ke Kampung

Sembakungan. Jalan Masuk ke PLTU inilah yang berhadapan dengan jalan masuk ke pemukiman *Resettlement* KM 02 Lati.

## 2.3 Kilometer 02 Lati

### 2.3.1 Lokasi *Resettlement*

Wilayah pemukiman yang dibangun sebagai area relokasi dari Program *Resettlement* PT. Berau Coal ini secara administratif tercatat sebagai RT VI Kampung Sembakungan. Berbatasan dengan Kampung Maluang di sebelah Barat, Kampung Melati Jaya di sebelah Timur, sebelah Utara dibatasi dengan area Konsesi PT. Tanjung Redeb Hutani dan terletak pada sebelah Selatan Kampung Sembakungan.



Gambar 2. 5 Pemukiman *Resettlement* Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan di Kilometer 02 Lati (sumber: Dokumentasi pribadi)

Pemukiman Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan adalah suatu pemukiman hasil Program *Resettlement* yang dibangun oleh

kerjasama beberapa pihak, diantaranya perusahaan batu bara dan perhutani. Dimana lahan yang menjadi daerah hunian warga KAT ini merupakan lahan konsesi pertambangan milik PT. Berau Coal, dan masuk dalam wilayah enclave PT. Tanjung Redeb Hutani. Berdasarkan data laporan Departent Comunity PT Berau Coal tahun 2012 Luas lahan enclave untuk pemukiman KAT Dayak Punan KM 02 Lati adalah 20 Hektar, dimana 0,5 Hektar adalah areal pemukiman sedangkan sisanya untuk lahan usaha (pertanian, perkebunan, peternakan).

Sementara terkait penyebutan istilah *KM 02 Lati* didasarkan atas kondisi geografis wilayah pemukiman KAT yang terletak di wilayah Lati; daerah yang dilalui Sungai Lati. Jarak dengan jalan aspal perkampungan terdekat berjarak  $\pm 02$  km, karena kondisi ini sehingga kebiasaan warga perkampungan, para pekerja perusahaan di wilayah sekitar dan warga Berau terbisa menyebutnya “KM 02 Lati.”

Jalan masuk ke pemukiman masih berupa jalan tanah, yang mana merupakan jalan bekas jalur lalu lintas *Logging*. Akses terdekat yang bisa ditempuh untuk mencapai pemukiman ini dengan menggunakan transportasi darat dari dari Kampung Sambakungan dengan waktu tempuh 30 menit. Sedangkan melalui akses darat jalan raya dari pusat kota Tanjung Redeb yakni sekitar 2 - 2,5 jam perjalanan darat. Curah hujan sangat mempengaruhi waktu tempuh kendaraan

untuk masuk ke KM 02 Lati, karena kontur jalan tanah akan berlumpur ketika Hujan mendera.



Gambar 2.6 Kondisi jalan masuk ke Pemukiman Resettlement KM 02 Lati (kanan), dan jalan (kiri) arah ke wilayah KM 10 bekas daerah relokasi sebelumnya. (sumber: Dokumentasi Pribadi)

### 2.3.2 Warga Pemukiman *Resettlement*

Pemukiman *Resettlement* KAT Dayak Punan KM 02 Lati saat ini dihuni sebanyak oleh 75 Jiwa dan terbagi menjadi 21 unit keluarga. Hanya enam keluarga yang memeluk agama Islam, sisanya menjadi mayoritas penganut agama Kristen. Satu unit gereja yang di bangun oleh pemerintah sebagai sarana peribadatan warga nasrani di pimpin oleh Pendeta Abraham, beliau telah menyertai mereka sejak tahun 2005 warga dayak punan masih tinggal di KM 10 Lati.

Menurut ahli sekaligus pemerhati budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau, Bapak Sapprudin Ithur ada lima jenis Suku Dayak yang bisa dikelompokkan di Kabupaten Berau yakni: Dayak Gaai, Dayak Kenyah, Dayak Punan, Dayak Ahi dan Dayak Asi'i. Perbedaan dayak tersebut berdasarkan ciri biologis dan asal tempat tinggalnya. Tambahan kata 'Basap' pada Suku Dayak Punan Basap diberikan karena makna kata dalam bahasa setempat bisa berarti *udik, berbeda, unik, kecl, hitam*.



Gambar 2.7 (Dari Kiri ke Kanan ) orang Dayak Gaai, dan salah satu orang Dayak Punan Basap di KAT KM 02 Lati (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Perbedaan nama ini pun menyesuaikan pula teradap perbedaan ciri fisik mereka, misal pada keturunan Dayak Punan Basap memiliki ciri fisik kulit yang cenderung gelap atau hitam, berbadan kecil dengan rata-rata tinggi badan antara 1,50 – 1,68 meter, dan mata yang tidak terlalu sipit. Apabila dibandingkan dengan keturunan orang Dayak Gaai yang kebanyakan bermukim di wilayah Barat Kabupaten Berau seperti, kampung Long Lanuk. Orang dayak Gaai

dengan kecenderungan kulit yang lebih cerah atau putih, bermata sipit, rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi.

*“Kami orang dayak juga tapi beda sama kenyah, kami gak makan anjing, kami gak makan hewan yang sudah kita rawat, beda sam orang kenyah, itu bedanya juga sama orang Gaaai kita agak hitam”, (Wawancara dengan Sa, Mei 2015)*

Orang-orang yang bermukim di KAT termasuk dalam golongan suku dayak Punan. Dayak Punan adalah salah satu jenis Suku Dayak yang bermukim di Kabupaten Berau. Orang Dayak Punan yang ditemukan Lati, diperkirakan sampai ke Berau pada sekitar tahun 1970-an. Awalnya mereka menetap di kabupaten Bulungan kemudian melakukan pengembaraan hingga sampai di Kabupaten Berau. Saat menetap Kabupaten Berau lantas mereka menyebar di beberapa wilayah, antara lain di hutan-hutan tepian sungai Birang, sungai Sambarata, Sungai Bengawan, termasuk Sungai Lati, dan anak sungai lainnya.

Sekitar tahun 1984 Orang Dayak Punan Basap dibangun rumah oleh Dinas Sosial di Petung dengan kondisi mereka yang masih dianggap “bersahaja” dan dianggap menyandang masalah sosial, maka pada tahun 1984 pemerintah Berau melalui Departemen sosial (pada saat itu belum Dinas sosial) melakukan program *Resettlement*/pemukiman menetap kepada komunitas ini. Jumlah KK yang di*Resettlement* sebanyak 24 KK dan lokasinya berada di Petung, Kampung Merancang Ulu masih dalam kecamatan Gunung Tabur. Program *Resettlement* di

Petung ini sebenarnya tidak ditujukan khusus untuk komunitas Dayak Punan saja, tetapi juga warga dari suku lain. Bagi warga dari suku lain, program ini diistilahkan dan disosialisasikan dengan nama transmigrasi lokal<sup>7</sup>. Sejalan dengan inti program pemaysarakatan Departemen Sosial adalah memindahkan penduduk dan membentuk pemukiman baru, dirancang untuk mendatangkan sejumlah perbaikan secara spesifik (Li, 2012:149)

Program dipemukiman Petung ini mmenjalankan berbagai program pembinaan yang diterapkan dari pemerintah seperti komunitas dari suku lain, yaitu pemberian jatah hidup untuk waktu tertentu, program pertanian intensif, peternakan, dll. Program *Resettlement* ini ternyata tidak berjalan lama (belum 1 tahun) karena banyak warga Dayak Punan keluar dari pemukiman di Petung dan kembali lagi tinggal di hutan-hutan

Pemukim (petani) banyak yang kemudian berpencar kembali ke pegunungan, karena banyak penyakit yang mewabah seperti disentri, malaria dan TBC. Layaknya program Transmigrasi Departemen Sosial di daerah Sulawesi Tengah pada tahun 1924 tercatat bahwa warga yang berulang kali mengalami *displacement* rentan terserang wabah penyakit<sup>8</sup>. Demikian pula yang terjadi pada kasus pemukiman Petung, salah seorang warga Dayak Punan Kilometer 02 (Bapak SAD)

---

<sup>7</sup>Sumber Data Laporan Tahunan “Identifikasi Sosial Komunitas Adat Terpencil (Kat) Suku Dayak Punan Di Sungai Lati” oleh Departemen Community Development PT. Berau Coal Tahun 2010

<sup>8</sup>Lihat Tania Murray Li (2012), *The Will To Improve*, hal.139-140.

mengungkapkan jika perpindahan mereka diakibatkan oleh penyakit dan ketimpangan pelaksanaan program pemerataan pembagian jatah sembako, “*sering sakit kami disana (Petung), sampai ada yang mati.*” Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Bapak JEN seorang petugas Dinas Sosial Kabupaten Berau bidang Pemberdayaan Masyarakat Terasing yang mengatakan bahwa “*warga dulu di Petung banyak yang masuk lagi ke dalam Hutan karena ada Wabah Malaria lama. Selain sulit juga adaptasi sama kelompok lain, ‘kan gak cuma Dayak aja disana, ada juga warga program transmigrasi lain.*”Eksodus banyak warga Punan ini diikuti oleh warga yang lain, sehingga akhirnya tak satupun diantara mereka bertahan tinggal di Petung. Beberapa kemungkinan penyebab kepindahan mereka yakni:

- Ada anggapan dan kecurigaan dari warga Dayak Punan bahwa program bantuan dan jatah hidup dari pemerintah tidak merata dibagi oleh para pengelolanya.
- Adanya wabah penyakit sejenis penyakit cacar yang oleh masyarakat setempat disebut penyakit “kerumut”, yang banyak menelan korban jiwa, terutama anak-anak.
- Sering terjadi perselisihan antara warga Dayak Punan dengan suku lain yang tinggal di pemukiman petung karena perbedaan kebiasaan.
- Rumah di Petung agak jauh dari sungai, tidak seperti rumah/pondok mereka sebelumnya yang dibuat ditepian sungai.

- Lokasi di Petung yang jauh dari sumber nafkah mereka, yaitu sarang lebah madu, sumber kayu gaharu, ladang di hutan, serta lokasi berburu dan memancing.

Ketika kembali ke hutan, mereka kembali lagi kepada kebiasaan dan pola hidup sebelumnya, yaitu tinggal berpindah-pindah sesuai potensi hutan setempat, membuat rumah/pondok apa adanya, berburu binatang hutan, memancing, mencari madu, dan lain-lain.

### 2.3.3 Adat dan Kebiasaan Orang Dayak Punan Bassap Kilometer 02 Lati



Gambar 2.8 Dua orang warga Dayak Punan Bassap KM 02 Lati selepas pulang dari perburuan (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Secara historis hutan disepanjang sungai Lati sampai ke kabupaten Bulungan dikenalsebagai daerah jelajah suku Dayak Punan yang saat ini ada di pemukiman ataupun di tempat lain. Dahulunya,

mereka berburu, mencari buah sambil berladang<sup>9</sup> atau berkebun dan membuat pondok lalu pindah ketika hewan buruan atau persediaan buah diwilayah tersebut sudah semakin sedikit. Atau memungkinkan mereka kembali ke tempat semula.

Mata Pencaharian Warga Dayak Punan Basap KAT KM 02 lebih dikenal dengan keterampilan dan keahlian mereka dalam hal berburu, mencari gaharu dan memanen madu hutan. Istilah “Punan” lebih umum dipandang sebagai sebutan untuk kelompok masyarakat pemburu-peramu yang dulu hidup secara berpindah-pindah di hutan Kalimantan Timur lalu Dayak menjadi sebutan untuk masyarakat petani ladang. Kelompok Suku Punan hingga sekarang banyak tinggal di bagian hulu sungai bahkan di tengah hutan yang sangat terpencil. Pada masa lalu, pemerintah telah melabelkan mereka sebagai suku terasing yang hidup berpindah-pindah di dalam hutan dan tidak punya tempat tinggal menetap, sama halnya dengan beberapa suku lain seperti suku Kubu di Sumatera. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan dan arus modernisasi telah terjadi dinamika sosial budaya suku Punan (Dounias dkk. 2004; Levang dkk. 2004).

Program pemukiman suku terasing dari departemen sosial dimulai sejak tahun 1970-an, yang memukimkan sebagian kecil orang Punan di

---

<sup>9</sup>Berbeda dengan dayak kenyah (Lebar, 1972 dalam Maunati, 2006: 90) yang melakukan praktek berladang dengan siste menanam padi sebagai tanaman pokok. Dayak Punan KM 02 Lati tidak menanam padi elainkan hanya menanam tanaman-tanaman buah jangka pendek seperti pepaya atau umbi—umbian, seperti talas yang daun dan batangnya bisa dimanaatkan untuk sayuran (dokumentasi wawancara).

sekitar kota (Sellato 2001; Kaskija 2002), setidaknya menjadi pelajaran berharga. Mereka yang dulu hidup berpindah-pindah di tengah hutan sebagai pengumpul dan peramu, sejak akhir abad XIX mulai bermukim di dusun-dusun kecil, dan awal abad XX mulai melakukan perladangan sebagaimana suku Dayak di sekitarnya dengan budidaya tanaman pangan seperti padi dan ubi-ubian. Namun disamping berladang, aktifitas berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan hasil hutan masih tetap sebagai aktifitas utama dalam kehidupan sehari-hari<sup>10</sup>.

Suku Punan yang tinggal di sekitar hutan mempunyai ketergantungan hidup pada sumberdaya hutan, kayu dan bukan kayu sebagai sumber kehidupan, baik untuk kebutuhan subsisten seperti sumber makanan, obatobatan, tempat tinggal (bahan rumah), ritual budaya (Uluk dkk. 2001). Oleh karena itu, mengelola tanah, berladang atau berkebun secara intensif (bukan ladang berpindah) merupakan hal baru bagi Warga KAT Dayak Punan Basap yang baru dimulai pada tahun 2003 silam melalui program pemberdayaan oleh pemerintah maupun *Stakeholder* terkait (Data Laporan COMDEV tahun 2011). Berburu, memancing, mencari gaharu, memasang jerat merupakan pekerjaan yang dilakukan tiap hari.

Kebiasaan berburu ini tidak hanya dilakukan oleh para pria, wanita pun melakukan kebiasaan ini. Mayoritas warga berburu masih

---

<sup>10</sup>Lihat: Potret Punan Kalimantan Timur: Sensus Punan 2002-2003 (Levang, Dkk; 2004)

menggunakan sumpit dan anak sumpit beracun. Ada beberapa orang yang saat ini sudah menggunakan Sapan angin untuk berburu. Berburu tidak hanya untuk mencari hewan buruan seperti babi, kijang, kancil (pelanduk), monyet dan lainnya. Mereka juga biasa mmencari buah-buahan dan madu, yang kemudian akan dijual atau dala hal ini dibantu oleh Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal untuk memasarkannya. Selain berburu yang menurut sebagian besar warga saat ini mulai sulit mendapatkan hewan buruan, memancing menjadi pilihan yang mudah untuk meperoleh lauk.

Berburu menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan diwariskan, selain menjadi cara bertahan hidup dalam memperoleh makanan. Berburu merupakan cara orang Punan untuk menghabiskan waktu sebagai bentuk hiburan. Hasil buruan seperti daging babi biasanya dijual ke pelanggan tertentu yang mereka kenal di Kampung. Perolehan hewan hidup yang bisa dijadikan binatang peliharaan juga menjadi aset pemasukan bagi mereka. Kedekatan hubungan darah menyebabkan mereka memiliki toleransi tinggi dan saling membantu. Bahkan dalam membagi hasil perburuan. Saling berbagi yang sering dilakukan antara lain berupa bahan makanan, panen buah hutan dan hasil buruan. Kedekatan terlihat dala kegiatan berladang dan memanen madu yang dilakukan secara secara berkelompok.

Ikatan keluarga-keluarga kecil yang terbentuk atas hasil perkawinan antar kerabat dekat (*incest*). Dahulu jika dua orang saling menyukai akan dipertemukan dengan kedua orang tua dan oleh tetua/sesepuh kelompok yang bersangkutan kemudian dinyatakan sebagai suami istri. Namun sejak perkenalan mereka dengan Pendeta Abraham sejak tahun 2003 membawa ajaran agama Kristen, dan seiring pula dengan meningkatnya intensitas kontak dan komunikasi dengan suku lain, maka regulasi tata cara pernikahan mereka pun menyesuaikan. Termasuk pula pernikahan penganut agama Islam.

Tidak ada ritual khusus dalam perkawinan mereka, baik secara adat maupun keagamaan. Termasuk pula perayaan adat khusus untuk memperingati sesuatu hal. Kecuali perayaan Natal yang dirayakan dengan masak-memasak bersama semua anggota pemukiman serta perjamuan makan besar dan ibadah digereja.



Gambar 2.9 Pemberkatan Nikah pada Perayaan Natal tahun 2013 oleh Pendeta (sumber: data arsip COMDEV bidang Lingkungan Budaya, tahun 2013)

Mereka yang ada di pemukiman umumnya masih dalam satu ikatan keluarga besar namun terbagi menjadi 2 (dua) kelompok keluarga Luas, yaitu Keluarga luasPak KG dan Keluarga Luas Pak Kiwit. Akan tetapi keluarga Pak KG lebih dominan dalam mengambil alih upaya memimpin dan mengelola komunitas mereka. Sementara aturan tertulis ataupun verbal mengenai hukum dan sanksi adat tidak terjadi secara mencolok di Suku Dayak Punan Basap. Tidak ada aturan-aturan dan sanksi adat yang tegas. Hanya ada pengucilan dari kelompok apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya merugikan anggota kelompok lain. Sanksi berupa diberlakukan sesuai kesepakatan para tetua adat ketika ada seseorang baik dari dalam atau luar kelompok anggota Dayak Punan Basap yang merugikan mereka.

**BAB III**

**IMBAS KEBIJAKAN EKSPLORASI BAGI KOMUNITAS ADAT**

**TERPENCIL DAYAK PUNAN BASAP**

**3.1 Batubara: Kebijakan Eksplorasi dan Konsekuensinya**

**3.1.1 Tambang Batubara : Strategi Etika Sosial Budaya**

Laporan Dinas Pertambangan Kabupaten Berau yang mengungkapkan bahwa Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Berau memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, serta mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui usaha pertambangan mineral dan batubara. Perusahaan Batubara Berau Coal termasuk salah satu penyumbang terbesar dalam kontribusi kesejahteraan masyarakat Berau, sebagai bentuk kompensasi atas eksplorasi sumber daya mineral di Kabupaten Berau.

Berdasarkan Laporan tahun 2014 oleh badan Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Berau telah memberi 95 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang seiring dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebelumnya pada tahun 2002 Pemerintah Berau telah menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) yang kemudian di konversi menjadi IUP menyesuaikan UU Nomor 4 tahun 2009. Wilayah Izin Usaha

Pertambangan di Kabupaten Berau tersebar pada 9 (sembilan)

kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Pulau Derawan;
2. Kecamatan Gunung Tabur;
3. Kecamatan Segah;
4. Kecamatan Teluk Bayur;
5. Kecamatan Sambaliung;
6. Kecamatan Kelay;
7. Kecamatan Tabalar;
8. Kecamatan Biatan Lempake; dan
9. Kecamatan Biduk-biduk

Tabel 3.3 Jumlah Perizinan serta Luasan wilayah Peratmbangan di Berau (sumber: Data tahun 2014 Dinas Pertambangan Kabupaten Berau)

No	Jenis Perizinan	Jumlah Izin	Luas Wilayah (ha)
1	Izin Usaha Pertambangan	85	254.868,73
2	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)	1	114.800,00
	<b>Total</b>	86	405.425,73

Demikian halnya PT. Berau Coal merupakan salah satu perusahaan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan memiliki

3 area penambangan yakni di kawasan Lati, Binungan, dan Samarata.. Mulanya PT Berau Coal memulai usaha penambangan pada 26 April 1983, setelah memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kemudian pada tahun 1986 terjadi perubahan status PKP2B menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Hingga pada tahun 1995 PT. Berau Coal dinyatakan telah mendapat Kuasa Pertambangan Eksploitasi di kawasan Lati seluas 7 ribuan hektar dengan berlaku masa 30 tahun. Pada tahun 2014 luas area konsesi PT.Berau Coal mencapai 118,400 hektar<sup>11</sup>.

Sebagai salah satu Perusahaan batubara di Kabupaten Berau yang memiliki andil dalam sumbangan terbesar atas penghasilan asli daerah (PAD) Kabupaten Berau. Keberadaan Perusahaan tambang ini juga membuka peluang besar lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Melalui *Coorporate Social Responsibility*(CSR), upaya tindakan yang dilakukan guna meminimalisir dampak dan bencana hasil eksploitasi tambang maupun dampak lingkungan pasca penutupan tambang (*mine closure*) bagi masyarakat Berau. Kebijakan CSR menjadi pilihan realistis guna menghindari dampak sosial, seperti Konflik laten antara pelaku korporasi dengan masyarakat sekitar terkait pemanfaat

---

<sup>11</sup>Berdasarkan Data *Company Profile 2013 (Strategy For The Brighter Future)*PT. Berau Coal

lahan dan atau perolehan manfaat kesejahteraan (*benefit*) bagi penduduk lokal.

Program-program pemberdayaan di asumsikan menjadi solusi dari tanggung jawab sosial perusahaan tambang terhadap masyarakat lingkaran tambang. Sebagaimana PT. Berau Coal yang dijalankan melalui Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal (YDBBC) yang melaksanakan kewajiban sosialnya lewat program *Community Development* sejak tahun 2000. Kontribusi sosial ini mengarah pada pemberian bantuan bersifat ekonomis dan pelayanan publik. Pemberian bantuan berupa upaya peningkatan kesejahteraan warga Berau melalui aset pembangunan fasilitas dan pelayanan hidup. Termasuk di dalamnya yaitu pelaksanaan Program relokasi yang dilakukan untuk menggiring masyarakat Lokal yang masih ditemukan hidup dan bertempat tinggal dalam area konsesi pertambangan. Penggusuran tempat tinggal dimaksudkan untuk menghindari dampak-dampak secara langsung karena bahaya pencemaran lingkungan akibat operasi pertambangan. Salah satu Program Relokasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2013 adalah Program *Resettlement* PT. Berau Coal di KM 02 Lati.

Selain peran pelaku korporasi yang berperan utama karena kepemilikan praktek operasi pertambangan berada, praktek tanggung jawab sosial pun diatur oleh pihak-pihak berwenang lain. Seperti dalam kasus Program *Resettlement* Km 02 Lati ini, warga dayak Punan Basap

mulanya dinyatakan sebagai komunitas terpencil. Kemudian melalui pengawasan dan kontrol pengembangan oleh Dinas Sosial, berwenang dalam Program pendampingan awal sebagai komunitas yang secara formal dinyatakan sebagai Komunitas Adat Terpencil. Dampak keberadaan pertambangan di Berau cenderung dirasakan oleh masyarakat lokal yang masih mendiami wilayah-wilayah hutan. Penggusuran lahan tinggal dan tempat hidup inilah yang di alami oleh warga Dayak Punan KM 02 Lati.

### **3.1.2 Dibalik Lati Mine Operation<sup>12</sup> (LMO)**

Tambang Lati mulai berproduksi sejak 1995 dengan batubara tipe Agathis dan Sungkai. Tambang ini memiliki kapasitas produksi sebesar 15 juta MT/tahun, dengan cadangan sebesar 188 juta MT. Karakter endapan batubara Lati bersifat sinklin, berproduksi sejak 1995 dengan batubara tipe Agathis dan Sungkai. Tambang ini memiliki kapasitas produksi sebesar 15 juta MT/tahun, dengan cadangan sebesar 188 juta MT. Karakter endapan batubara Lati. Operasi pertambangan di areal Lati merupakan yang pertama sebelum eksplorasi tambang di areal Sambarata dan Binungan yang terjadi beberapa tahun berikutnya<sup>13</sup>.

Sejak beroperasinya praktek pertambangan di Lati, muncul banyak keluhan dilematis, karena bergesernya lahan tempat tinggal dan

---

<sup>12</sup>Nama salah satu area eksplorasi PT Berau Coal, biasa di singkat LMO

<sup>13</sup>Berdasarkan Data *Company Profile 2013* (Strategy For The Brighter Future) PT. Berau Coal

mencari nafkah namun ada janji-janji yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa “kehidupan yang lebih layak”; pembangunan sarana dan prasarana tinggal, bantuan pasokan pangan bahkan menyekolahkan putra putri mereka. Warga Kampung Sambakungan pun merasakan efek yang sangat signifikan, tidak hanya dalam peningkatan ekonomi namun meningkatnya isu-isu kontroversi terkait penggunaan lahan dan dampak lingkungan. Tuntutan-tuntutan terkait kewajiban sosial dalam membantu pembangunan dan pengembangan sumber daya sosial warga Kampung Sambakungan pun gaung beredar.

Demi mengamankan wilayah operasional Lati, pada Tahun 1999 melalui badan Department Support PT. Berau Coal yang di jalankan oleh Departemen Community Development (sebutan Yayasan Dharma Berau Coal pada masa itu), *Community Development Officer* (CDO) atau petugas Pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dibawah pimpinan Ir. Sudayat Kamamihardja (alm.), Bapak Ferdinand, Bapak Agung Triadi dan Alm Pak Dolof (asli pulau Buton tetapi menguasai dan kenal dengan hutan-hutan di Berau) mulai mencari orang-orang dayak punan ini di hutan dalam areal konsesi PT. Berau Coal. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, ada beberapa keluarga bersedia dirumahkan, bermula dari 7 keluarga lalu menjadi 11 keluarga, sekumpulan keluarga berasal dari satu hubungan kekekerabatan yang sama yakni suku Dayak Punan yang berasal dari wilayah Bulungan. Pencarian dan proses me’rumah’kan orang-orang Dayak Punan Basap

ini masih sebatas menjauhkan mereka dari wilayah radius bahaya operasi tambang.

Sedangkan anggapan orang-orang Dayak yang masih tinggal seperti orang Dayak Punan Basap adalah semakin menyempitnya lahan perburuan di hutan, berkurangnya ruang gerak dalam menajalani mata pencaharian mereka sebagai pemburu dan pencari buah-buah hutan. Kasus-kasus pengusiran akibat memasuki kawasan terlarang operasi tambang. Muncul isu-isu menakutkan orang-orang Dayak Punan Basap seperti kehilangan tempat tinggal, tidak bisa hidup dengan damai, sampai kematian akibat kekurangan makanan. Isu-isu dilematis ini kemudian diteruskan oleh PT. Berau Coal selaku operasional terbesar wilayah Lati kepada pihak perusahaan lain yang berdiri di kawasan Lati atau perkampungan Sambakungan, seperti PT. Tanjung Redeb Hutani serta PT Repindo Jaya Sawit Sejati.

Terikat dengan kesepakatan CSR yang disepakati oleh para pendiri perusahaan tersebut, keluhan dan pertimbangan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian diadakan musyawarah para pihak terkait untuk turut berperan dalam program pemberdayaan bagi warga Dayak Punan tersebut. Ide-ide program CSR dari pemberian kompensasi, bantuan sembako, bantuan biaya pendidikan pun di sampaikan. Kesepakatan pun mencapai hasil mengenai langkah awal program berkelanjutan, yakni pembangunan ulang rumah dan tempat

tinggal baru bagi orang-orang Dayak Punan Basap khususnya di pemukiman yang jauh dari areal operasi tambang atau kayu. .

Pada tahun 2000 hasil rekomendasi Bupati Berau saat itu, Drs. H. Masdjuni menyarankan atas pembebasan lahan enclave seluas 20 Ha untuk warga KAT milik PT. Tanjung Redeb Hutani disamping membantu penyediaan kayu untuk keperluan pembangunan unit rumah-rumah pemukiman. Saat itu warga KAT masih berada dikawasan relokasi KM 10 Lati. Sementara PT. Berau Coal di minta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas membangun pemukiman dan sarana prasarananya, serta melakukan pendampingan berkelanjutan (*sustainable Comunity Development* program) bagi warga Dayak Punan di areal tersebut. Bantuan lain yang di minta oleh pemerintah adalah PT. Repindo Jaya Sawit Sejati untuk mengoperasikan alat beratnya guna membuat jalan ke lokasi pemukiman serta tapak bangunan.

Partisipasi warga Dayak Punan adalah dalam hal membuat rancang bangun rumah, memilih lokasi perumahan, membuka/membersihkan lahan, mengukur lahan yang akan dibangun pemukiman, serta turut mengawasi proses pembangunan perumahan yang dibangun oleh kontraktor lokal dari Sambakungan. Pendampingan ini menjadi tanggung jawab penuh PT Berau Coal, tercatat bahwa lahan tersebut dibangun di atas areal konsesi operasioanl aktif *site* batubara Lati.

Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur pun turut andil dalam keberadaan pemukiman KM 10 Lati sejak awal, baik pada saat inisiasi maupun awal implementasi program pendampingannya. Pada saat pembahasan rencana program pemukiman ada 4 pihak yang ikut dalam proses, yaitu Manajemen PT. Berau Coal, Beberapa wakil warga Dayak Punan, Pemerintahan kampung Sambakungan, dan pihak Kecamatan Gunung Tabur. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan ke Bupati, yang kemudian menunjuk Asisten 1 (pada saat itu Bpk. Busairi) untuk memfasilitasi para pihak terkait untuk bersama-sama membahas rencana kegiatannya.

Proses pembangunan perumahan dimulai awal tahun 2001, setelah sebelumnya dilakukan pembuatan rancang bangun perumahan, pengukuran lokasi, pembuatan jalan, serta pembuatan/penyiapan tapak bangunan. Lokasi Perumahan yang dipilih oleh warga Dayak Punan adalah berjarak 1100 Meter dari jalan *Logging*, oleh karena itu Pembangunan perumahan oleh Departemen Comdev PT. Berau Coal baru dimulai setelah jalan masuk selesai dibuat oleh PT. Repindo Jaya Sawit Sejati.

Aparat Kecamatan Gunung Tabur menjadi saksi penyerahan bantuan 2 unit sarana transportasi air (ketinting) untuk mempermudah akses bantuan ke KM 10, pada masa itu akses jalan tanah masih sangat sulit dilalui. Tidak hanya sampai disitu, untuk memaksimalkan upaya pemberian tanggung jawab sosial oleh pemerintah dan pihak-

pihakterkait, pemberian program pelayanan sosial pun dilakukan, diantaranya pemeriksaan kesehatan, vaksinasi ibu dan anak, serta pelayanan KB dari Puskesmas kecamatan Gunung Tabur. Dalam aspek legalitas kependudukan pihak kecamatan juga turut andil dalam proses pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan kartu Askes Gakin (Warga Miskin<sup>14</sup>) kepada semua warga Dayak Punan KM 10 Lati.

Hanya beberapa orang warga saja yang menyatakan dampak positif adanya perusahaan tambang (PT. Berau Coal) bagi keberadaan KAT suku Dayak Punan Basap di sungai Lati. Yaitu telah dirasakannya program pembinaan yang dilakukan oleh PT. Berau Coal berupa pemukiman, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sembako, listrik dan lain-lain.

Pemukiman KAT KM10 berdampingan dengan sungai Lati. Sumber air tersebut untuk keperluan mandi, cuci, kakus dan keperluan minum maupun memasak. Selain itu, air hujan juga digunakan dan ditampung pada ember maupun tong atau drum. Pada saat tertentu, air sungai Lati akan terlihat pekat hitam, terutama pada saat musim penghujan. Ketika terjadi hal itu maka air sungai Lati tidak dapat digunakan, bahkan terlihat ada saja biota air seperti ikan, bulus dan lain-lain mati mengambang. Dugaannya, bisa saja terjadi karena air limbah

---

<sup>14</sup>Saat ini Kartu ASKES (Asuransi Kesehatan) atau Kartu JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)

tambang ataupun dari limbah perusahaan kayu yang ada disekitar sungai Lati.

### **3.2 Program *Resettlement***

#### **3.2.1 Pemukiman Warga Dayak Punan Basap Kilometer 02 Lati**

Sejarah relokasi Kilometer 10 diawali dengan kesepakatan yang berujung pada pemindahan warga Komunitas Adat Terpencil yang pertama yakni Pak KG dan Nenek KG (Kelompok pertama) beserta anak-anaknya. Dilanjutkan oleh Keluarga Pak Kiwit (Kelompok kedua). Hal ini berbeda ketika proses perpindahan ke Kilometer 02, perpindahan dilakukan secara bersamaan.

Kelompok keluarga Nenek KG di anggap memiliki wewenang dan kedudukan elit dalam kelompok. Hal iniyang menyebabkan kelompok keluarga Pak Kiwit yang belakangan menghuni hanya mengikuti arahan dan pengaturan dari Nenek KG . Karena bermukim pertama kali, kelompok Nenek KG lebih maksimal dalam merasakan bantuan PT. Berau Coal masa itu. Seperti pengembangan perkebunan, banyak dikuasai oleh anak-anak Nenek KG . Selain itu posisi elit ini dimanfaatkan untuk menggiring persepsi warga masyarakat mengenai isu kesejahteraan warga KAT Dayak Punan Basap kepada pihak PT.Berau Coal agar senantiasa memperhatikan dan memaksimalkan kopensasi kebutuhan warga.

Awalnya pada tahun 2000 warga KAT Dayak Punan Basap yang tinggal di KM 10 dibangun 8 unit rumah dengan sarana pendukungnya antara lain listrik tenaga surya untuk tiap rumah, 1 unit bangunan serba guna, serta 1 unit jamban keluarga ditepi sungai lati<sup>15</sup>. Pada pertengahan tahun 2001 ternyata masih ditemukan 5 KK warga Dayak Punan Basap yang ada di wilayah Lati yang dan belum terakomodir dalam program pemukiman menetap. Kemudian penambahan 5 unit rumah diberikan untuk mengakomodir mereka. Pada awal September 2001 proses pembangunan rumah beserta sarana prasarannya selesai.



Gambar 3.1 Kondisi pemukiman relokasi KM 10 Lati yang telah di tinggalkan (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pembangunan fisik ini disesuaikan dengan program pemerintah melalui peningkatan standar kesejahteraan masyarakat terasing dengan membangun sebuah rumah papan kecil untuk tiap keluarga diatas setengah hektar tanah pekarangan, tanah pertanian dua hekta, pasokan bahan pangan untuk setahun, alat pertanian, alat rumah tangga, bibit dan pupuk, serta sandang; satu bangunan untuk kegiatan bersama

---

<sup>15</sup> Data Laporan Departemen Community Development Tahun 2012

masyarakat; alan dan jembatan, sistem air bersih, tempat ibadah mesjid atau gereja); radio dan televisi komunal dengan listrik tenaga surya; serta balai penyuluhan pertanian. Kelompok sasaran akan mendapat bimbingan dan penyuluhan dari petugas lapangan, ulama atau pastor (pendeta). Semua itu dimaksud untuk menciptakan kebiasaan dan rutinitas hidup yang baru, suatu disiplin rinci dalam kehidupan sehari-hari<sup>16</sup>.

Bimbingan kerohanian (lihat halaman 68, Bab III,)maupun penyuluhan terkait pertanian ini pun diterima oleh warga Kilometer 02 Lati saat mereka dahulu tinggal di Kilometer 10. Penyuluh pertanian didatangkan dengan cara menyerap dan memanfaatkan tenaga peserta didik, seperti mahasiswa KKN (*Kuliah Kerja Nyata*) yang tengah melakukan riset studi di wilayah administratif Kecamatan Gunung Tabur. Misalnya program yang coba diterapkan yakni pelatihan memanaatkan lahan pekarangan guna ditani tanaman palawija.

Secara administratif, pemukiman KAT KM 02 Lati masuk dalam wilayah kampung Sambakungan RT VI. Maka kepemimpinan ditingkat pemerintahan di pemukiman KAT KM10 Lati adalah ketua RT. Ketua RT yang ada saat ini adalah satu-satunya warga yang bisa baca-tulis walaupun tidak mengenyam pendidikan, Pak IM (25 Tahun) terpilih setelah kepemimpinan RT terdahulu BaPak SD. Pak IM dipercaya oleh warga untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka ke pihak

---

<sup>16</sup>Lihat Tania Murray Li (2012), *The Will To Improve*, hal.149-150.

Yayasan Dharma Bhakti PT. Berau Coal,) aparat kampung atau organisasi masyarakat lainnya. Kedudukan Pak IM dan Pak SD yang dianggap sebagai pemimpin Informal.

Ketua RT juga memberikan informasi dan mengatur agenda-agenda kegiatan, baik internal maupun diluar komunitas. Merupakan perwakilan dari perangkat kampung yang paling dekat dengan komunitas dayak punan di KAT KM 02 Lati dan menjadi penampung segala permasalahan warga.



Gambar 3.2 Ketua RT VI Kampung Sambakungan alias Ketua RT warga KAT Km 02 Lati (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Berkontribusi sebagai fasilitator, mediator bagi warga. Tempat mengadu, memberikan masukan, usulan, kritikan berbagai masalah warga. Pak KG dan Nenek KG berungsi sebagai Sesepuh / Tetua warga merupakan tokoh tertua dalam klan keluarga yang ada di pemukiman KAT KM 02 Lati. Tokoh ini adalah Pemimpin informal dalam komunitas warga Dayak Punan KM 02 Lati. Keputusan-keputusan komunitas menjadi rembug bersama di KAT KM 02, peran laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

Tetapi keputusan itu hanya sebatas untuk komunitas saja. Untuk pengambilan kebijakan atau keputusan ditingkat yang lebih tinggi, seperti di tingkat kampung, komunitas suku dayak punan basap tidak pernah dilibatkan.



Gambar 3.3Seorang warga dengan Tas anyaman hasil buatannya sendiri (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Fungsi dan peran Nenek KG dan Pak KG lebih mengarah pada penanganan dan penyelesaian hal-hal informal dan bersifat kekeluargaan warga KM 02, seperti pernikahan warga, penyelesaian konflik internal, rencana berpindah lokasi, penamaan bayi dan lain-lain. Perannya saat ini mulai menipis seiring munculnya pimpinan formal yang ada disitu, yaitu ketua RT dan masuknya pengaruh lain dari luar. Pada saat proses program pemukiman, tokoh ini lebih banyak pasif dan menyerahkan semua persoalan kepada anak-anaknya.

Kini pemukiman warga KAT Dayak Punana Basap Km 02 Lati dibangun menjadi 17 Unit, dengan tambahan 1 unit gereja yang

sekaligus menjadi balai pertemuan warga. Terdapat 1 (satu) unit balai pertemuan yang sekaligus digunakan sebagai tempat ibadah.

*“ibadah mulai jam delapan pagi sampai jam 12 siang. Tiap jum’at malam ada ibadah juga. Sedikit yang datang, yang rajin datang itu mama Thomas (Ibu As), Bu Sd, sama pak R. Tapi bapak (pendeta) tiap hari minggu mauk ke dalam (Kilometer 10) untuk ibadah disana sama keluarga bapak ”*  
(Wawancara dengan Bu Pendeta, mei 2015)

Setiap minggu balai ini digunakan untuk ibadah, selain itu digunakan pula untuk acara-acara lain yang melibatkan banyak orang. Termasuk kegiatan pengobatan rutin yang menjadi Program CSR PT. Berau Coal.



Gambar 3.4 Gereja sekaligus menjadi Balai Pertemuan warga KAT KM 02 Lati (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sarana penerangan sudah menggunakan sumber aliran Listrik dari PLN dan beroperasi penuh selama 24 jam. Tidak seperti ketika di KM 10 Sumber energi listrik warga diperoleh dari generator mesin genset sebesar 5,5 KVA yang dioperasikan mulai pukul 18.00 hingga 22.00 paling lambat akan dimatikan pukul 24.00 waktu setempat. Pengoperasian genset dilakukan oleh salah satu warga atau secara bergantian sedangkan pemeliharaan/perawatan dibantu oleh PT. Berau Coal.

Rumah warga merupakan bangunan rumah dengan tipe 6 x 14 m . Dilengkapi dengan 1 ruang kamar mandi, 1 ruang tamu, dan 3 ruang tidur serta 1 ruang dapur. Rumah yang dibangun di kilometer 02 kali ini lebih permanen, ditambah dengan bantuan penerangan 24 jam dari PLN.



Gambar 3.5 Model Rumah Warga dan sarana penerangan listrik PLN (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Bangunan dibuat tinggi dari permukaan tanah, dengan menyesuaikan perintah dan kebutuhan Warga KAT agar merasa betah dan nyaman untuk tinggal menetap di area ini. Setelah sebelumnya disediakan pemukiman sementara (relokasi) di Kilometer 10 dengan ukuran rumah 5 x 10 meter persegi. Bangunan Rumah di Kilometer 10 terdiri dari satu ruang tamu, satu ruang tidur dan dapur. Untuk ruang mandi (WC) biasanya warga mandi di anak sungai yang terletak kurang lebih 20 (duapuluh) meter dari pemukiman mereka.



Gambar 3.10 (kiri ke kanan) kondisi WC yang berada dalam rumah dan dapur salah satu warga (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Tidak seperti Pemukiman KAT KM10 dahulu yang berdampingan dengan sungai Lati. Kebutuhan air untuk keperluan mandi, cuci, kakus dan keperluan minum maupun memasak mudah dijangkau. Kini warga KAT Km 02 Lati kesulitan mengakses kebutuhan air bersih karena jauh dari Sungai. Sungai Lati berjarak 4 Kilometer dari pemukiman. Sehingga bantuan air bersih diberikan melali pengiriman air tank sebanyak 1000 liter setiap 2-3 hari sekali ke setiap rumah warga. Selain itu, air hujan juga digunakan dan ditampung pada ember maupun tong atau drum.



Gambar 3.7 proses peberianjatah air oleh *vendor* perusahaan (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

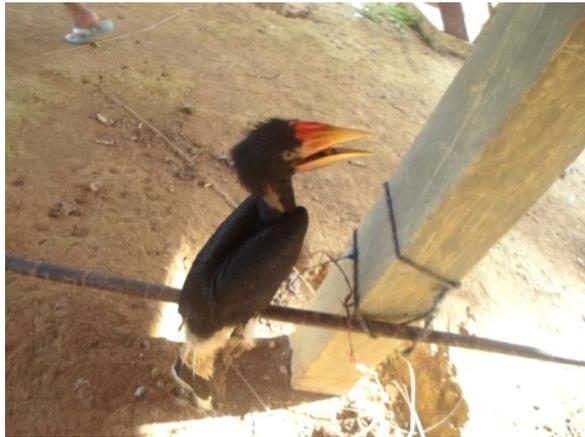
Mayoritas warga KAT KM 02 sudah menggunakan telepon seluler (handphone). Dari 18 unit rumah, 12 diantaranya memiliki masing-masing 1 unit televisi dan parabola. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti Pulsa, kebutuhan mandi dan masak, mereka masih menjukampung Sambakungan. Meskipun di salah satu rumah kini telah membuka usaha warung sembako sederhana.



Gambar 3.8 Salah satu Toko Kelotong milik warga (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Tingkat pendapatan warga di KAT KM10 Lati erat kaitannya dengan kalender musim (Data Sumber dari laporan Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal tahun 2012). Pendapatan mereka berasal dari menangkap hewan buruan, menjual gaharu dan menjual hasil panen madu. Terkadang, beberapa waktu ada cukong-cukong kayu yang mempekerjakan mereka untuk mengambil kayu komersil di hutan. Hewan buruan yang dapat dijual adalah payau dengan harga Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per kg. Kayu gaharu dengan kualitas rendah dihargai

Rp 25.000 per kilogram. Saat ini madu dihargai Rp 150.000 per liternya. Menganyam rotan pun menjadi sumber pemasukan, biasa di kerjakan oleh ibu-ibu atau anak-anak perempuan.



Gambar 3.11 Salah satu contoh hewan hasil Buruan, Burung Rangkok atau biasa dikenal sebagai Burung Enggang bagi masyarakat Kalimantan (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pendapatan tertinggi warga diperoleh dari panen madu hutan, dalam satu periode panen madu hutan (September hingga Desember dan Januari hingga Februari), 1 (satu) keluarga dapat memperoleh 300-500 liter madu. Pendapatan terbesar kedua diperoleh dari gaharu dengan rata-rata satu orang dapat mengumpulkan sekitar 800-1000 kg dalam satu bulan. Beberapa juga masih menjalankan profesi sebagai pembuat tiang untuk tumbuhan Merica, bahasa setempat menyebutnya *turus*<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Istilah warga setempat dalam menyebut Tiang tempat menjalarnya tumbuhan Merica



Gambar 3.12 Batang-batang turus warga yang belum terjual  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

*“sudah buat lama itu mbak, ada lebih setahun, tapi gak ada yang beli, orang-orang Sambakungan sudah punya sendiri, kita juga bingung mau ngangkut pake apa? ”* tutur pak RO ketika beliau menceitakan sukarnya menjual *turus* di masa sekarang ini. Balok-balok *turus* sudah kurang diminati karena banyak pula warga kampung lainnya yang membuat, keterbatasan sarana angkutan *turus* untuk dipasarkan ke warga-warga perkampungan lainnya pun menjadi kendala. Salah satu kendala yakni dikarenakan penggunaan *turus* yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama dan awet dalam kondisi perubahan cuaca.

*“saya sebenarnya pernah kerja di perusahaan, bagian lapangan yang pasang patok (Departemen Geologi, bagian observasi lahan) di hutan. Saya bisa pakai GPS mbak, dari itu. Tapi gak tahan saya bak, gaji besar tapi jarang pulang ketemu anak-anak.”* (wawancara dengan Pak RO)

Berikut penuturan warga lainnya yang mengungkapkan hal serupa,

*“ Saya dulu pernah jadi satpam diperusahaan, itu mbak Tahu ‘kan? yang pos gabungan dipertigaan sana (Site PT. Berau Coal LMO, Kampung Sambakungan) Tapicape mbak, kita harus berangkat pagi-pagi (antara jam 06.00-07.00) baru pulang tengah malam, gak bisa bebas juga mana bisa kita istirahat sesuka kita, bebaju semau kita, namanya juga perusahaan. Tertekan kita kerja jadinya, walaupun dapatnya lebih besar, tiap bulan ada aja pegangan (pendapatan/gaji). Sama aja hitungannya mbak, lebih cape gitu daripada berburu, paling kita pergi seminggu 3 kali, ini tiap hari dari pagi sampe malam,”*(Wawancara dengan Pak YO)

Gambaran persepsi mengenai mencari nafkah (pekerjaan) dikalangan masyarakat KM 02 Lati ini bisa tercermin dari dua pandangan warga. Kedua warga ini tercatat pernah bekerja di Perusahaan. Bekerja dipertambangan dianggap tidak mengenal waktu, kondisi pekerjaan dikebanyakan tabang bisa dideskripsikan seolah tidak manusiawi (Nash, 1927:171). Keduanya mengalami permasalahan serupa yakni masalah ikatan waktu dan peraturan yang beralaku di Perusahaan yang dianggap kurang sesuai dengan pembawaan diri dan kemampuan mereka. Warga KAT menganggap pekerjaan yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka adalah yang tidak terikat waktu dan aturan spesifik dalam berpenampilan. Oleh karena itu warga lebih banyak memilih tetap bertahan pada profesi berburu atau berladang ketimbang menjadi kontraktor di perusahaan pertambangan sekitar yang bisa menyita waktu *luang* mereka.



Gambar 3.11 Kolam Ikan yang tidak dikelola warga (Dokumentasi Pribadi)

Program CSR PT. Berau Coal memberi bantuan pemberdayaan ekonomi melalui kelola budidaya perikanan. pertimbangan ini didasarkan pula atas kebiasaan memancing warga. Disediakan kolam berukuran 10 x 25 meter persegi dan disebar benih ikan Nila Hitam. Warga diharapkan dapat membudidayakan kolam dan hasilnya dapat dijual ke perkampungan terdekat. Namun disayangkan pendampingan tidak secara intensif dilakukan, sehingga warga belum mampu melakukan budidaya secara mandiri. Alih-alih menuju sungai yang jaraknya sangat jauh, warga justru mmemancing di Kolam, sedikit demi sedikit jumlah ikan berkurang dan warga mengadu kembali pada pihak perusahaan.

Ada respon dilematis mengenai keberadaan kolam ini, disatu sisi warga merasa kebutuhan ikan dikolam habis seiring waktu berjalan, sementara perusahaan mendorong untuk dilakukan kelola budidaya perikanan, namun warga cenderung menolak karena tidak bisa merawat.

Pak IDR adalah seseorang yang di percaya oleh pihak perusahaan untuk merawat kolam, karena warga lain menolak dengan alasan perkara perawatan dan budidaya ini merupakan kewajiban pihak perusahaan. Namun disisi lain fitnah bahwa ikan-ikan habis karena dikonsumsi sendiri oleh Pak IDR dan keluarganya. Alasan inilah yang menyebabkan sikap apatis warga dalam mengelola kolam ikan.

### **3.2.2 Bantuan Pilar-Pilar Kehidupan**

Melalui Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal PT. Berau Coal menjalankan aksi CSR dengan menerapkannya ke dalam program pemberdayaan berkelanjutan. Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal menetapkan 4 Pilar program yakni; Pendidikan dan pengetahuan, Kesehatan dan Nutrisi, Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Budaya. Keempat Pilar tersebut menjadi dasar pengembangan program berkelanjutan CSR PT. Berau Coal.

Setelah di *Resettlement* pada tahun 2012 dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono pada Peresmian sekaligus pembukaan pemukiman KAT KM 02 Lati, 25 Januari 2013. Amanat dan tanggung jawab diberikan pada PT Berau Coal agar melaksanakan program pengembangan ekonomi berkelanjutan selama 2-3 tahun untuk warga KM 02 Lati. Pemberdayaan dan pendampingan diberikan tidak hanya dalam program *Resettlement* yang membangun pemukiman menetap beserta sarana pendukungnya.

Melainkan juga pendampingan dalam upaya membantu warga KM 02 Lati hidup mandiri untuk mempersiapkan diri ketika penutupan tambang.

a. Pendidikan dan pengetahuan

- Beasiswa pendidikan

bantuan berupa biaya pendidikan gratis untuk putra –putri warga KAT yang mau bersekolah hal ini dilakukan guna meningkatkan motivasi belajar dari warga KAT. Bantuan ini diberikan mulai jenjang Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi

- Asrama pelajar KAT



Gambar 3.12 Anak-anak Asrama KAT (Sumber: Data Laporan Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal bidang Pendidikan)

Fasilitas tempat tinggal berupa asrama pelajar lengkap dengan fasilitas dan seorang pengasuh sekaligus pengurus asrama yang tinggal bersama mereka. Saat ini Pak SD dipercayakan sebagai Pengasuh anak-anak KAT Dayak Punan Baasap yang bersekolah di Kecamatan Tanjung Redeb. Bantuan tempat tinggal hal ini di

berikan guna memudahkan proses belajar mengajar yang mengingat kondisi pemukiman mereka yang jauh dari jangkauan pendidikan yang layak.

b. Kesehatan dan Nutrisi

- Pengobatan Gratis



Gambar 3.13 Pengobatan Gratis oleh petugas medis Kecamatan Gunung Tabur dan Puskesmas Kampung Sambakungan. (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Kesehatan merupakan faktor utama untuk memulai aktifitas sehari-hari dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan dan masyarakat KAT. Warga masih kurang memperhatikan pentingnya kesehatan hingga saat ini dan inilah yang menjadi penyebab utama mengapa berbagai macam penyakit mudah sekali menyerang mereka akibat pola hidup yang kurang sehat tadi dan untuk itu maka diadakanlah program *pengobatan gratis* yang dilakukan rutin setiap bulannya, dan untuk melancarkan program ini maka kita melakukan kerja sama dengan pihak puskesmas Sambakungan.

- Asuransi Kesehatan

Selain mendapatkan pengobatan gratis pihak PT.Berau Coal juga memberikan bantuan berupa jaminan kesehatan untuk warga KAT yang belum memiliki jamkesmas hal ini di berikan untuk mengantisipasi adanya warga KAT yang menderita penyakit kronis atau penyakit menular dan harus di tangani dengan serius dan juga kecelakaan yang tidak terduga baik kecelakaan lalu lintas maupun pada saat melakukan aktifitas sehari-hari,bahkan apabila penyakit atau kecelakaan yang diderita oleh warga KAT sudah tidak bisa di tangani lagi oleh rumah sakit atau tim medis yang ada di berau maka kita akan merekomendasikan untuk di lakukan rujukan kerumah sakit lain dengan fasilitas dan perawatan yang lebih baik lagi seperti di Balikpapan,Surabaya ataupun Jakarta.

- Pemeriksaan Gizi Bayi Dan Bumil



Gambar 3.13 Pemeriksaan salah seorang warga KAT Km 02 Lati (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Diantara beberapa program kesehatan yang sudah berjalan pada warga KAT inilah yang belum disadari oleh

masyarakat betapa pentingnya kesehatan bayi dan balita serta pemeriksaan berkala pada ibu hamil, hal inilah yang menyebabkan anak-anak mereka ada yang kurang gizi, kelahiran bayi dini dan gangguan kehamilan lainnya, dan untuk mengantisipasi hal ini terjadi berkelanjutan maka kami bekerja sama dengan bidan kampung dan posyandu kampung sambakung untuk melakukan pemeriksaan rutin dan penimbangan rutin sebulan sekali.

c. Pemberian Sembako

Program pemberian sembako bertujuan untuk menambah kebutuhan hidup warga yang tinggal di wilayah KAT Lati, sembako yang diberikan berupa Beras, Minyak, Bumbu dapur dan Mie Instan. Program pemberian sembako kepada warga KAT ini rutin dilakukan setiap bulannya, agar kebutuhan sehari-hari masyarakat KAT bisa terpenuhi karna selama ini mereka hidup dengan berburu dan memakan buah-buahan yang ada di hutan, namun bukan hanya kebutuhan sehari-hari yang diharapkan melainkan tubuh mereka mendapatkan asupan gizi yang seimbang sehingga mereka bisa menjalankan aktifitas dengan baik.

## BAB IV

### PENGHIDUPAN WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAYAK PUNAN BASAP TERANCAM

#### 4.1 Analisis Teoritis : Pemindahan yang Memiskinkan

Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dayak Punan Basap mengalami beberapa dampak akibat pemindahan di antaranya adalah kehilangan kebebasan untuk mengembara dan berburu di hutan sekitar wilayah Lati, karena keberadaan kegiatan pertambangan. Kekurangan akses untuk mencari sumber penghidupan dari berburu, memanen madu dan buah, merupakan wujud terbatasnya ruang gerak Waga Dayak Punan Basap dalam mempraktekan kegiatan mata pencaharian lokal mereka. Keadaan ini terjadi seiring adaptasi warga terhadap tuntutan kemandirian yang diharapkan oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan agar program *Resettlement* ini mengantarkan mereka ke kehidupan yang lebih modern dan mandiri.

Beriringan dengan program relokasi atau pemindahan pemukiman KAT yang telah dimulai sejak 2001 membawa konsekuensi perlunya pemberian sembako dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebelum mereka mampu beradaptasi hidup menetap dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kehidupan menetap. Tujuan program pendampingan ini mengarahkan mereka ke dalam kehidupan yang lebih mandiri dan berdaya ke arah kemajuan ekonomi. Akan tetapi proses

tersebut justru menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial atas daya resitensi warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati yang justru tidak bisa mengikuti arah kemajuan. Melainkan munculnya sikap-sikap apatis yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati pasca praktek eksplorasi tambang ditutup.

Muncul berbagai resiko akibat pertambangan, termasuk didalamnya kemiskinan yang melingkupi kehidupan warga yang bermukim. Kemiskinan ini diidentifikasi karena warga sulit beradaptasi di lingkungan baru secara signifikan, penyesuaian pengetahuan dan wawasan guna mencari nafkah dan menjalin komunikasi terhadap warga kampung terdekat pun masih sulit dilakukan. Sikap menutup diri ini membawa mereka ke arah kehidupan yang cenderung tidak sejahtera. Kesejahteraan ini tidak terukur secara pendapatan atau pemasukan keuangan, melainkan ketentraman dan jaminan hidup untuk memperoleh pasokan makanan ditempat yang baru.

Perhatian terarah pada dampak pelaksanaan Program *Resettlement* ini terhadap aset penghidupan warga KAT. Program pemindahan ini berlangsung dalam 2 (dua) fase peralihan, yang pertama yakni relokasi yang dilakukan ke Kilometer 10 Lati. Relokasi ini bersifat sementara karena wilayah tinggal orang KAT yang sebelumnya di pinggir sungai Lati merupakan jalur pembuangan limbah tambang PT. Berau Coal, selain itu juga lahan dimana pondok mereka berdiri merupakan areal konsesi PT. Berau Coal yang menjadi target eksplorasi selanjutnya.

Kesepakatan berpindah ini dilakukan dengan janji-janji kehidupan yang lebih layak. Tanpa disadari warga tergusur dari tanah adat mereka sendiri, dan harus bisa beradaptasi di lingkungan baru dalam waktu yang singkat.

Ketergantungan warga Dayak Punan Basap di Kilometer 02 Lati bisa dicermati pada kontak sosial ekonomi mengenai kebutuhan sembako yang masih dipasok setiap bulan. Jika pasokan sembako dalam sebulan telah habis, warga akan kebingungan mencari alternatif lain untuk sumber penghidupan. Kebimbangan ini dilandasi atas faktor keterbatasan ruang mata pencaharian yang mendasarkan atas kemampuan terasah sebagai pemburu dan meramu. Pemberian bantuan penyuluhan pertanian dan pendampingan telah dilakukan, namun wawasan baru ini tidak bisa di serap karena warga menuntut pendampingan intensif dalam waktu yang lama, disamping mengaharap janji kompensasai bantuan dari pihak perusahaan.

Proses ketidakmandirian, kehilangan akses penghidupan, bahkan hingga terjadinya ketimpangan struktur sosial, meletakkan posisi warga dalam marjinalitas. Marjinalisasi dalam bidang ekonomi, kenyataan terpinggirkan karena keberadaan perusahaan dan belum siapnya bekal menghadapi perubahan yang demikian cepat. Kondisi ini dinyatakan Cernea (2000) sebagai proses pemiskinan yang terjadi dalam suatu wilayah *Resettlement* atau relokasi paksa yang dapat dicermati melalui fakta terjadinya Kehilangan Lahan (*landlessness*), Kehilangan pekerjaan (*joblessness*), Kehilangan tempat tinggal (*homelessness*), Marjinalisasi

*(Marginalization)*, Meningkatnya KetidakaBNoramalan dan Kematian *(Increased Morbidity and Mortality)*, Ketahanan Pangan *(Food Insecurity)*, Kehilangan Akses atas Kepemilikan Tanah *(Loss of access to common property)* serta aspek Disartikulasi Sosial *(Social Disarticulation)*.

Kehilangan lahan ditunjukkan dengan hilangnya kesempatan warga untuk menyusuri dan menjelajahi area-area hutan yang terdahulu karena kini telah beralih fungsi menjadi lahan konsesi pertambangan dan menjadi zona terlarang untuk publik. Fakta kehilangan lahan ini pun memaksa warga untuk meninggalkan tempat tinggalnya yang lama dan kemudian bersedia untuk diberi tempat tinggal baru dengan jaminan-jaminan masa depan yang lebih baik.

Pengorognisiran mengenai pembagian tanah setiap keluarga dengan bukti kepemilikan surat tanah menjadi janji kompensasi yang pernah diumumkan pada pertemuan kesepakatan warga dahulu ketika relokasi ke KM 10. Pak YO pernah menuturkan bahwa “*Belum ada surat tanah buat rumah ini, mana ada itu.. bohong aja kalo ada*” Namun bentuk kompensasi ini belum terwujud, dan warga merasa keberadaannya di tempat tinggal baru akan terancam seiring waktu penutupan tambang pada tahun 2025. Keadaan ini mempertegas kehilangan warga atas hak kepemilikan tanah adatnya. Berubahnya lingkungan tinggal warga Dayak Punan Basap di KM 02 Lati yang jauh dari sumber air seperti Sungai, menyempitnya area hutan, disartikulasi sosial yang diakibatkan oleh

penolakan-penolakan dan kekegatan budaya, menjadi problema dilematis yang kemudian menimbulkan banyak konflik.

## **4.2 Analisa Temuan: Bukti-bukti Pemiskinan**

### **4.2.1 Lahan dan Tempat Tinggal Orang Dayak Punan Basap**

Meskipun tidak melakukan sistem berpindah dalam lahan pertanian, Orang Dayak Punan Basap tetap digolongkan dalam ciri masyarakat Dayak, mengingat ada beberapa kesamaan yang mereka miliki dalam sistem Ladang Berpindah (Ukur, 1991; Widjiono, 1998; Muniati, 2004). Bagi Warga Dayak Punan Basap KAT KM 02 Lati, mereka tidak mengenal batas lahan, ladang ataupun hutan yang permanen. Mengenai batas lahan dalam sistem pertanian orang Dayak Punan Basap tidak terlalu jelas, tidak ada batas pasti yang merujuk pada kepemilikan perseorangan atau keluarga.

*“...semua lahan ini milik kami sekeluarga (keturunan Pak KG dan Nenek KG ) batasnya tanaman yang kami tanam, pohon pisang itu aja biasanya, ladang kami bukan disini, dibawah sana dulu sebelum kilo 10, waktu di kilo 10 ada depan rumah dibuatkan sama comdev. Kita di suruh tanam sayur”*  
(Wawancara dengan Nenek KG , Juni 2015)

Orang Dayak Punan Basap tidak mempraktekan tanam padi dalam sistem sawah atau ladang padi ketika mengembara di hutan. Kehidupan sebagai pengumpul buah dan tanaman hutan, membuat aturan membatasi lahan pencarian pangan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman, penandaan kepemilikan lahan keluarga pun hanya ditandai

dengan praktek garap. Apabila sebuah keluarga masih menggarap lahan tersebut, maka lahan itu merupakan tanah yang telah di klaim, hingga kemudian hari telah ditinggalkan.

Rumah panjang atau yang biasa di sebut Lamin (Geddes dalam Muniati; 2004) menceritakan fungsi sebenarnya Rumah Panjang bagi aktivitas keagamaan, hubungan dan pola kekerabatan, pengaturan peran dan fungsi anggota keluarga hingga keadaan tertentu, misal melindungi anggota keluarga dari perburuan kepala. Konsep Rumah Panjang secara umum menjadi ciri khas penjelas mengenai identitas Dayak yang tersebar di pulau Kalimantan hingga Serawak. Namun orang-orang dayak Punan Basap tidak tinggal dalam rumah-rumah panjang, melainkan membangun pondok. Seperti yang diterangkan oleh Nenek KG *“sebelum ketemu orang comdev, kami tinggal dihutan dekat sungai di pondok aja, sering kami tinggal nanti buat pondok baru lagi”*



Gambar 4.14 Pondok bekas hunian Warga KAT Dayak Punan Basap sebelu di relokasi ke Kilometer 10 (Sumber: Arsip Data Dokumentasi Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal)

Pondok dibangun sementara karena kebiasaan mengembara ke hutan dan susuran Sungai atau sumber air membuat mereka membangun pondok.

Keaslian lingkungan hidup dan tinggal warga Dayak Punan Basap (Suku Punan) telah dinyatakan Lebar dalam Maunati (2004) menyebut orang-orang Punan (Penan) yang dibagi menjadi Penan Timur dan Penan Barat, dimana orang-orang Penan tersebut membangun perkemahan atau pondok utama mereka di dekat sumber air yang mudah dijangkau, menjadikannya tempat tinggal yang strategis dan menjadi tempat untuk menyimpan hasil-hasil hutan mereka. Pondok tersebut dibangun disepanjang sungai atau sumber air, tinggal di dataran yang rendah, dan hidup dalam bangunan pondok-pondok yang terbuat dari batang-batang pohon muda dan beratapkan daun-daun. Selain itu Sebagai suku Punan, orang Dayak Punan Basap memiliki kehidupan pengembaraan dan hidup dengan cara mengumpulkan buah, mengambil madu, memancing dan berburu.

Warga KAT Dayak Punan Basap KM 02 Lati mengakui bahwa pondok-pondok yang mereka tinggali di bantaran sungai sengaja dibangun strategis di sekitar sumber air yang mudah dijangkau agar dimaksudkan untuk menjamin kehidupan pangan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga

*“kita gak bahagia tinggal disini mbak, jauh air, susah dapat daging (babi), madu juga sudah sulit panennya, tempat (hutan) kita biasa berburu sudah habis dipake Berau Coal (pertambangan). Yang paling sulit air, gak bisa hidup kita jauh dari air”* (Wawancara dengan SN, Juni 2015)

Tidak hanya menggantungkan keberadaan sungai untuk kebutuhan air minum dan makan melalui tangkapan ikan, mereka pun menggantungkan hidup melalui akses Sungai Lati sebagai sarana transportasi yang sering dilalui oleh masyarakat lain, sehingga mereka bisa dengan mudah menjual hasil buruan mereka. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras. Disebabkan mereka tidak mengenal sistem pertanian menanam padi, kecenderungan berladang untuk menanam tumbuhan buah dan sayuran.

Sebelum direlokasi ke wilayah Kilometer 10 Lati, orang-orang Dayak Punan Basap ditemukan oleh para penjelajah dari perusahaan-perusahaan dan pemerintah daerah yang ditugaskan di sepanjang sungai Lati maupun Sungai Bengawan di Berau. Oleh karena itu, orang-orang Dayak Punan tersebut direlokasi ke Kilometer 10 dengan mempertimbangkan lokasi yang dianggap strategis karena berada di jalur yang dilalui anak sungai Lati. Problema sumber air inilah yang kemudian menjadi polemik ketika mereka kembali dimukimkan secara tetap pada tahun 2012 lalu ke wilayah Kilometer 02 Lati, karena akses sumber air sulit untuk dijangkau letak Sungai berjarak sekitar 6 kilometer melalui jalur hutan dan area pertambangan. Penyediaan Sumur Air oleh PT. Bereau Coal belum terealisasi hingga kini. Inilah yang kemudian melahirkan banyak masalah dan konflik antara Warga KAT Dayak Punan Basap dengan pihak perusahaan.

*“Lebih baik gak ada listrik daripada sulit air, dulu kami juga gak ada listrik waktu tinggal di hutan, buat apa listrik nyala 24 jam kalau air aja nunggu dikirim (di suplai oleh*

jasa pengiriman air) *dulu..*” (Wawancara dengan Bu AS, Mei 2015)

Kondisi ketersediaan air di Kilometer 02 Lati terbilang terbatas karena kebutuhan jatah 1000 liter air per rumah hanya diberikan setiap tiga atau dua hari sekali melalui *vendor* perusahaan. Keadaan ini berbanding terbalik seperti saat berada di Kilometer 10, sumber air mudah dijangkau karena berada dekat pemukiman warga. Keadaan ini yang pernah mendorong kemarahan beberapa oknum warga untuk menyabotase seorang *vendor* ketika tengah mengantarkan jatah air ke pemukiman. Salah satu warga pernah mengakui *memotong* pipa penghubung ke *profiltank* ke rumah warga.

*“...Ada lebih seminggu kita gak punya air. Kami datang pas dia datang, kami potong-potong itu pipa tangkinya. Kau tau kan yang pipa besarnya itu. Muyak kami sudah, nda sekali dua kali begitu.. Alasannya macam-macam kalau kami tanya”*(Wawancara dengan Bu As, Juni 2015)

Kemarahan warga ini merupakan salah satu bentuk respon penolakan yang dilakukan terhadap pihak perusahaan atau *stakeholder*. Bentuk penolakan ini menjadi bagian upaya perlawanan warga untuk menyatakan respon mereka terhadap program-program CSR yang diterapkan di pemukiman mereka.

Warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati dimukimkan secara tetap di lahan baru, pembangunan fasilitas perumahan lengkap dengan sarana pendukungnya seperti listrik, pasokan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, bahkan pengaturan terhadap organisasi sistem organisasi warga

melalui pendamping lainnya dari program CSR. Namun memindahkan warga dan terjadipengambilalihan lahan justru menghilangkan dasar pondasi utama sistem produktivitas masyarakat, aktivitas komersial dan mengubah mata pencaharian (Cernea, 2000; 12). Warga kesulitan hidup produktif atas alih lahan yang mendadak ini, kehilangan pekerjaan utama tidak terelakkan, keilangan tempat tinggal pun menjadi resiko seiring dari (*landlessness*) perpindahan ke lahan-lahan baru.

Rumah baru ini tidak lagi terletak di pinggiran sungai seperti asal muasal mereka dahulu. Meskipun telah dilengkapi dengan Listrik, dan rencana pasokan air rutin melaluipengirian air bersih oleh *vendor* perusahaan. Namun kini justru memicu terjadinya ketimpangan atas akibat penyesuaian yang mendadak, pola bertahan hidup yang berubah. Semakin banyaknya tekanan dari wilayah industri dan pihak-pihak kapitalis dapat mendorong terjadinya pergerakan sosial (resistensi) dan ketimpangan sosial. Ada perubahan nilai-nilai yang dianut, perubahan pola dan sistem perilaku dari yang sebelumnya.

#### **4.2.2 Hubungan yang Memarjinalisasi dan Kehidupan yang Terhimpit**

Warga Komunitas Adat Terpencil Kilometer 02 Lati mengalami kehidupan yang terhimpit, baik dalam himpitan lahan kekuasaan pertambangan PT. Berau Coal yang menyempitkan lahan dan tanah tempat tinggal mereka untuk berburu, yang kemudian mengakibatkan penurunan ketahanan pangan (misal perolehan daging Babi), bahkan hingga menjerok pada kondisi marjinal akibat hubungan yang saling bersinggungan dalam

internal kelompok maupun kelompok luar. Cernea (2003) berpendapat jika pengelolaan rehabilitasi tidak dilakukan secara komprehensif melihat keseluruhan variabel tersebut, secara akumulatif dapat berakibat pada dekapitalisasi aset-aset produksi warga, khususnya warga miskin, yang berarti dapat dipandang sebagai sebuah usaha pemiskinan struktural yang tentunya bakal memperparah kehidupan warga yang sebelumnya sudah tergolong miskin menjadi semakin miskin. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya marjinalisasi atau pemiskinan struktural akibat aset yang rusak dan pekerjaan yang hilang.

PT. Berau Coal untuk memindahkan/merelokasi pemukiman di luar atau menjauh dari areal pertambangan untuk kepentingan perluasan areal tambang (Lihat pula Halaman 67-77 pada Bab III). Ada beberapa warga yang setuju dan beberapa yang lain merasa berat untuk meninggalkan aset yang mereka anggap sebagai tanah adat. Beberapa warga yang keberatan untuk direlokasi dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan.

Mereka dikhawatirkan akan menetap atau pergi dari pemukiman tetapi akan menempati lahan-lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Lahan tersebut merupakan lahan-lahan yang masuk dalam areal batas konsesi PT. Berau Coal. Jika keadaannya seperti itu, maka kehidupan beberapa warga ini akan mengikuti pola lama, yaitu hidup berpindah. Hal ini akan menyulitkan, apalagi ketika mereka hidup berpindah dan menempati areal tambang. Ada beberapa warga yang

dahulu sempat menolak rencana relokasi tersebut yakni PakKg dan Nenek KG dan Pak NG,

*“Kami tetap tinggal disini saja, lebih dekat sungai, kalo kami pergi ini (pemukiman) semua dirubuhkan. lagipula saya gak ada rumah di Kilo dua, biar kami juga menjaga lahan disini”* (Wawancara dengan Pak GN, Agustus 2015)



Gambar 4.15 Peribadatan Minggu di salah satu rumah warga Kilometer 10 (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Kini Pak NG dan Pak GN masih bersikukuh untuk tinggal dan menetap di Kilometer 10, bersama sebuah keluarga lain, Keluarga Pak GN. Kedua keluarga ini tetap memutuskan untuk tinggal di Kilometer 10 Latir, meskipun mereka tidak memperoleh jatah bantuan seperti warga KAT KM 02 Lati. Beberapa alasan mereka untuk tetap tinggal antara lain:

- Akses menuju sumber air lebih dekat hanya berjarak 20 meter dari belakang rumah
- Kecurigaan muncul bahwa jika mereka turut serta pindah bersama komunitas lain ke luar (Kilometer 02) maka lahan bekas relokasi Kilometer 10 akan digusur dan diubah menjadi lahan pertambangan.

- Mempertahankan tanah adat dengan jalan membagi anggota keluarga, mereka megorbankan diri untuk tinggal demi mempertahankan tanah adat

Sebelumnya proses pemindahan ke Kilometer 02, Nenek KG mensyaratkan semua warga KAT KM 02 harus direlokasi jika rencana tersebut direalisasikan dan tidak mengikutsertakan warga dari KAT KM 16 Bengawan(karena pernah terjadi perselisihan) seperti yang pernah diungkapkan Bu SD “*dulu pernah kita tinggal jadi satu sama orang kilo 16, tapi mereka buat ulah..*”, namun informasi terkait perselisihan ini tidak dijelaskan lebih jauh oleh informan.Syarat lain terkait kesepakatan pemindahan ke Kilometer 02yakniapabila dikemudian hari setelah kegiatan eksplorasi selesai, tanah atau lahan masih menjadi milik mereka. Akan tetapi janji-janji tersebut sepertinya tidak teralokasi. Sehingga menimbulkan kemarahan warga.

*“Dulu janjinya begitu, ada rumah, kita dikasih sembako, lengkaplah pokoknya, terus kita dikasih tanah, dikasih ganti rugi mereka ambil lahan. Tapi mana? Air aja susah, kami mau berburu dihutan sudah banyak perusahaan, kami diusir mana boleh dekat-dekat tambang. Dulu Kami biasanya naik ke tambang biar dikasih bantuan’ sekarang enggak lagi, susah sekarang mbak..”* (Wawancara dengan Pak RO, Agustus 2015)

Kehilangan akses lahan pribadi merupakan efek penggusuran yang tidak disadari ini terjadi pada Warga KAT Dayak Punan KM 02 Lati. Akses lahan pribadi tidak memiliki batas jelas, setiap keluarga hanya diberi jatah 0,5ha disekitar pekarangan rumah untuk bercocok tanam. Ada

2 Hektar lahan disekitar areal perbukitan di salah satu area wilayah pemukiman warga ditunjuk sebagai calon lahan pertanian padi. Namun sampai saat ini belum terealisasi. Warga dipaksa beradaptasi dengan jalan mengikuti program pemberdayaan agroekonomi melalui pemanfaatan tanaman pekarangan seperti palawija.



Gambar 4.16 (dari Kiri ke Kanan) Lahan garapan warga KAT ketika masih bermukim di Kilometer 10, dan lahan kosong terbengkalai di sebelah rumah warga KAT di Kilometer 02 ( Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Pada areal pemukiman Kilometer 10 warga disediakan lahan garapan dan masih didampingi bantuan penyuluhan untuk bercocok tanam. Saat ini di pemukiman Kilometer 02 lati pun disediakan hal serupa, namun sayangnya warga belum bisa mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut. Alasannya karena warga selalu gagal dalam menanam, tidak ada bantuan bibit maupun pupuk tanaman, mereka mengakui tidak gemar mengkonsumsi sayur –mayur melainkan makanan daging-dagingan. Tidak heran sulitnya mendapat daging buruan atau ikan hasil memancing dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan nutrisi yang seimbang. Padahal pemenuhan nutrisi erat kaitannya dengan kondisi yang tidak sehat

(*morbidity*) dan kematian (*mortality*), sejauh mana kondisi ini pun terjadi tergantung bagaimana resiko utama atas kehilangan lahan (*landlessness*) dan (*joblessness*) secara efektif dapat ditanggulangi (Cernea, 2000;19)

Babi sebagai hewan buruan sekaligus makanan utama orang Dayak sudah sulit untuk ditemui. Program pengembangan ekonomi oleh perusahaan tentang sistem bercocok tanam memanfaatkan lahan pekarangan warga, yang sulit dilakukan warga karena minimnya pendampingan secara intensif. Kehilangan suplai makanan ini terjadi juga akibat proses mengolah lahan yang membutuhkan jangka waktu yang panjang, atau menemukan mode mata pencaharian baru.

*“Kami nunggu jatah sembako dikirim, ‘kan susah sudah kita dapat daging babi. Kalo ada juga kita jual separuhnya kalo ada yang beli. Beras minyak samma mie itu yang buat kita makan sebulan mbak, mana cukuplah. Tapi kita mau apa lagi, mau mancing juga belum tentu dapat, berburu juga sudah susah kalo nggak musim, itupun kalo dapat, Pak lek sayur (penjual sayur keliling) yang biasa lewat itu mahal juga biasanya, mana ada uang kami. Orang nggak kerja..”*  
(Wawancara dengan Bu BN, Juli 2015)

Pada tahun 2004 pemberian sembako dihentikan PT. Berau Coal karena warga dianggap telah mampu menghasilkan pangan padi dengan meniru para warga Sambakungan yang berladang padi, namun dilanjutkan kembali karena program pangan belum berkelanjutan. Salah satu penyebab program pangan belum mampu berkelanjutan adalah anggapan dan ketergantungan warga akan sembako yang menjadi seolah-olah kewajiban perusahaan. Mulanya hal tersebut ditujukan agar warga

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi makan keluarganya dengan lebih mandiri melalui bantuan penyuluh pertanian. Sayangnya kebiasaan hidup dan tata cara hidup dalam lingkungan asli masih mengakar pada kebiasaan pola bertahan hidup Warga KAT Dayak Punan Basap, hal ini justru menyulitkan para penyuluh untuk mendampingi warga. Keadaan ini meningkatkan resiko kronis orang-orang KAT Dayak Punan ke dalam penurunan ketahanan pangan (*Food in security*) keangka minimum pemenuhan gizi seimbang dibawah garis normal, yang didefinisikan Cernea sebagai asupan minimum kalori –protein yang mendekati level bawah, padahal ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan bekerja (2000; 16).

Melemahnyadaya adaptif terhadap lingkungan baru yang dibangun dan dibentuk dalam waktu singkat. Lingkungan tempat tinggal yang terdahulu telah membentuk struktur dan pola mata pencaharian warga sehari-hari, mata pencaharian yang bergantung pada keberadaan hutan dengan hasil floradan faunanya, sungai dengan hasil tagkapan ikannya, yang cenderung tercemar karena aliran limbah tambang.

Perubahan ini memaksa warga untuk tidak lagi terlalu menggantungkan hidup dengan mengandalkan alam sebagai sumber penghidupan utama. Pihak perusahaan menyarankan untuk usaha perdagangan, baik perdagangan hasil buruan warga ke masyarakat perkampungan lain maupun perdagangan sembako. Cernea mengatakan bahwa marjinalisasi bisa saja terjadi ketika keluarga kehilangan kekuatan

ekonomi dan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Pendapatan rumah tangga dasar mereka mejadi pemilik lahan yang lebih kecil; pedagang kecil (2000;18 );hal ini pun yang dilakukan oleh salah seorang warga, membuka warung dagang sederhana di ruang tamu rumahnya. Namun pemasukanya dirasa belum cukup, “sehari paling besar dapat tiga puluh ribu” ujar LN, pemilik warung.



Gambar 4.17 Menjual minuman Es di depan rumah  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Ketika ditanya mengapa keputusan mereka untuk tidak bekerja di Kampung lain. Jawaban mencengangkan mereka diantaranya:

*“gak ada yang mau kalo orang dayak kerja sama mereka, mereka jijik sama kita karena bilangnye kita bau, nggak suka orang Sambakungan (merujuk sebagai kampung terdekat) sama kami, mana berani kami nanti dikata-katai” (Wawancara dengan Bu As, Juni 2015)*

Kesibukan ibu-ibu dan gadis hanya membersihkan rumah, memasak, mengobrol dengan anggota keluarganya yang lain, atau terkadang pergi untuk memancing dengan anak-anak mereka. Sementara laki-laki, jika

tidak musim berburu hanya berada dirumah. Mencari pekerjaan di Kampung pun sulit didapatkan karena persepsi miring warga Kampung.

Hal ini sangat dilematis karena warga telah kehilangan lahan berburu di hutan. Sementara warga tidak terbiasa bekerja pada sektor pertambangan (lihat halaman 91-92, Bab III.) Wilayah sekitar pemukiman memang masih dilingkupi oleh hutan, namun hutan-hutan tersebut merupakan lahan produksi aktif pertambangan PT. Berau Coal. Warga telah jarang mendapatkan hewan hasil buruan dan berkurangnya hasil madu hutan hingga 1.000liter sejak tahun 2000. Demikian pula kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyusuri sungai guna memancing, karena lahan-lahan perburuan tersebut telah memasuki zona terlarang karena adanya kegiatan eksplorasi aktif. Warga kesulitan mencari pekerjaan (*joblessness*), keadaan ini dapat terjadi dalam waktu yang lama setelah pemindahan fisik selesai (Cernea, 2000;13)

Perkembangan perluasan areal tambang menyebabkan ruang gerak suku Dayak Punan Basap di sekitar sungai Lati semakin sempit. Lahan berburu, memancing memanen madu semakin sulit diperoleh. Lahan milik bertanda versi warga Dayak Punan Basap sebagian besar juga telah terkonversi menjadi lahan tambang dan telah beberapa kali menjadi komplain warga terhadap perusahaan. Harapan warga untuk memperoleh kompensasi berupa uang tidak pernah diperoleh.

Kehilangan pekerjaan bagi warga KAT Dayak Punan basap ini ialah kehilangan mata pencaharian turun temurun, kebiasaan dan cara

bertahan hidup melalui berburu. Mata pencaharian mereka teralihkan menjadi buruh kebun merica bagi juragan pemilik perkebunan merica di Kampung Sambakungan. Menjadi buruh kebun untuk lahan-lahan perkebunan merica yang banyak dimiliki oleh warga Kampung Sambakungan. Keadaan ini mendorong ketidakmanidirian warga yang hanya mengharapkan suplai makanan dari PT. Berau Coal. Kesulitan memperoleh suplai daging buruan, karena perpindahan lahan baru mengakibatkan berhentinya sumber pangan utama mereka, dan ini terjadi dalam jangka waktu panjang.

Hingga muncul anggapan yang mayoritas, bahwa warga menyatakan penambangan hanya membawa dampak negatif terutama bagi lingkungan. Ruang gerak di hutan semakin sempit, hewan buruan semakin langka dan jauh dari pemukiman. Begitu pula dengan serangga lebah yang bersarang hanya di pohon banggeris/pohon madu yang harus ditebang karena pertambangan, semakin jauh untuk mendapatkannya. Perusahaan tambang seolah menjadi *common enemy*<sup>18</sup> bagi warga, karena janji-janji kompensasi yang tak terpenuhi secara menyeluruh.

Praktek *blasting*<sup>19</sup> yang dianggap mempengaruhi produksi buah-buah hutan, polusi terhadap sungai-sungai di sekitar tambang yang mempersulit memperoleh tangkapan ikan dan udang. Ada pula beberapa aliran air/ sungai yang ditutup. Banyak warga yang menganggap bahwa

---

<sup>18</sup> Istilah bahasa inggris yang digunakan untuk merujuk istilah negatif bermakna 'musuh khalayak'

<sup>19</sup>Istilah bahasa inggris untuk menggambarkan proses peledakan tanah yang akan dieksplorasi

perusahaan kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan alam yang terjadi yang mereka anggap sebagai tanah adat dan lahan pencaharian mereka. Meskipun bantuan biaya pendidikan yang diberikan hingga jenjang perguruan tinggi untuk anak-anak Warga KAT, namun hal ini tidak dipandang dan dianggap sebagai suatu solusi praktis bagi Warga. Bahkan seperti Keluarga Pak NG dan Pak GN yang masih tinggal di Kilometer 10 Lati, menganggap bahwa pendidikan putra putri mereka tidak sebanding dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

*“Buat apa sekolah kalau Berau Coal sudah tidak ada lagi, paling anak kami paling tidak dibolehkan sekolah sama gurunya kan semua dibayarin Berau Coal. Yang penting kami bisa makan sehari-hari sudah cukup”* (Wawancara dengan Pak GN, Agustus 2015)

Ditambah lagi kasus-kasus yang menghantui, seperti dahulu ketika masih di Kilometer 10 ada kasus beberapa kali anak-anak KAT yang tidak betah dan pulang sendiri ke pemukiman KM 10 dari Tanjung Redeb dengan menggunakan sarana transport air perusahaan, dan bahkan beberapa kali berjalan kaki. Kesiapan mental bukan hanya karena pisah dari orang tua, tetapi ketika tinggal di asrama mereka dihadapkan dengan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan ini merupakan hal baru bagi mereka dan dianggap menyiksa/membebani.

Sikap-sikap pesimistik tersebut ditunjukkan sebabnya yakni ada kecenderungan menurunnya kemampuan bekerja, terbatasnya keahlian, berawal dari kehilangan tempat tinggal termasuk didalamnya kehilangan

lahan mata pencaharian mereka yang utama sesuai dengan pola perilaku lama mereka, dalam konteks pola dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Ditambah dengan anggapan masyarakat luar mengenai identitas ke-Dayak-an mereka yang terasing.

Keadaan saling memarjinalkan ini didukung dengan penyebutan dan stigma terpencil warga Dayak Punan Basap dalam istilah Komunitas Adat Terpencil. Warga Dayak Punan Basap merasa apabila masyarakat luar memandang mereka terpencil, tertinggal dan tidak mampu beradaptasi dalam mata pencaharian masyarakat pada umumnya seperti berdagang, dan pekerjaan domestik. Seperti yang diungkapkan oleh Bu BN mengenai pendapatnya tentang pandangan *miring* warga terhadap anggota komunitas orang Dayak Punan Bassap;

*“Kami ini gak dipercaya, mentang-mentang orang Dayak, be’agama kristen, orang-orang gak mau dekat sama kami mbak. Apalagi yang muslim. Mereka jijik dengan kami karena kami makan babi, susah makannya kalo kami cari kerjaan di kampung. Malas aja kami di olok-olok. Jarang orang kaya mbaknya (mengggunakan Kerudung) ini mau masuk kerumah, makannya kami tidak pernah menawari minum. Palingan mereka duduk diluar,”*(Wawancara dengan Bu BN, Juli 2015)

Pandangan menyudutkan inilah yang sering dialami warga. Bahkan mantan Lurah Kampung Sambakungan Bapak SH (Wawancara Pribadi, Agustus 2015) pernah mengatakan bahwa *“mau bagaimana lagi mbak, mereka memang sulit diatur. Karena latar pendidikannya berbeda dengan*

*kita. Masih terbelakang, jadi jika diberi pekerjaan di kampung juga sulit menyesuaikan”.*

Tidak hanya pandangan dan anggapan marjinal mengenai keberadaan warga Dayak Punan Basaap di Kilometer 02. Akan tetapi selebihnya proses Marjinalisasi ini pun terjadi dengan cara menyingkirkan mereka dari keadaan dan kenyataan hidup mereka secara paksa dan singkat, memaksa mereka untuk menerima cara dan pola hidup baru dengan mengganti kebutuhan dan pola hidup mereka secara paksa. Meskipun ada dalih pembenaran dengan membantu adaptasi dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan, namun pengambilan lahan (*landlessness*) adalah salah satu pendorong besar kegagalan proses pengembangan ekonomi mandiri. Tanpa menggantikannya dengan keadaan yang mirip dan serupa.

Kehilangan akses dan hak atas kepemilikan tanah lagi karena telah terjadi alih fungsi lahan biasanya terjadi pada kaum petani dan peladang. Atau bahkan juga dapat terjadi pada para nelayan dan penangkap ikan, karena sungai telah tercemari limbah. Kehilangan akses dan hak ini kan menurunkan kemampuan kerja bagi para masyarakat yang tidak berbekal kemampuan baru, memulai segalanya dari awal untuk meningkatkan keahlian dalam mendapat pekerjaan yang sesuai dengan model hidup modern. Akibatnya, banyak diantara para pemukim dalam hal ini warga KAT Dayak Punan Basap cenderung menjadi pekerja kasar dan

buruh lepas. Meningkatnya angka kematian dan penyakit di lokasi baru, dapat disebabkan oleh trauma (*morbidity*) pasca-relokasi dan pemindahan secara mendadak atau paksa. Dapat pula disebabkan menurunnya daya adaptif biologis tubuh terhadap lingkungan baru, karena perubahan iklim dan cuaca, berubahnya pasokan makanan dan stress berkepanjangan.

Kecenderungan warga yang justru semakin bergantung pada pihak perusahaan diakibatkan keadaan tersebut. Warga menemukan keadaan ini dalam posisi yang 'nyaman' karena menjadi bagian konsekuensi Perusahaan yang meindahkan mereka ke lokasi baru. Namun tanpa disadari hal ini justru membawa mereka ke arah kondisi yang terpinggirkan (marjinal) baik dala kondisi ekonomi, politik, bahkan identitas sosial-budaya yang dibentuk *sesuka hati* . Tanpa disadari arah keadaan ini menyatakan keterasingan di kampung halamannya sendiri, karena perpindahan paksa atau sekedar di golong-golongkan (Tsing, 1998)

#### **4.2.3 Struktur Sosial yang Tercerai-Berai**

Figur ketokohan memiliki peran yang penting dalam masyarakat suku Dayak Punan Basap. Tanggapan terhadap sesuatu, harapan, keingintahuan warga disampaikan kepada sesepuh kelompok atau pemimpin adat atau orang yang ditokohkan. Pada saat ini, tokoh dominan adalah Ketua RT yang banyak berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat Dayak Punan Basap KAT KM02 Lati. Ada beberapa perubahan dan alih peran dalam kehidupan kultural warga KAT. Diantaranya adalah meredupnya

peran Nenek KG dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan alokasi bantuan pihak PT. Berau Coal ke dalam *Resettlement*. Posisi Ketua RT sangat penting dalam mengatur dan memposisikan diri sebagai penghubung antara warga dengan Pihak Perusahaan. Ilham merupakan orang luar, dan bukan anggota asli Warga KAT Kilometer 02. Saat ini peran Nenek KG dan Suaminya hanya sebatas keputusan internal yang menyangkut keluarga, “*tanya aja IM dikasih apa lagi nenek gak tau, sudah jarang orang comdev datang. Apa-apa yang ngurus si Ham sekarang ini*” jawaban Nenek KG ketika ditanya mengenai bantuan selain sembako yang di beri perusahaan bagi warga KAT.

Hal ini berbanding terbalik seperti saat di Kilometer 10 Lati dimana peran Nenek KG masih dominan dalam pengambilan keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperoleh dari bantuan pemberdayaan PT. Berau Coal. Bersama tiga orang anaknya, Pak SD, Pak Bo dan Pak RO menjalankan legitimasi Nenek KG terhadap perlakuan PT. Berau Coal mengenai keberlangsungan komunitas mereka. Kebetulan saat itu hanya Pak SD yang bisa baca-tulis dipasrahi wewenang dalam menangani komunikasi oral dengan pihak perusahaan atau pihak luar. Sedangkan Pak RO dan Pak BO menyampaikan berbagai komunikasi yang telah diteruskan kepada Nenek KG terlebih dahulu dengan memanfaatkan kedekatan mereka terhadap warga lainnya.

Tahun 2014 masa pemilihan Ketua RT IM terpilih menggantikan Pak SD yang Sebelumnya menjabat selama setahun sejak *Resettlement* Kilometer 02 Lati diresmikan tahun 2013. Ia mengalami kenaikan jabatan dan dipercaya untuk ‘menjaga’ anak-anak siswa sekolah yang menempuh sekolahnya di Kecamatan Tanjung Redeb. Dibawah naungan Asrama KAT, Pak SD diserahi amanah untuk mengurus dan mengembangkan pembelajaran anak-anak KAT selama bersekolah.

Kesibukannya tidak hanya menjaga dan mmengasuh anak-anak Asrama KAT. Melainkan juga membangun jaringan kepemimpinan dengan berbagai perhimpunan dayak di Berau. Alasannya untuk kemajuan Warga KAT Dayak Punan Basap Kilometer 02 Lati sendiri, padahal sejauh ini warga tidak ada yang mengakui adanya perhatian nyata dari perhimpunan Dayak untuk peningkatan kesejahteraan atau bantuan pendampingan sosial mereka. Disamping Pak SD yang merupakan orang asli keturunan Keluarga Nenek KG , masih ada dua orang lagi yang mengambil alih peran pemimpin komunitas ini, Yakni Pak HDA dan Pak IDR.

Pak HDA Menikahi LN, Cucu Nenek KG dengan ini mengambil posisi informalnya di tengah keluarga Pak KG dan Nenek KG . Demikian pula pernikahan Pak IDR (asal Bulungan) dengan bu Mada. Pak HDA merupakan mantan Kaur Pemerintahan Kampung Sambakungan, sebagai pendatang dari luarmenurut Nenek KG , Pak HDA dianggap menaruh

kepentingan pribadinya dalam memanfaatkan keberadaan program pemukiman. Keinginan berkuasa lainnya yang diduga oleh warga yakni Pak IDR, “*Dia menguasai sendiri kolamnya itu, dimakan habis ikannya mbak, karena dia nikahi keluarga kita (keturunan Nenek KG ) aja kita biarkan(dimaklumi) orang itu..*” ungkap Bu BN dengan sengit ketika ditanyai perihal pemanfaatan Kolam.

Pak IM, Pak HDA, dan Pak IDR adalah para pendatang dari dari luar anggota Kilometer 02 Lati. Ketiganya mengambil alih peran yang dulu terangkum menjadi satu dalam kepemimpinan Nenek KG . Sebelumnya ada Pak SD yang memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk menyetir segala kebutuhan Warga KAT. Setelah tidak terpilih menjadi Ketua RT lagi ia meninggalkan lokasi pemukiman dan tinggal di Asrama KAT, sekaligus aktif dalam organisasi dan menjabat sebagai Kepala Suku Dayak Punan Se-Kabupaten Berau 2014. Sejak ditinggal oleh Pak SD, peran Nenek KG sebagai tetua semakin memudar, seiring pula semakin jarang frekuensi pertemuan kontak mereka dengan pihak perusahaan yang lambat laun meninggalkan mereka dalam hidup kemandirian. Peralihan-peralihan kekuasaan ini merupakan efek terselubung dari Program *Resettlement*. Dimana pemindahan telah paksa merusak jaringan sosial yang ada. Masyarakat yang rapuh dan terfragmentasi, pola ikatan interpersonal dan organisasi sosial yang tersamar; kekerabatan dalam kelompok menjadi tercerai-berai (Cernea, 20; 2000).

Pada Bab II dalam Sub Bab penggambaran warga KAT Kakek & Nenek KG disebutkan sebagai tetua informal yang memegang kendali dalam urusan domestik keluarga luas mereka. Seperti penamaan bayi atau bidan tradisional. Seiring usinya yang semakin lanjut, peran ini diturunkan kepada Bu SA (Istri Pak IM ) sebagai bidan. Namun bidan tradisional ini juga tidak aktif lagi memainkan perannya ketika ada proses kelahiran di antara ibu-ibu. Karena telah diambil alih oleh Bidan Puskesmas Kampung.

*“...aku dulu waktu melahirkan ditolongin Mamak ku ‘Njar (Peneliti), bentar aja diurus sendiri, gak sampai setengah hari aku sudah bisa jalan-jalan (berjalan), gak di larang ini itu kaya (seperti) Bu Bidan, Bu Bidan N datang pas sudah selesai semua.. paling dia kontrol aja seminggu sekali, si Oliv (kelahiran adik) itu yang ditolongin Bu Bidan N, lamanya Mamakku gak boleh ini itu (melakukan sesuatu yang berat), itu susahnya sama Bidan, padahal kadang ditelepon belum tentu datang”*(Wawancara dengan ST, Juni 2015)

Di satu sisi para Bidan yang menangani warga KAT ini juga kesulitan mengakses ketika hendak melakukan pelayanan kesehatan atau kondisi gawat. Sesampainya ditempat ternyata keluhan sakit yang diderita bukan keadaan gawat, seperti yang dikisahkan oleh Bidan N ketika ia masih ditugaskan di Puskesmas Kampung Sambakungan sampai tahun 2013 dan sempat mengurus orang-orang KAT Dayak Punan Bassap ketika di Kilometer 10,

*“pernah dulu waktu malam saya ditelepon orang kantor (Comdev) ngasih tau ada warga sakit di dalam, kami masuk tengah malam. Mana jalannya belum seperti sekarang ini, dulu kami lewat sungai kecil, jalan kaki lagi masuk ke Kilo 10-nya. Kami takut sudah karena bilangngya parah Nenek*

*sakitnya, sekalnya pas sampai sana, kami cari Neneknya mana terbaring kah, pingsankah atau bagaimana. Rupanya dia duduk-duduk dibelakang pondoknya lagi makan, ternyata kata anak-anaknya Nenek tadi merasa ada yang sakit diperutnya.” (Wawancara dengan BidanN, Juni 2015)*

Keadaan ini menunjukkan ilustrasi bahwa sebagai pelayan kesehatan pun dapat mengalami guncangan budaya ketika berhadapan dengan warga KAT. Bentuk konsekuensi yang harus diadapi dalam menyesuaikan kultur dan pemahaman warga KAT terhadap wawasan penyakit dan kesehatan. Adanya silang kebutuhan, membuat disartikulasi sosial yang juga disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian informasi, kondisi geografis dan alam, sehingga warga menuntut bantuan Pelayanan Kesehatan ini bagai layaknya bentuk kompensasi yang wajib akibat pemindahan, yang dinilai sebagai keharusan diterima tanpa ada penyesuaian hak-hak individu orang lain.

Pemaksaan, minimnya pengertian dan toleransi sosial, muncul karena pemindahanyang dilakukan secara cepat dan terpaksa oleh warga yang merasa menjadi pusat perhatian karena terkena dampak program relokasi. Munculnya stress sosial dan trauma psikologis bisa disebabkan oleh lingkungan baru yang menjadi tempat relokasi dan dapat menimbulkan penyakit (Cernea, 2000;17) dan kesehatan. Trauma dan stress sosial ini cenderung tidak nampak, wujudnya dapat berupa respon penolakan, ungkapan-ungkapan kekecewaan akibat ketidaksesuaian harapan hidup yang diberikan oleh pihak perusahaan sebagai kompensasi.

Kasus *pemotongan pipa air* (lihat halaman 107) oleh warga merupakan salah satu contoh bentuk trauma sosial yang dihadapi oleh para pemukim. Bentuk respon stress sosial warga KAT Dayak Punan Basap antara lain;

*“Stress kita disini mbak, kalau ditanya bahagia atau enggak, jawabannya enggak. Nggak ada orang yang bahagia hidup sulit air, biar kita dibilang orang hutan .. kita jugamanusia butuh air,hewan aja mati gak dikasih air,”*(Wawancara dengan Bu BN, Juni 2015)

Pandangan Bu BN yang mengeluhkan sulitnya sumber air yang permanen ini juga di benarkan dengan beberapa warga lainyang juga mengungkapkan hal serupa.



Gambar 4.18 Keadaan Sekitar rumah  
(sumber: Dokumentasi Pribadi)

*“Ngapain kita capek-capek ngambilin sampah, ngurusin rumah, mereka (Pihak PT. Berau Coal) yang nyuruh kita pindah kesini (Kilometer 02), yang penting itu air (sumber air) mana ada diurusin”* (Wawancara dengan Bu SD, Agustus 2015)

Bagi Warga KAT kebutuhan sumber air lebih krusial dibanding pola hidup sehat. Himbauan-himbauan kesehatan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait tidak sematadipraktekan oleh warga, melainkan hanya ketika ada pemberitahuan kedatangan atau kunjungan pihak tertentu ke pemukiman mereka. Gejala ini menunjukkan bahwa ada akibat yang bisa ditimbulkan dari tekanan sosial atau trauma sosial yang terjadi dikalangan warga. Warga kesulitan menerima dan memahami sistem baru yang coba diperkenalkan oleh pihak perusahaan sebagai pelaksana program pemberdayaan. Salah satunya adalah mengenai pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak IM berikut ini “ *Mana mau orang sini jaga kebersihan, biar kata orang Comdev perlu dikasih contoh dulu sama pak Pendeta atau saya, tetap aja mana ada yang ngikutin.*” Warga KAT telah diberi bantuan berupa sarana kebersihan seperti tong sampah, namun kesadaran warga akan pola hidup sehat masih belum bisa mandiri. Keadaan ini juga bisa di dorong akibat persepsi berbeda yang dipahami oleh orang Dayak Punan Basap mengenai kebersihan dan masalah sampah. Dahulu ketika terbiasa tinggal di lingkungan hutan, dan masih jarang melakukan kontak langsung dengan warga luar, warga diperkirakan tidak terlalu mengenal produk-produk organik, warga hanya mengandalkan bahan-bahan yang datang dari alam.

Namun saat ini setelah program CSR di terapkan secara kontinyu, arahan dan bimbingan oleh para penyuluh kesehatan, warga dihimbau untuk

mengikuti sistem dan program kesehatan yang dinilai standar. Proses ini bisa mendorong guncangan budaya bagi diri warga Dayak Punan Basap ke arah keterikatan, mengurangi ruang gerak mereka, bentuk resistensi berupa ungkapan penolakan, tindakan yang tidak sesuai dengan sistem yang diberlakukan pihak-pihak perusahaan, mendorong timbulnya ketidakteraturan sistem dimata pelaksana program (pihak perusahaan dan *stakeholder* terkait). Tidak mengherankan jika pandangan *diskriminasi* justru malah diarahkan ke warga Dayak Punan Basap yang dianggap sulit mengikuti program . Misal seperti yang diungkapkan oleh bapak SG berikut ini ketika menanggapi kisah *pemotongan pipa* yang pernah dilakukan warga;

*“iya pernah dengar cerita itu, bukan jaman saya mba, orang yang sebelum saya, masih kawal juga. Orang begitu itu 'kan gak mau tau alasan kita, mana tau disini hujan gak bisa masuk ke dalam, atau gak ada bensin, mana peduli mereka. Kalo saya maklum aja kondisinya begitu, namanya aja 'orang hutan'. Komunikasinya beda sama kita, kalau saya menghadapi mereka sabar aja mbak, paham aja sudah sama kelakuannya, yang penting omongannya jangan dimasukkan hati”*(Wawancara dengan Pak SG, Juni 2015)

Kata ‘orang hutan’ dalam perakapan antara peneliti dan informan diinterpretasi memiliki keiripan makna dengan *orang udik, orang yang lama tinggal di hutan, orang terpencil*. Pandangan ini merupakan salah satu bukti persepsi diskriminatif yang menganggap warga KAT Dayak Punan Basap sulit memahami alur komunikasi, memahami tingkah laku orang lain

dan sulit menjadi bagian dari sistem yang teratur dan modern seperti sistem berjalannya program tertentu. Pihak luar mestinya menyadari celah *culture lag* warga, sehingga kesabaran dan pengertian perlu diberikan dalam mendampingi warga.

Kondisi demikian membutuhkan pelayanan dan pendampingan berkelanjutan yang lebih konsisten. Serta didapatinya keadaan stress sosial juga merupakan konsekuensi yang pasti melekat akibat pemindahan, berbeda dengan kemungkinan terjangkitnya penyakit-penyakit endemik yang bisa diatasi melalui perawatan dan layanan kesehatan medik. Kondisi stress sosial ini bisa berdampak mendalam terhadap pola adaptif warga yang resistan terhadap anjuran maupun bantuan penyesuaian pola hidup di lingkungan baru, Padahal peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan, hidup teratur maupun kesehatan, sangat bergantung pada keterbukaan pola pikir warga.

## BAB V

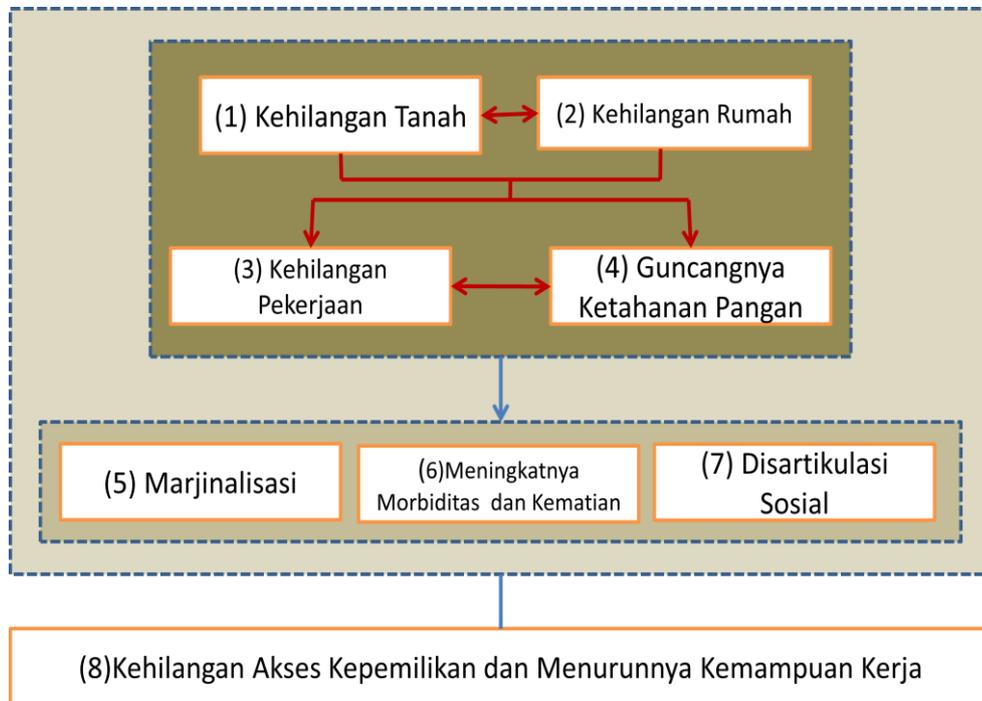
### HARAPAN DI MASA DEPAN

#### 5.1 Kesimpulan

Program *Resettlement* dan relokasi yang dilakukan PT. Berau Coal sejak 2001 bagi Warga Komunitas Adat Terpencil dari Kilometer 10 hingga dimukimkan secara tetap di Kilometer 02 Lati, menunjukkan adanya ketergantungan warga yang cukup tinggi terhadap perusahaan. Harapan warga terhadap perusahaan begitu tinggi sehingga ketika harapan itu tidak tercapai, menjadi luka sosial tersendiri bagi warga. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidakteraturan sosial berupa ketimpangan sosial, pergeseran dan benturan akibat perebutan aset-aset ekonomi, sosial, alam dan politik dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Berdasarkan strategi pendekatan Michael Cernea (2000) tentang pengamatan resiko yang terjadi di dalam suatu pemukiman *Resettlement* melalui delapan aspek yang telah dikemukakan (pada Bab IV). Program *Resettlement* KAT Dayak Punan Basap di Kilometer 02 ini teridentifikasi mengalami delapan resiko tersebut. Baik kehilangan lahan (*landlessness*) karena ada alih fungsi dan pergeseran tempat tinggal (*homelessness*) ke lokasi baru. Kemudian diukimkan dengan rumah dan fasilitas tambahan. Bergesernya lahan, berkurangnya lahan menyebabkan Warga KAT Dayak Punan Basap kesulitan melakukan mata pencaharian (*joblessness*)

yang biasa mereka lakukan seperti berburu dan memancing akibat berubahnya alih kepemilikan lahan (status lahan konsesi pertambangan).



**Keterangan :**

: Resiko-resiko pemiskinan

: (a) Dampak resiko yang paling dominan terjadi dalam komunitas

: (b) Dampak resiko yang terjadi akibat Dominasi resiko(c)

: (c) Dampak resiko yang saling mempengaruhi satu sama lain

: Resiko jangka panjang akibat terjadinya resiko sebelumnya

→ : Pengaruh dominan terhadap kemunculan resiko lainnya

↔ : kemunculan salah satunya bisa saling memberikan pengaruh

→ : akibat resiko yang terjadi setelah resiko dominan muncul

Tabel 4.4 Matriks Alur Resiko Pemiskinan warga Km 02 Lati (sumber: olah data hasil penelitian)

Ketiga aspek tersebut menyebabkan juga terjadi resiko lain yang biasa terjadi akibat pasca-relokasi seperti kesulitan menemukan sumber pangan (misal daging Babi, Ikan, dan hewan buruan lainnya) yang teridentifikasi sebagai menurunnya ketahanan pangan (*food insecurity*), keadaan ini berbanding lurus dengan resiko minimnya asupan nutrisi dan gizi yang seimbang sehingga dapat menyebabkan meningkatnya trauma dan luka sosial bahkan kematian (*increased morbidity and mortality*) bagi Warga KAT.

Secara tersirat terjadi pula hubungan marjinalisasi dan disartikulasi sosial (*marjinalization and social disarticulation*) dalam kehidupan Warga KAT, jika dicermati pada faktor-faktor yang saling terkait disebutkan sebelumnya. Keterkaitan tersebut menimbulkan dampak berubahnya peran dan fungsi dalam struktur sosial dan pranata sosial warga KAT Dayak Punan Basap. Seperti pada kasus alih peran tetua adat kepada anggota warga lainnya akibat terbatasnya kemampuan olah komunikasi dalam menanggapi isu-isu perpindahan. Misal kasus lainnya adalah minimnya kesadaran pola hidup sehat dan wawasan kesehatan warga KAT, sehingga menimbulkan ketersinggungan kontak dan interaksi sosial ketika berhadapan dengan para pelayan kesehatan masyarakat.

Perpindahan paksa dari tempat tinggal sebelumnya berdampak pada kesulitan memperoleh pekerjaan, hingga efek resiko menurunnya kemampuan mencukupi kebutuhan pangan keluarga bagi kaum terpinggir, kehilangan lahan dan aset pehidupan, harta benda (seperti

lahan tanam, hutan, sumber air, lahan pemakaman, buruan, dan lain-lain) ketika pasca-relokasi ialah hasil dari kemunduran pendapatan dan menurunnya tingkat mata pencaharian (Mathur, 1998; Mahapatra, 1999; dalam Cernea, 2000). Kehilangan terhadap akses sektor-sektor ekonomi bagi Warga Komunitas Adat Terpencil seperti itu di rumuskan sebagai resiko terbesar dan terjadi dalam waktu jangka panjang dalam kehilangan kepemilikan properti dan menurunnya kemampuan bekerja (*Loss of Access to Common Property and Services.*)

## 5.2 Saran

Analisis identifikasi faktor-faktor dampak resiko hasil pemindahan oleh Cernea (2000) tersebut dapat di tanggulangi dengan jalan membangun ulang kehidupan baru bagi warga KAT Dayak Punan Basap Kilometer 02 menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini secara khusus mempertimbangkan pandangan warga Dayak Punan Basap dalam memaknai keberadaan sungai dan hutan. Dalam kehidupan Warga Komunitas Adat terpencil dayak Punan pengaruh paling kuat didominasi oleh resiko kehilangan tanah, tingkat resiko teratas ini menjadi akar dari seluruh terjadinya resiko lainnya. Sehingga untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya 7 (tujuh) resiko lainnya, resiko 1 (kehilangan tanah) perlu dihindari. Apabila telah terjadi maka solusi rekonstruksi merupakan cara yang efektif untuk membantu proses penanggulangan keadaan pasca relokasi. Sebagaimana saran Cernea (2000) tentang merubah *kehilangan lahan* menjadi *menghidupkan kembali lahan rekonstruksi asli (habitat asli.)*

Langkah ini bisa dilakukan dengan jalan membangun suasana yang mirip dengan lingkungan asli orang Dayak Punan Basap, yakni dengan membangun fasilitas sumber air yang memadai, lebih mungkin apabila dibangun sumber air dengan model aliran air mirip sungai. Perumahan untuk pemukim (Warga KAT Dayak Punan Basap) dibuat berdasarkan kebutuhan warga. Dalam hal ini program CSR PT. Berau Coal telah memberi bangunan fisik rumah beserta fasilitasnya dinilai cukup memadai (lihat halaman 77 pada BAB III.) Namun usaha bantuan pemberdayaan tidak berhenti sampai disitu melainkan warga memerlukan pendamping sosial yang mampu serius dalam mendampingi warga dalam jangka waktu panjang.

Lingkungan sosial warga harusnya lebih diperhatikan dengan menyesuaikan kebiasaan dan pola pikir warga, sehingga warga terbuka dalam menyesuaikan pengetahuan baru dari masyarakat luar. Para pendamping sosial yang cakap dan mampu memahami benar kebutuhan warga secara sosial dan budaya, dapat membantu warga dalam mengolah pemikiran, tindakan untuk bertahan hidup dikondisi baru. Oleh karena itu, pendampingan sosial yang konsisten dan berkelanjutan penting dilakukan untuk mengantar masyarakat ke arah keterbukaan pola pikir, dan kemampuan adaptasi mandiri.

Misalnya pendampingan berupa bantuan petugas penyuluh pertanian dan program pendampingan yang teregulasi dengan baik dalam jangka panjang. Seperti tersedianya penyuluh tetap yang bersedia mendampingi warga dalam memberikan contoh-contoh stimulan tentang bercocok

tanam atau kegiatan berdaya lain seperti pengelolaan ikan air tawar dan beternak yang tentunya disesuaikan dengan dasar pola pikir dan tindakan warga Dayak Punan dalam memaknai sistem berburu atau memancing dalam kebudayaan mereka.

Pendampingan ekonomi lainnya seperti prakatek ekonomi mikro dengan jalan memanfaatkan hasil hutan seperti rotan dan madu. HA ini sudah dilakukan beberapa warga yang bisa membuat Tas anyaman rotan. Melalui pendampingan yang serius dalam bidang pemasaran dan distribusi, maka kerajinan seperti ini bisa menjadi solusi lain yang dapat membantu perekonomian masing-masing keluarga, pendampingan dan pelatihan membuat kerajinan dari rotan atau mengolah produk madu menjadi produk yang memiliki nilai guna yang lebih besar. Sehingga Warga dapat memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang menjadi modal dasar pengembangan ekonomi kreatif secara mandiri.

Singkat kata, warga Dayak Punan Basap lebih membutuhkan pendampingan sosial yang konsisten dan terarah. Dimana pendampingan sosial ini bertujuan membantu masyarakat untuk menyesuaikan pola pikir dan kebiasaan (budaya) dengan program-program pemerintah atau *stakeholder* terkait. Penyesuaian inilah yang dibutuhkan warga Dayak Punan Basap dalam proses perlahan menerima dan menjalankan bantuan program CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Cernea**, Michael M. (2000). *Impoverishment Risks, Risk Management, and Reconstruction: A Model of Population Displacement and Resettlement*” M.M Cernea & C.Mc.Dowell (Ed.) Risk and Construction: Experiences of Settlers and Refugees. USA: George Washington University
- Darmanto**, Setyowati, Abidah B. (2012). *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fakih**, Mansour. Dkk.,(2004). *Membongkar Proyek-proyek Ornop*. Yogyakarta: insist press.
- Kartika**, Sandra. Dkk, (1999). *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kirom**, Aminnudin A. Dkk., (2006). *Tambang & Penghancuran Lingkungan*. Jakarta Selatan: jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- Levang**, Patricce. (2003). *Ayo ke Tanah Sebrang (Transmigrasi di Indonesia)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Levang**, Patricce., Dkk. (2004). *Potret Punan Kaliantan Timur: Sensus Punan 2002-2003*. Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Li**, Tania Murray. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Li, Tania Murray.** (2012). *The Will To Improve*. Jakarta Pusat: Marjin Kiri.
- Maimunah, Siti.** (2012). *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*. Malang: Intrans Publishing.
- Maunati, Yekti.** (2004). *Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan)*. Yogyakarta: Lkis.
- Nash, June.** (1979). *We Eat Mines and The Mines Eat Us; Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines*. New York : Colombia University Press.
- NN. ()**. *The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research*. Washington DC: DHEW Publication No. (OS) 78-0014.
- Rudito, Bambang.** (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Penerbit Rekaya Sains.
- Salim.** (2012). *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Jarkata: Sinar Grafika.
- Tsing, Anna Lowenhaupt.** (1998). *Dibawah Bayang-Bayang Ratu Intan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yin. Robert K.** (2014). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

#### **DISERTASI :**

- Dung, Pham Van.** (2013). *Resettlement And Conflict Resolution: A Case Study Of H'mong And Khmu Ethnic Groups In D Ensavang And Phonsavat*

Villages, Luang Prabang District, Luang P Rabang Province, Laos  
PDR. Laos: The University of Waikato

**Jehom**, Welyne Jeffrey. (2008). *“Development and displacement: Kenyah-Badeng in Bakun Resettlement Malaysia.*Malaysia: Wilhelm University.

**SKRIPSI :**

**.Yulianti**, Yeni. (2013). *Pengaruh Program Corporate Social Responcibility PT.Pusri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan 3 Ilir Palembang.* Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Univeristas Sriwijaya.

**JURNAL :**

**Cernea**, Michael M. (2003). *For a new economics of Resettlement: a sociological critique of the compensation principle”.* International Social Science Journal. March 2003, Vol.175, 37-46.

**Liswanti**, Nining. Dkk,. (2004). *Persepsi Masyarakat Dayak Merap Dan Punan Tentang Pentingnya Hutan Di Lansekap Hutan Tropis, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timu.* Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. X No. 2 : 1-13

**Vesalon**, Lucian., Crețan, Reus. (2012). *Development-Induced Displacement In Romania: The Case Of Roșia Montană Mining Project.* Urban and Regional Analysis Journal Vol. IV .63-75

**MAJALAH:**

- NN. (2010). “Identifikasi Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Punan di Sungai Lati” (Data Laporan). Berau: Departemen Community Development PT. Berau Coal
- NN. (2012). Laporan Berkelanjutan Tahun 2011-2012 (Berbagi Harapan dan Masa Depan (Sharing Hopes and The Futures). Berau: PT. Berau Coal.
- NN. (2013). Kekuatan dalam Keseimbangan (Berau Magz Edisi 07). Berau: PT. Berau Coal
- NN. (2013). Company Profile 2013 (Strategy For The Brighter Future). Berau: PT. Berau Coal
- NN. (2014). *Lanug Pahatan* (Profil Kabupaten Berau tahun 2014). Berau: Protokol Kabupaten Berau, Bagian Pelayanan dan Bina Media.

**ARSIP PEMERINTAHAN:**

- BAPPENAS. (2004). *Perbandingan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dan Program Pengembangan Wilayah Terpadu*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.
- NN. (2014). *Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2014*. Berau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

**LAMAN INTERNET :**

kemenkopmk.go.id/25 Januari 2013 (di akses tanggal 6 Februari 2015) Lampiran

### Lampiran 1

#### Daftar Nama Warga KAT Dayak Punan(Sumber: Yayasan Dharma Bhakti Bidang Lingkungan Budaya, Diolah Peneliti)

NO	NAMA	STATUS	U	PROFESI	RUMAH	KET
1	Pak Puluk	Kepala K	40	Petani	KM 02	
2	Halimah	Istri	29		KM 02	
3	Bus	Anak	11		KM 02	
4	Dadung	Anak	8		KM 02	
5	Iela	Anak	6		KM 02	
6	Aldo	Anak	5		KM 02	
7	Kiwit	Kepala K	50	Petani	KM 02	
8	Tirin	Istri	40		KM 02	
9	Kayul	Anak	10		KM 02	
10	Roni	Anak			KM 02	
11	Ridho	Anak			KM 02	
12	Yosep	Kepala K	42	Petani	KM 02	
13	Berlian	Istri	35		KM 02	
14	Ferdy	Anak	7		KM 02	
15	Ester angel	Anak	5		KM 02	
16	Roy	Kepala K	35	Petani	KM 02	
17	Sadai	Istri	45		KM 02	
18	Novi	Anak	10		KM 02	
19	Reihan	Anak			KM 02	
20	Erna	Anak			KM 02	
21	Jahri	Kepala K		Petani	KM 02	

23	Tuti	Istri	23		KM 02	
24	Wirat	Anak	8		KM 02	
25	Fitri	Anak			KM 02	
26	Wahyu	Anak			KM 02	
27	P. Nawang	Kepala K		Petani	KM 10	
28	Unyil	Istri			KM 10	
29	Kasih	Anak			KM 10	
30	Arjuna	Anak			KM 10	
31	Ancen	Kepala K		Petani	KM 02	
32	Anis	Istri			KM 02	
33	Bunga	Anak			KM 02	
34	Baok	Kepala K	40	Petani	KM 02	
35	As	Istri	30		KM 02	
36	Thomas	Anak	11		KM 02	
37	jimmy	Anak	18		KM 02	
38	Tony	Anak	15		KM 02	
39	Pak pendeta	Kepala K	46	Wiraswasta	KM 02	Pendatang
40	Bu gembala	Istri	35		KM 02	
41	Joy	Anak	4		KM 02	
42	Noel		0			
43	Pak Gani	Kepala K		Petani	KM 10	Pendatang
44	Maria	Istri			KM 10	
45	Nenek Las	Ibu			KM 10	
46	Ratna	Anak			KM 10	
47	Pak Kasung	Kepala K	84	Petani	KM 02	

48	Timbu	Istri	65		KM 02	
49	Samsudin	Kepala K	50	Petani	KM 02	
50	Fatma	Istri	45		KM 02	
51	Rusdi	Anak	19		KM 02	
52	Hendri	Anak	1		KM 02	
53	Maria	Anak	15		KM 02	
54	Bacok	Kepala K		Petani	KM 02	
55	Fitri	Istri			KM 02	
56	Rudi	Kepala K	17	Petani	KM 02	Asal KM 16
57	Sanah	Istri	17		KM 02	
58	Rara S	Anak			KM 02	Meninggal
59	Pak IM	Kepala K	25	Petani	KM 02	Ketua RT
60	Sena	Istri	28		KM 02	
61	Olivia	Anak	6		KM 02	
62	Herman	Kepala K	40	Petani	KM 02	Asal KM 16
63	Mudap	Istri	35		KM 02	
64	Saad	Kepala K	42	Wiraswasta	Tg. Redeb	Pengawas Asrama KAT
65	Lilis	Istri	31		Tg. Redeb	Asal KM 16
66	Rico	Anak	24		Tg. Redeb	
67	Rizal	Anak	21		Tg. Redeb	
68	Rena	Anak	19		Tg. Redeb	
69	Kristian	Anak	8		Tg. Redeb	
70	Desi	Anak	16		Tg. Redeb	
71	Jumiati	Anak	12		Tg. Redeb	

72	Jamli	Anak	19		Tg. Redeb	
73	Amsal	Anak	22	Petani	KM 02	Asal KM 16
74	Santi	Anak	8		KM 02	
75	Angel	Anak	5		KM 02	
76	Salim	Kepala K	42	Petani	KM 02	Asal KM 16
77	Soley	Istri	22		KM 02	
78	Susi	Anak	8		KM 02	
79	Boy	Anak	5		KM 02	
80	Hadada	Kepala K		Karyawan	KM 02	Asal KM 16
81	LN	Istri	21		KM 02	
82	Doni	Anak	3		KM 02	
83	Rasti	Anak	1		KM 02	
84	Iskandar	Kepala K	50	Karyawan	KM 02	Asal KM 16
85	Saonah	Istri	30		KM 02	
86	Jaya	Anak			KM 02	
87	Reno	Anak			KM 02	

## Lampiran 2

### Daftar Pemilik dan Kondisi Bangunan Resettlement

(Sumber: Data Dharma Bhakti Bidang Lingkungan Budaya, diolah Peneliti)

No	Nomor rumah	Nama pemilik	Keadaan Rumah	Keterangan
1	B.3	Saad	Layak Huni	Ditempati Pasangan Santi dan Amsal
2	B.4	Riko	Layak Huni	Sudah di tempati
3	B.5	Nawang	Layak Huni	Sudah ditempati oleh pak majai.
4	B.6	Anis	Layak Huni	Sudah di tempati
5	B.7	Alm.Darwin	Layak Huni	Sudah di tempati oleh pak iskandar.
6	B.8	Puluk	Layak Huni	Sudah di tempati
7	B.9	Kiwit	Layak Huni	Ditempati oleh Soley dan Suami
8	A.3	Sena	Layak Huni	Sudah di tempati
9	A.4	Rudi	Layak Huni	Sudah di tempati
10	A.5	Jahri	Layak Huni	Sudah di tempati
11	A.6	LN	Layak Huni	Sudah di tempati
12	A.7	Baok	Layak Huni	Sudah di tempati
13	A.8	Yosep	Layak Huni	Sudah di tempati
14	A.9	Samsudin	Layak Huni	Sudah di tempati
15	A.10	Roy	Layak Huni	Sudah di tempati
16	A.11	Nenek timbu	Layak Huni	Sudah di tempati
17	A.12	Baco'	Layak Huni	Sudah di tempati
18	A.13	Mudap	Layak Huni	Sudah di tempati

**Lampiran 3**

**KALENDER AKTIVITAS WARGA KAT KM 02 LATI TAHUN 2014**

Sumber: Olah data Peneliti (Data awal Sekunder: Data Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal tahun 2010)

Aktivitas	Bulan											
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret
Menebas Lahan	Green	Green	Green	Green								
Menumbang Lahan					Green							
Membakar Lahan						Green						
Menanam Padi						Red						
Panen Padi												Red
Panen Buah Hutan										Orange	Orange	Orange
Panen Madu						Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	
Memancing	Green											
Berburu	Orange											
Mencari Gaharu	Pink	Pink	Pink	Pink								

**Keterangan:**

Red	tidak dilakukan lagi
Pink	Nyaris sulit dilakukan
Green	masih sering dilakukan
Orange	jarang untuk dilakukan

**Lampiran 4****DATA PRIBADI**

**Nama Lengkap** : Anjar Wahyu Ning Tyas

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 1 Januari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat (Domisili) : Jl. Bukit Maritam RT 30, Kel. Tanjung Redeb,  
Kec.Tanjung Redeb, Berau-Kalimantan Timur

No. Telp. Seluler : 085247651035

Email : anjarwntyas@gmail.com

Status : Menikah

**Klasifikasi****1. Latar Belakang Pendidikan**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Nama dan Alamat Sekolah</b>	<b>Tahun Ajaran</b>	<b>Jurusan</b>
Sekolah Dasar (SD)	SDN 005 Kelay	1999-2004	-
	SDN 008 Tg Redeb	2005	
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	MTS Negeri Tanjung Redeb	2005-2008	-
Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMAN 4 BERAU	2008-2011	Bahasa

Pendidikan Tingkat Lanjut	Universitas Brawijaya Malang	2011-2015	Antropologi Sosial
---------------------------	------------------------------	-----------	--------------------

## 2. Pengalaman Organisasi

- a. Sekertaris Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya masa Jabatan 2011-2012
- b. Sekertaris Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya masa Jabatan 2012-2013
- c. Menteri (Ketua) Departemen Seni Budaya Badan Eksekutif Mahasiswa 2013
- d. *Sharing Comitee* Organisasi Himpunan Mahasiswa Antropologi Brawijaya (HIMANTARA) tahun 2014

## 3. Pengalaman Kepanitiaan

- a. Ketua Panitia *Student Day* Antropologi tahun 2012 Fakultas Ilmu Budaya
- b. Sekertaris Panitia Inisiasi Antropologi tahun 2012
- c. Ketua Acara Festival Seni Budaya “NIDAYAKU” Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2013
- d. *Sharing Comitee* Panitia Seniman Punya Cerita Tahun 2013

## 4. Pengalaman Kerja

- a. Pengajar pada Lembaga Bimbel Insan Madani tahun 2013
- b. Observer pada Lembaga Survey Media Nusantara Citra (MNC) : Quick Count Pilgub Wilayah Jawa Timur Survey Pra Pemilu tahun 2013, Daerah Pemilihan Kabupaten Malang Kecamatan Singosari

- c. Observer pada Lembaga Survey Indonesia Research Centre (IRC) : Quick Count Pileg Jawa Timur Survey Pemilu tahun 2014, Daerah Pemilihan Kabupaten Malang Selatan Kecamatan Turen
  - d. Pengajar pada Lembaga Bimbel LOGOS MAXIMA sejak tahun 2014
5. Pengalaman Penelitian
- a. Peneliti pada Penelitian tahun 2012 di Kabupaten Malang Selatan, Kecamatan Gondanglegi, Desa Ganjaran tentang Kesehatan Reproduksi dan Gender
  - b. Peneliti pada Penelitian tahun 2013 di Lamongan, Kecamatan Deket, Desa Kebon Tengah tentang *Stakeholder*
  - c. Peneliti pada Proyek Penelitian Dosen di Desa Mojoagung, Jombang tentang Kesenian Wayang

Malang, Januari 2016

**Anjar Wahyu Ning Tyas**  
**NIM. 115110801111019**

**Lampiran 5****Berita Acara Bimbingan Skripsi**

1. Nama : Anjar Wahyu Ning Tyas
2. NIM : 115110801111019
3. Program Studi : Antropologi
4. Topik Skripsi : Antropologi – Antropologi Pembangunan
5. Judul Skripsi : Implikasi Program *Resettlement* PT. Berau Coal terhadap Kehidupan Sosio Kultural Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan di Wilayah Kilometer 02 Lati, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Tanggal Mengajukan : 16 Januari 2015
7. Tanggal Selesai Revisi : 22 Januari 2016
8. Nama Pembimbing : Dhanny S. Sutopo, M.Si
9. Keterangan Konsultasi :

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1	Senin, 9-2-2015	Konsultasi Bab I	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
2	Selasa, 3-3-2015	Konsultasi Bab I	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
3	Sabtu, 18-4-2015	Revisi Bab I & Acc Seminar Proposal	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
4	Kamis, 23-4-2015	Seminar Proposal	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
5	Senin, 26-10-2015	Konsultasi Bab II	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
6	Senin, 16-11-2015	Konsultasi Outline Bab II-IV	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
7	Senin, 30-11-2015	Konsultasi Bab II-IV	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
8	Kamis, 10-12-2015	Revisi Bab II-	Dhanny S. Sutopo, M.Si	

		IV & Acc Seminar Hasil		
9	Kamis, 17-12-2015	Seminar Hasil	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
10	Selasa, 12-1-2016	Revisi dan Acc Ujian Skripsi	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
11	Selasa, 19-1-2016	Ujian Skripsi	Dhanny S. Sutopo, M.Si	
12	Jumat, 22-1-2016	Revisi Terakhir dan konsultasi Artikel Ilmiah	Dhanny S. Sutopo, M.Si	

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai:

Malang, 22 Januari 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Antropologi

Dosen Pembimbing

Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.AG., M.Hum

Dhanny S. Sutopo, M.Si

NIP. 19670803 2001121 1 001

NIK. 20090673 0915 1 001

## Lampiran 6

### Surat Perpanjangan Skripsi

Perihal: Permohonan Perpanjangan Pembimbingan dan Penulisan Skripsi

Kepada Yth. Ketua Program Studi Antropologi  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Brawijaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjar Wahyu Ning Tyas  
NIM : 115110801111019  
Program Studi : Antropologi  
Judul Skripsi : IMPLIKASI PROGRAM RESETTLEMENT PT. BERAU COAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIO KULTURAL KAT DAYAK PUNAN DI WILAYAH KM 2 LATI, KECAMATAN GUNUNG TABUR, KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR  
Pembimbing I : Dhanny S. Sutopo, S. Sos., M.Si  
Pembimbing II : -

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan dan penulisan Skripsi pada semester **Ganjil** Tahun Akademik **2015/2016** dan merupakan permohonan perpanjangan yang **I**  
Pada saat ini saya telah melaksanakan penulisan dan konsultasi pembimbingan skripsi sampai dengan :

1. Konsultasi Judul    2. Bab I    **3. Bab II**    4. Bab III    5. Bab IV    6. Bab V

Demikian permohonan saya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Agustus 2015

Pemohon,



(Anjar Wahyu Ning Tyas)  
NIM. 115110801111019

Mengetahui,  
Dosen Penasehat Akademik,



(Dr. Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M. Hum)  
NIP. 1967 080 3200 1121 001

**Catatan:**

1. \*) coret yang tidak perlu
2. Surat permohonan harap diketik, diisi dengan lengkap dan dibuat rangkap 2 (dua)
3. Permohonan perpanjangan skripsi hanya bagi mahasiswa yang sudah memprogram skripsi dan sudah memiliki dosen pembimbing.

## Lampiran 7

## Berita Acara Seminar Hasil



**Untuk Mahasiswa**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 FAKULTAS ILMU BUDAYA  
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
 Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
 E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

**BERITA ACARA  
 SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 13 November 2015

Untuk mahasiswa :

Nama : Anjar Wahyu Ning Tyas  
 N I M : 115110801111019  
 Prodi : S1 Antropologi

Dengan judul:

Implikasi Program Resettlement PT. Berau Coal terhadap Kehidupan Sosio Kultural Warga Komunitas Adat Terpencil Dayak Punan Basap Kilometer 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau

Yang telah dihadiri oleh :

5. Pembimbing I : Dhanny S Sutopo, M.Si  
 6. Pembimbing II : \_\_\_\_\_  
 7. Penguji : \_\_\_\_\_  
 8. Peserta umum sejumlah :   orang (terlampir)

Malang, 13 November 2015  
 Pembimbing

  
 ( Dhanny S Sutopo, M.Si)  
 NIP.



Pembantu Dekan I,

  
 M. A. Muttakin, M.A.

NIP. 1973012003121001

## Lampiran 8

## Surat Izin Penelitian



83

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**Jalan Veteran, Malang 65145 Indonesia**  
Telp. (0341) 575875 (direct), Fax. (0341) 575822 (direct)  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

Nomor : 0795 /UN10.12/AK/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal  
Jl. Pemuda, No.40  
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya:

Nama : ANJAR WAHYU NING TYAS  
NIM : 115110801111019  
Semester : VIII (genap)  
Program Studi : S1 Antropologi Sosial

Mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung dari instansi saudara.

Adapun judul Skripsi dari mahasiswa tersebut adalah :

**IMPLIKASI PROGRAM RESETTLEMENT PT. BERAU COAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIO KULTURAL KAT DAYAK PUNAN DI WILAYAH KM 2 LATI, KECAMATAN GUNUNG TABUR, KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR**

Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan data yang telah diperoleh dan hanya digunakan untuk penelitiannya tersebut (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.



Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.  
NIP. 19610908 198601 1 001

Tembusan:

## Lampiran 9

### Pedoman Wawancara

Nama :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Topik :

1. Perubahan pola dan cara hidup, terkait kesesuaian dengan tempat tinggal  
 Contoh pertanyaan:
  - *Selama tinggal disini apa (rutinitas) saja yang berubah?*
  - *Tolong pendapat/tanggapannya terkait program CSR 4 Pilar?*
  - *Hal-hal apa saja yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan warga?*
  - *Bagaimana cara warga menyesuaikan perubahan ini?*
  
2. Deskripsi keadaan dan pola hidup warga KAT saat ini  
 Contoh pertanyaan: *Bagaimana perbandingan dengan kehidupan di wilayah sebelumnya?*  
*Note: Topik pertanyaan no 2 bisa saling terkait dengan no 1*
  
3. Perubahan-perubahan pola mata pencaharian, dan kesadaran pendidikan  
 Contoh pertanyaan:
  - *Apakah berburu, memancing, mencari madu masih sering dilakukan semenjak pindah kesini?*
  - *Tolong ceritakan bagaimana keadaan dahulu?*
  - *Tolong beri tanggapan tentang program sekolah untuk anak-anak!*
  - *Pekerjaan yang mungkin atau ampu dilakukan di kondisi saat ini?*
  - *Mengapa memilih mata pencaharian tersebut? Atau tidak?**Note: Topik pertanyaan no 2 bisa saling terkait dengan no 1*
  
4. Kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat tentang cara hidup lokal warga KAT Dayak Punan  
 Contoh pertanyaan: *Tolong ceritakan tentang aktivitas adat/ritual adat khas Dayak Punan Basap?*
  
5. Jabaran dan ukuran kesejahteraan menurut warga dan korporasi bagi warga KAT Dayak Punan  
 Contoh pertanyaan:

- *Hal apa yang sangat krusial atau berarti bagi keberlangsungan kehidupan warga?*
  - *Mengapa hal demikian yang dipilih (berarti) bagi warga?*
  -
6. Proses dan kronologi pemindahan warga KAT  
Contoh pertanyaan: *Bagaimana proses pemindahan warga KAT dari Km 10 ke Km 02 ?*
7. Kebijakan *Resettlement*  
Contoh pertanyaan:  
- *Sejak kapan kebijakan ini diterapkan? Latar belakangnya?*  
- *Contoh kebijakan yang serupa?*  
-
8. Sikap, upaya atau motif resistensi Warga KAT  
Contoh pertanyaan: *Sikap atau tindakan apa yang pernah dilakukan warga untuk menunjukkan ketidaksesuaian atas program yang diterapkan oleh pihak perusahaan?*
9. Program CSR yang diterapkan dalam proses peningkatan kesejahteraan warga KAT  
Contoh pertanyaan: *Program apa saja yang berjalan di Km 02 Lati?*
- Note: Topik pertanyaan no 10 bisa saling terkait dengan no 8*
10. Isu-isu dan potensi Konflik  
Contoh pertanyaan: *Konflik apa yang pernah muncul antara warga dengan pihak luar? Atau secara internal?*
- Note: Topik pertanyaan no 10 bisa saling terkait dengan no 8*

## Lampiran 10

## Bukti Ujian Skripsi

<b>BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b>	<b>FORM SEMINAR</b>
---	-------------------------

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ANJAR WAHYU NING TYAS

N I M : 115110801111019

Program : S1 ANTROPOLOGI

Benar-benar telah mendaftarkan diri untuk mengadakan Ujian Skripsi dan yang bersangkutan :

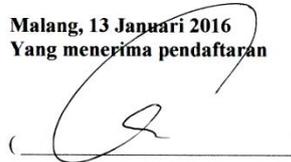
(  ) telah melengkapi

(  ) belum melengkapi

persyaratan administrasi dan akademik sesuai daftar formulir pendaftaran.

UJIAN SKIRPSI

Malang, 13 Januari 2016  
Yang menerima pendaftaran

(  )